PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

lebak unique

GEOPARK BAYAH DOME

Dr. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.
BUPATI LEBAK

H. ADE SUMARDI, SE.
WAKIL BUPATI LEBAK

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dandisampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Didalam isi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam Penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Urusan-urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun 2022.

Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintah Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rangkasbitung, Maret 2023

BUPATI LEBAK,

Dr. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.1.1. Penjelasan Umum I-2
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah I-3
B. Data Geografis Wilayah I-3
1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Daerah I-3
2. Kondisi Topografi I-5
3. Kelerengan I-7
4. Iklim I-9
C. Jumlah Penduduk I-10
1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan I-11
2. Struktur Usia I-12
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin I-13
4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin I-15
D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan I-16
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah I-20
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah I-22
1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah I-23
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah I-24
3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah I-25
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah I-25
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah I-26
1. Pembangunan Manusia I-26
2. Pemulihan Ekonomi I-29
3. Pembangunan Kewilayahan: Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan I-31
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik I-35
B. Visi dan Misi I-43
1. Visi I-43
2. Misi I-44
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah I-47
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan I-57
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-76

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.1. Capaian Kinerja Makro II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) II-30
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-38
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-39
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja II-39
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja II-40
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya II-41
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah II-43
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai II-44
F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja II-46
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan III-1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-2
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-3
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten III-3
3.1.1. Target Kinerja III-4
3.1.2. Realisasi III-4
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten III-9
3.2.1. Target Kinerja III-9
3.2.2. Realisasi III-9
3.3. Permasalahan dan Kendala III-13
3.4. Saran dan Tindak Lanjut III-13
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4.1. Urusan Pendidikan IV-1
4.2. Urusan Kesehatan IV-3
4.3. Urusan Pekerjaan Umum IV-6
4.4. Urusan Perumahan Rakyat IV-9
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-11
4.6. Urusan Sosial IV-15
4.7. Program dan Kegiatan IV-18
BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lebak	I-4
Tabel 1.1	Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-4
Gambar 1.2	Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak	I-6
Tabel 1.2	Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan	I-6
Gambar 1.3	Peta Kemiringan Kabupaten Lebak	I-8
Tabel 1.3	Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-8
Gambar 1.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak	I-9
Tabel 1.4	Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-10
Tabel 1.5	Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2022	I-11
Tabel 1.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-12
Gambar 1.5	Piramida Penduduk	I-13
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-14
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-16
Tabel 1.9	Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lebak	I-17
Tabel 1.10	Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-20
Tabel 1.11	ASN Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	I-22
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-23
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022	I-24
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-25
Tabel 1.15	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	I-38
Tabel 1.16	Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan	I-39
Tabel 1.17	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak	I-47
Tabel 1.18	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-58
Tabel 1.19	Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	I-77
Tabel 2.1	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan Tahun 2022	II-1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) Kab. Lebak	II-2
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kab. Lebak	II-30
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Lebak	II-38
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-40

Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-41
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II-42
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-43
Tabel 2.9	Analisis Pencapaian Sasaran	II-44
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-6
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-11
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV-1
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV-2
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2022	IV-2
Tabel 4.4	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-4
Tabel 4.5	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-4
Tabel 4.6	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-7
Tabel 4.7	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-7
Tabel 4.8	Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PUPR 2022	IV-8
Tabel 4.9	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV-9
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV-10
Tabel 4.11	Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PRKPP 2022	IV-10
Tabel 4.12	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-11
Tabel 4.13	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-12
Tabel 4.14	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-16
Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-16
Tabel 4.16	Jumlah Tenaga Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2022	IV-17
Tabel 4.17	Program dan Kegiatan Penunjang SPM	IV-18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur yang disusun berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lebak selama tahun 2022. Selanjutnya sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga diketahui prestasinya secara nasional.

1.1.1. Penjelasan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lebak bagian dari wilayah Kesultanan Banten dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Pada masa kependudukan Belanda di Indonesia tepatnya tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 (empat) wilayah yaitu Wilayah Banten Lor, Wilayah Banten Kulon, Wilayah Banten Tengah dan Wilayah Banten Kidul. Pada tahun 1828 Pembagian Wilayah Keresidenan Banten mengalami perubahan berdasarkan Staatsblad Nomor 81 tahun 1828. Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin dan Kabupaten Lebak.

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan pembagian diatas memiliki batas-batas yang meliputi District dan Onderdistrict yaitu :

1. District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira;
2. District Lebak Parahiang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang dan Lebak Parahiang;
3. District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkujang dan Kosek;
4. District Madhoor (Madur) yang terdiri dari Onderdisrict Binuangeun, Sawarna dan Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Onderdistrict Madhoor (Madur).

Pada tahun yang sama Wilayah Kabupaten Lebak mengalami perubahan District Kembali dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsblad nomor 266 tahun 1828 diubah menjadi :

1. District Rangkasbitung, meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Onderdistrict Cikulur;
2. District Lebak, meliput Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup;
3. District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candi dan Maja;
4. District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik;
5. District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara dan Bayah.

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung di pindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851. Pada tanggal 14 Agustus 1925 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 8 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak menjadi bagian Karesidenan/Pembantu Gubernur Wilayah I Banten. Dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka secara resmi Karesidenan/Pembantu Gubernur Wilayah I Banten ditetapkan menjadi salah satu Provinsi dan Kabupaten Lebak berpisah dari Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon. Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Rangkasbitung, dengan Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828 berdasarkan Keputusan DPRD nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986.

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

B. Data Geografis Wilayah

Data Geografis Wilayah meliputi paparan tentang kondisi geografis, batas administrasi daerah, kondisi topografi, kelerengan dan iklim di Kabupaten Lebak. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak beribukota di Rangkasbitung yang secara geografis terletak pada koordinat 105^0 25' -106^0 30' Bujur Timur dan antara 6^0 18' – 7^0 00 Lintang Selatan. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Berdasarkan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Peta Dasar Revisi RTRW Kabupaten Lebak dengan Badan Informasi Geospasial pada tanggal 20 Desember 2018, maka hasil perhitungan luas wilayah Kabupaten Lebak dengan menggunakan batas wilayah terbaru menjadi 331.218 Ha berdasarkan :

a. Permendagri No. 4 Th. 2016 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang;
b. Permendagri No. 43 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang;
c. Permendagri No. 47 Th. 2015 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Tangerang;
d. Permendagri No. 55 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor;
e. Permendagri No. 57 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Sukabumi.

Adapun batas administrasi Kabupaten Lebak dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Serang dan Kab. Tangerang;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab. Sukabumi;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Lebak dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lebak

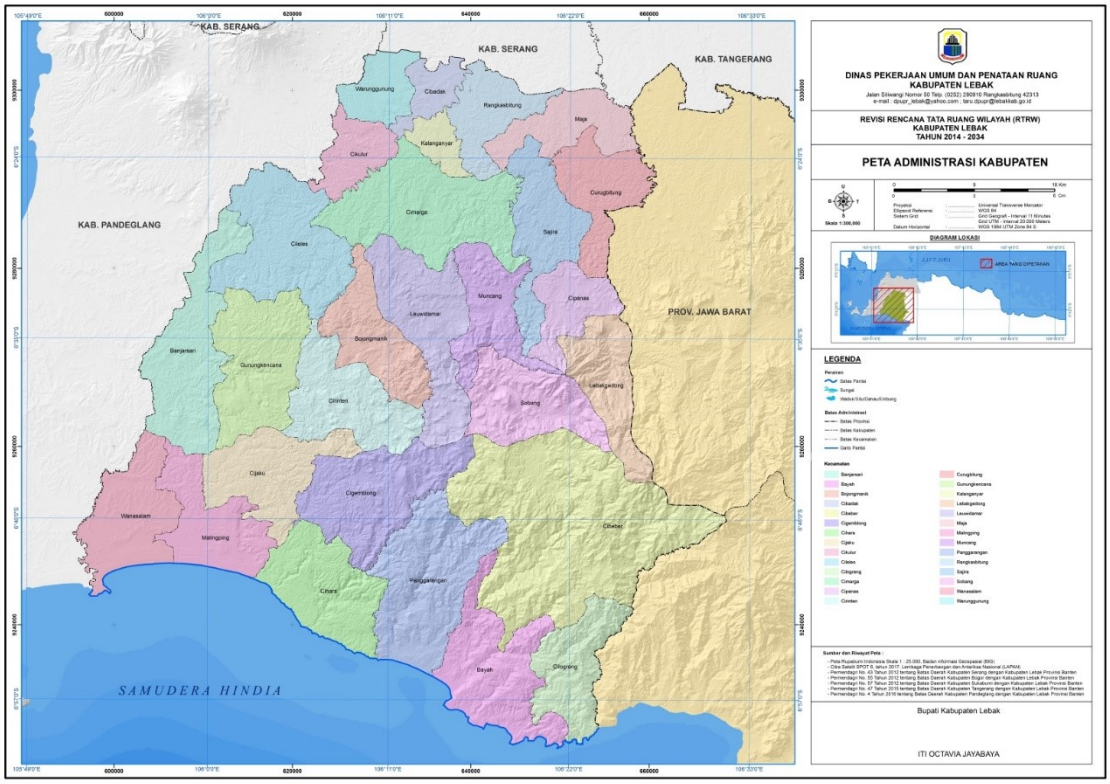

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

Dengan rincian luas wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lokasi Kantor Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	
			Desa	Kelurahan	Ha	%
1	Banjarsari	Cidahu	20		15.186	4,59
2	Bayah	Bayah Barat	11		14.405	4,34
3	Bojongmanik	Bojongmanik	9		9.596	2,9
4	Cibadak	Pasarkeong	15		3.652	1,1
5	Cibeber	Warungbanten	22		40.092	12,11
6	Cigemblong	Cigemblong	9		15.311	4,62
7	Cihara	Cihara	9		12.455	3,76
8	Cijaku	Cijaku	10		10.681	3,46
9	Cikulur	Curugpanjang	13		6.051	1,65
10	Cileles	Cikareo	12		16.464	4,97
11	Cilograng	Gunungbatu	10		9.596	2,89
12	Cimarga	Margajaya	17		18.711	5,65

No.	Kecamatan	Lokasi Kantor Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	
			Desa	Kelurahan	Ha	%
13	Cipanas	Sipayung	14		6.491	1,99
14	Cirinten	Cirinten	10		12.260	3,7
15	Curugbitung	Curugbitung	10		9.133	2,76
16	Gunungkencana	Gunungkencana	12		14.149	4,27
17	Kalanganyar	Pasirkupa	7		2.890	0,87
18	Lebakgedong	Banjarsari	6		9.144	2,76
19	Leuwidamar	Lebak Parahiang	12		14.310	4,32
20	Maja	Maja	14		7.858	2,39
21	Malingping	Malingping Selatan	14		10.997	3,08
22	Muncang	Muncang	12		8.193	2,63
23	Panggarangan	Situregen	11		17.699	5,35
24	Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	11	5	7.376	2,23
25	Sajira	Sajira	10		10.605	3,16
26	Sobang	Sinarjaya	15		11.669	3,37
27	Wanasalam	Bejod	13		11.635	3,51
28	Warunggunung	Selaraja	12		4.609	1,57
Jumlah			**340**	**5**	**331.218**	**100**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Lebak mempunyai keadaan topografi cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 0 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80,62%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 15,66 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 3,74% dari luas keseluruhan. Ketinggian wilayah dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

a. Ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan air laut, tersebar di seluruh Kecamatan;
b. Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut; tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Panggarangan, Sajira dan Sobang;
c. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Muncang dan Sobang.

Keadaan topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini :

Gambar 1.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak

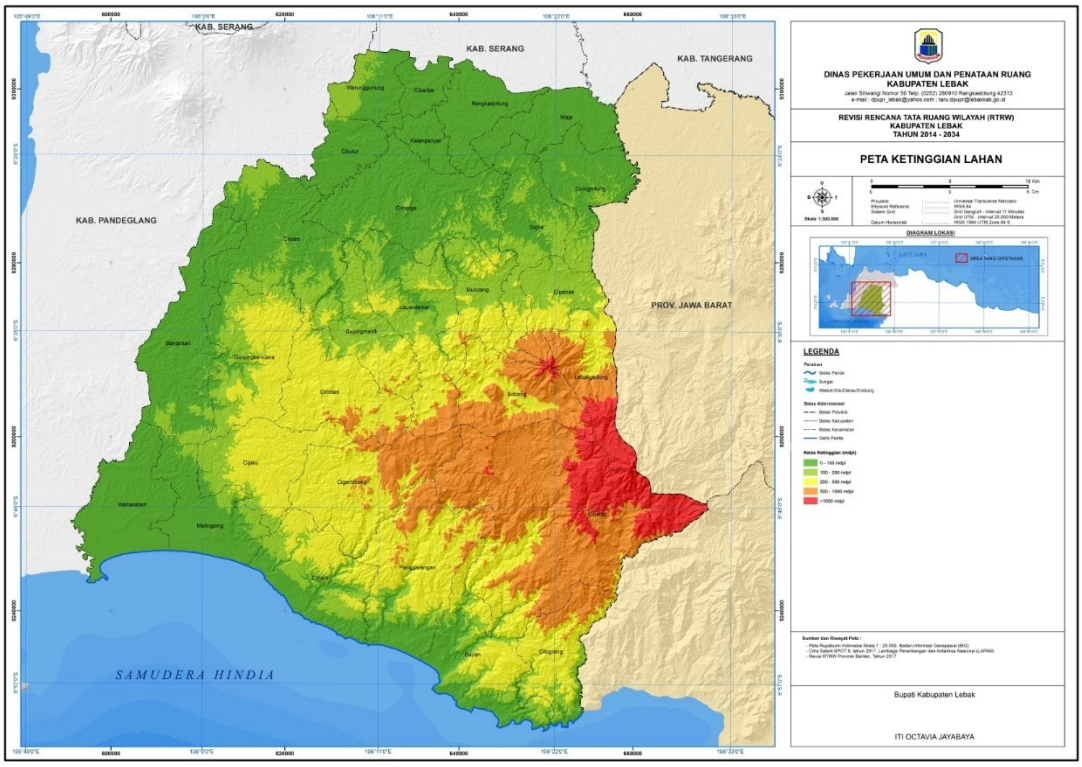

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

Dengan rincian topografi wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)					Jumlah
		0 – 100	100 – 200	200 - 500	500 - 1000	>1000	
1	Banjarsari	13.561,76	1.624,21				15.185,97
2	Bayah	5.121,63	3.527,36	5.416,59	339,53		14.405,11
3	Bojongmanik	553,03	5.196,17	3.721,48	124,85		9.595,54
4	Cibadak	3.651,64					3.651,64
5	Cibeber	14,04	228,93	4.930,22	26.034,78	8884,16	40.092,13
6	Cigemblong		87,58	9.977,54	5.245,71		15.310,82
7	Cihara	4.301,17	3.942,88	4.210,62			12.454,67
8	Cijaku	49,29	2.413,18	8.112,00	106,54		10.681,01
9	Cikulur	5.442,48	608,49				6.050,97
10	Cileles	11.493,00	4.902,12	69,01	0,32		16.464,45
11	Cilograng	694,63	1.499,59	5.156,41	2.245,76		9.596,39
12	Cimarga	15.752,03	2.787,11	172,08			18.711,22
13	Cipanas	41,19	3.779,98	1.704,98	909,22	55,65	6.491,02
14	Cirinten		403,22	10.517,24	1.339,47		12.259,93
15	Curugbitung	7.028,95	2.096,01	8,3			9.133,26
16	Gunungkencana	1.866,99	5.230,79	7.048,94	1,85		14.148,57
17	Kalanganyar	2.890,26					2.890,26
18	Lebakgedong		126,48	2.777,53	3.532,87	2706,87	9.143,75
19	Leuwidamar	2.199,92	6.387,24	4.167,25	1.555,62		14.310,02

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)					Jumlah
		0 – 100	100 – 200	200 - 500	500 - 1000	>1000	
20	Maja	7.858,13					7.858,13
21	Malingping	8.806,98	2.001,92	187,83			10.996,72
22	Muncang	384,66	3.664,09	3.583,41	503,19	58,03	8.193,38
23	Panggarangan	2.912,46	1.781,42	9.837,32	3.167,62		17.698,81
24	Rangkasbitung	7.376,22	0,04				7.376,26
25	Sajira	5.428,08	4.131,14	1.028,80	16,56		10.604,57
26	Sobang		13,86	4.227,24	6.740,24	687,8	11.669,14
27	Wanasalam	11.623,59	11,19				11.634,79
28	Warunggunung	2.963,07	1.646,38				4.609,45
JUMLAH		**122.015,20**	**58.091,39**	**86.854,77**	**51.864,13**	**12.392,5**	**331.218,00**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

3. Kelerengan

Selain dilihat dari ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Lebak juga dilihat dari Angka kelerengan, dari hasil data yang didapat, angka kelerengan curam atau diatas 40% yang ada di Kabupaten Lebak hanya berkisar 12.169,95 ha atau hanya 3,68% dari luas wilayah. Dengan demikian, maka sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Lebak, secara umum mudah untuk dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

Untuk sebaran kelas lereng di Kabupaten Lebak, antara lain sebagai berikut:

a. 0 – 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak
b. 2 – 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak
c. 5 – 15%, tersebar di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak
d. 15 – 25%, tersebar di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak
e. 25 – 40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak
f. >40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak.

Pembagian klasifikasi mengenai luas wilayah berdasarkan kelerengan, dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Gambar 1.3
Peta Kemiringan Kabupaten Lebak

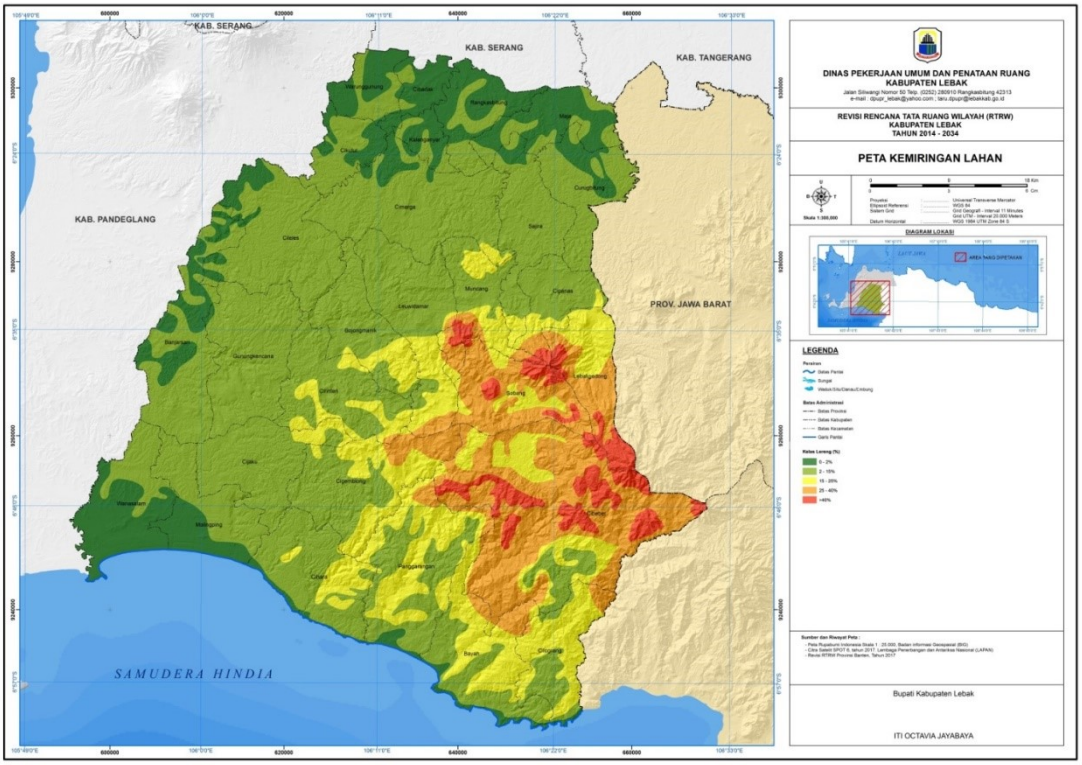

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

Dengan rincian kelerengan wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelerengan / kemiringan lahan					Jumlah
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%	
1.	Banjarsari	4.767,22		10.418,75			15.185,97
2.	Bayah	997,20	6.438,64	5.454,77	1.514,50		14.405,11
3.	Bojongmanik		2.128,18	7.467,36			9.595,54
4.	Cibadak	3.152,94		498,7			3.651,64
5.	Cibeber		6.216,49	2.673,03	23.900,02	7.302,60	40.092,13
6.	Cigemblong		5.513,63	7.419,32	2.377,87		15.310,82
7.	Cihara	669,63	2.524,73	9.260,31			12.454,67
8.	Cijaku		1.085,94	9.595,07			10.681,01
9.	Cikulur	2.310,44		3.740,52			6.050,97
10.	Cileles	2.264,81		14.199,65			16.464,45
11.	Cilograng	167,01	6.039,27	2.694,47	695,64		9.596,39
12.	Cimarga	1.656,47	403,26	16.651,49			18.711,22
13.	Cipanas		1.066,36	4.668,45	510,07	246,14	6.491,02
14.	Cirinten		2.908,18	9.240,88	110,87		12.259,93
15.	Curugbitung	1.820,45		7.312,82			9.133,26
16.	Gunungkencana	145,00		14.003,57			14.148,57
17.	Kalanganyar	1.830,28		1.059,98			2.890,26
18.	Lebakgedong		3.502,18	56,7	3.597,00	1.987,87	9.143,75
19.	Leuwidamar		3.379,61	9.992,54	922,28	15,59	14.310,02

No.	Kecamatan	Kelerengan / kemiringan lahan					Jumlah
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%	
20.	Maja	5.254,62		2.603,51			7.858,13
21.	Malingping	3.500,92		7.495,80			10.996,72
22.	Muncang		2.569,22	3.722,65	1.163,65	737,86	8.193,38
23.	Panggarangan	581,70	8.323,34	7.679,69	1.075,40	38,68	17.698,81
24.	Rangkasbitung	4.638,96		2.737,30			7.376,26
25.	Sajira	660,99	599,76	9.343,83			10.604,57
26.	Sobang		2.080,34		7.744,85	1.843,94	11.669,14
27.	Wanasalam	7.943,49		3.691,29			11.634,79
28.	Warunggunung	2.870,02		1.739,44			4.609,45
JUMLAH		**45.232,15**	**54.779,14**	**175.421,88**	**43.612,14**	**12.172,68**	**331.218,00**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

4. Iklim

Suhu udara di wilayah perencanaan berkisar antara 22,1° celcius sampai dengan 33,1° celcius. Sedangkan suhu udara rata-rata di daratan rendah 23,8° celcius dan suhu rata-rata dataran tinggi adalah 27,0° celcius.

Curah hujan di Kabupaten Lebak adalah masuk dalam kategori signifikan, dengan presipitasi bahkan selama bulan terkering. Iklim ini dianggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut :

Gambar 1.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak

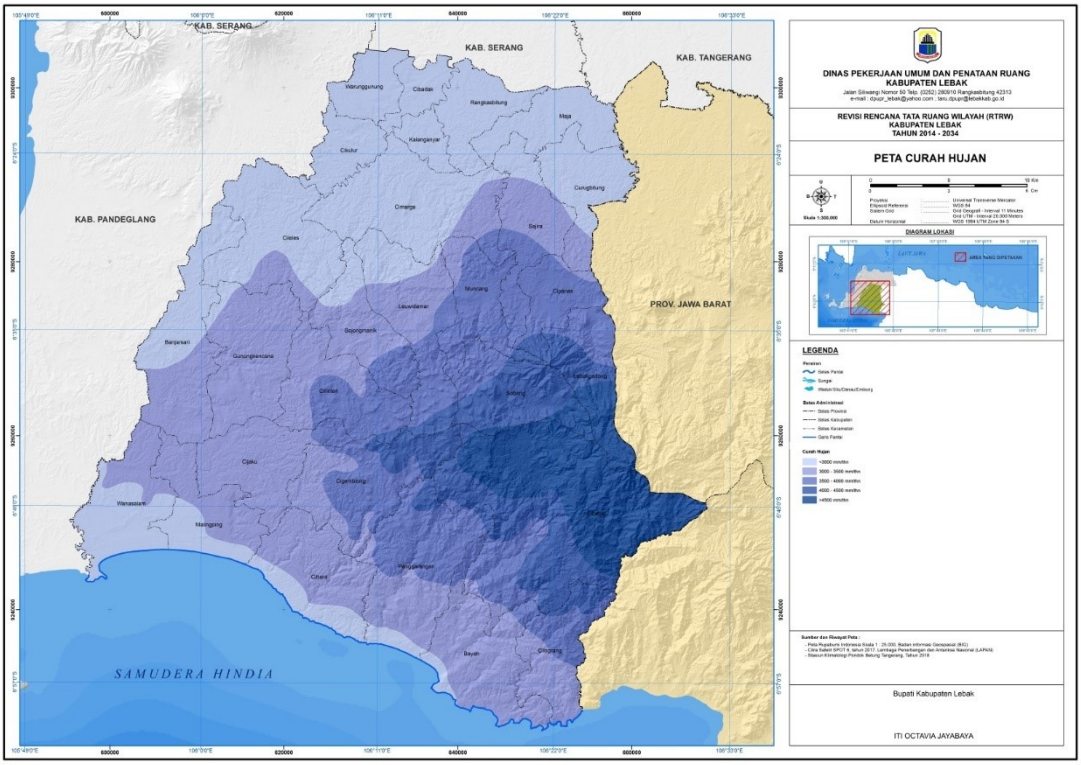

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

Dengan rincian iklim perkecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Curah Hujan Per Kecamatan (Ha)					JUMLAH
		<3000 mm/thn	3000 - 3500 mm/thn	3500 - 4000 mm/thn	4000 - 4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1	Banjarsari	8.116,04		7.069,93			15.185,97
2	Bayah	800,85		12.237,02	1.356,92	10,32	14.405,11
3	Bojongmanik	1.846,07		5.295,26	2.454,21		9.595,54
4	Cibadak	3.651,64					3.651,64
5	Cibeber		22.412,93	783,02	5.207,04	11.689,12	40.092,13
6	Cigemblong			5.052,44	6.646,94	3.611,45	15.310,82
7	Cihara	3.587,85		8.862,84	3,99		12.454,67
8	Cijaku			9.585,31	1.095,70		10.681,01
9	Cikulur	6.050,97					6.050,97
10	Cileles	13.996,83		2.467,63			16.464,45
11	Cilograng			4.818,31	3.374,50	1.403,58	9.596,39
12	Cimarga	15.301,69		2.539,81	869,71		18.711,22
13	Cipanas			366,82	5.329,99	794,21	6.491,02
14	Cirinten			6.148,29	5.833,03	278,61	12.259,93
15	Curugbitung	7.606,20		1.527,07			9.133,26
16	Gunungkencana	771,16		13.377,41			14.148,57
17	Kalanganyar	2.890,26					2.890,26
18	Lebakgedong		3.428,85		2.988,94	2.725,97	9.143,75
19	Leuwidamar	3.376,36		5456,10	4.425,51	1.052,06	14.310,02
20	Maja	7.858,13					7.858,13
21	Malingping	3.440,38		7.556,35			10.996,72
22	Muncang	23,34		1.147,51	6.624,52	398,01	8.193,38
23	Panggarangan	1.212,47		6.455,19	8.797,66	1.233,49	17.698,81
24	Rangkasbitung	7.376,26					7.376,26
25	Sajira	2.143,11		4.882,46	3.579,00		10.604,57
26	Sobang		1.588,89		2.886,00	7.194,25	11.669,14
27	Wanasalam	7.903,21		3.731,58			11.634,79
28	Warunggunung	4.609,45					4.609,45
JUMLAH		**102.562,27**	**27.430,67**	**109.360,33**	**61.473,67**	**30.391,06**	**331.218,00**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk meliputi paparan tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan, struktur usia, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan per jenis kelamin serta jumlah penduduk menurut pendidikan per jenis kelamin di Kabupaten Lebak. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2022 menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dari hasil pembersihan Dirjen Dukcapil adalah sebanyak 1.478.666 jiwa atau bertambah 2,78% dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari laki-laki 759.262 jiwa (51,35%) dan perempuan 719.404 jiwa (48,65%). Penduduk Kabupaten Lebak tersebut tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan. Komposisi Penduduk Kabupaten Lebak menurut jenis kelamin di tiap kecamatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	BANJARSARI	35.746	2,42	33.598	2,27	69.344	4,69
2	BAYAH	24.351	1,65	23.531	1,59	47.882	3,24
3	BOJONGMANIK	13.176	0,89	12.539	0,85	25.715	1,74
4	CIBADAK	38.741	2,62	36.641	2.48	75.382	5,10
5	CIBEBER	30.732	2,08	29.500	2,00	60.232	4,07
6	CIGEMBLONG	10.790	0,73	9.854	0,67	20.644	1,40
7	CIHARA	18.093	1,22	17.401	1,18	35.494	2,40
8	CIJAKU	17.967	1,22	17.042	1,15	35,009	2,37
9	CIKULUR	32.650	2,21	30.250	2,05	62.900	4,25
10	CILELES	30.210	2,04	28.421	1,92	58.631	3,97
11	CILOGRANG	19.153	1,30	18.082	1,22	37.235	2,52
12	CIMARGA	39.172	2,65	36.920	2,50	76.092	5,15
13	CIPANAS	27.279	1,84	26.194	1,77	53.473	3,62
14	CIRINTEN	16.025	1,08	14.930	1,01	30.955	2,09
15	CURUG BITUNG	20.008	1,35	18.533	1,25	38.541	2,61
16	GUNUNG KENCANA	20.997	1,42	19.835	1,34	40.832	2,76
17	KALANGANYAR	21.291	1,44	19.886	1,34	41.177	2,78
18	LEBAKGEDONG	11.556	0,78	11.174	0,76	22.730	1,54
19	LEUWIDAMAR	30.589	2,07	28.483	1,93	59.072	3,99
20	MAJA	33.372	2.26	31.292	2,12	64.664	4,37
21	MALINGPING	38.704	2,62	37.356	2,53	76.060	5,14
22	MUNCANG	20.506	1,39	19.201	1,30	39.707	2,69
23	PANGGARANGAN	21.234	1,44	20.348	1,38	41.582	2,81
24	RANGKASBITUNG	73.067	4,94	70.389	4,76	143.456	9,70
25	SAJIRA	30.595	2,07	29.429	1,99	60.024	4,06
26	SOBANG	16.968	1,15	16.047	1,09	33.015	2,23
27	WANASALAM	32.041	2,17	30.164	2,04	62.205	4,21
28	WARUNGGUNUNG	34.249	2,32	32.364	2,19	66.613	4,50
KAB LEBAK		**759.262**	**51,35**	**719.404**	**48,65**	**1.478.666**	**100,00**

Sumber : Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lebak paling banyak berada di Kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah yaitu 143.456 jiwa atau sekitar 9,70% dari total penduduk Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Rangkasbitung adalah wilayah perkotaan Kabupaten. Pembangunan perumahan baru, perkantoran, perdagangan dan transportasi berada di wilayah Kecamatan ini. Faktor tersebut menyebabkan penduduk Kabupaten Lebak terutama pendatang lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rangkasbitung. Sebaliknya wilayah Kecamatan Cigemblong mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 20.644 jiwa atau 1,40% dari total penduduk Kabupaten Lebak.

2. Struktur Usia

Kelompok umur di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Penduduk Kabupaten Lebak sebagian besar merupakan Penduduk Produktif yaitu kelompok umur antara 15-64 tahun jika di total mencapai 1.024.757 jiwa atau 69,30% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lebak. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), namun harus menjadi perhatian karena kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian dan sisanya sebanyak 25,29% merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 5,40% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 1.6
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022

NO.	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				Penduduk	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	00-04	50.847	3,44	47.632	3,22	98.479	6,66
2	05-09	72.701	4,92	68.027	4,60	140.728	9,52
3	10-14	69.763	4,72	65.041	4,40	134.804	9,12
4	15-19	53.653	3,63	52.340	3,54	105.993	7,17
5	20-24	67.400	4,56	64.280	4,35	131.680	8,91
6	25-29	68.060	4,60	59.959	4,05	128.019	8,66
7	30-34	64.531	4,36	59.537	4,03	124.068	8,39
8	35-39	61.748	4,18	58.674	3,97	120.422	8,14
9	40-44	57.885	3,91	55.653	3,76	113.538	7,68
10	45-49	46.710	3,16	46.415	3,14	93.125	6,30
11	50-54	44.265	2,99	42.255	2,86	86.520	5,85
12	55-59	34.129	2,31	33.449	2,26	67.578	4,57
13	60-64	28.039	1,90	25.775	1,74	53.814	3,64
14	65-69	17.106	1,16	16.008	1.08	33.114	2,24
15	70-74	10.865	0,73	10.740	0,73	21.605	1,46
16	> 75	11.560	0,78	13.619	0,92	25.179	1,70
TOTAL		759.262	51,35	719.404	48,65	1.478.666	100

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida seperti bibawah ini, dimana badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan.

Gambar 1.5
Piramida Penduduk Kabupaten Lebak

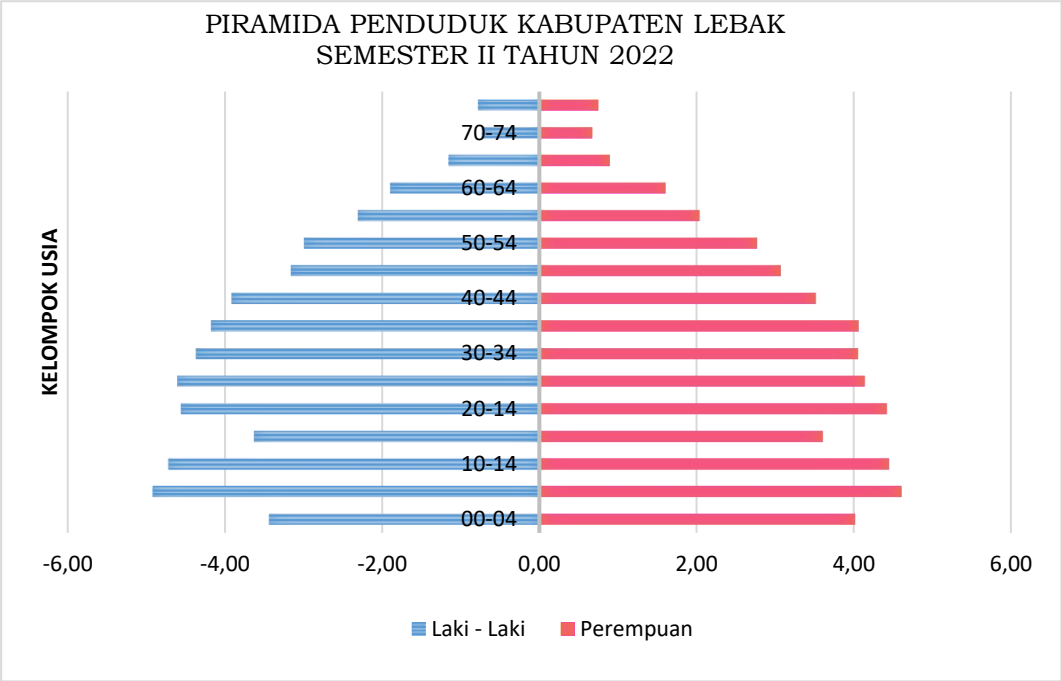

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Grafik piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa apabila dikelompokkan kembali, berdasarkan kelompok umur 0-4 tahun (balita) hanya sekitar 6,66% dari jumlah penduduk, kelompok umur 5-14 tahun sekitar 18,63%, sementara persentase terbesar pada kelompok 15-64 tahun (usia kerja/produktif) yaitu mencapai 69,30%, sedangkan untuk kelompok >65 tahun sekitar 5,40%. Komposisi terbesar penduduk Kabupaten Lebak adalah usia kerja/produktif, setidaknya secara ekonomi beban yang harus ditanggung akan lebih kecil. Hal tersebut bisa tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang lebih baik dan memadai.

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak mengalami perubahan yang siginfikan. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Informasi mengenai Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dapat menggambarkan Sektor Pekerjaan apa saja yang digeluti oleh Sebagian Besar Penduduk di Kabupaten Lebak. Informasi mengenai Jumlah Penduduk Menurut Jenis pekerjaan dapat di sajikan melalui Tabel berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	Belum/Tidak Bekerja	224.583	15,19	185.716	12,56	410.299	27,75
2	Mengurus Rumah Tangga	74	0,01	392.457	26,54	392.531	26,55
3	Pelajar/Mahasiswa	126.456	8,55	97.613	6,60	224.069	15,15
4	Pensiunan	2.961	0,20	1.096	0,07	4.057	0,27
5	Pegawai Negeri Sipil	6.585	0,45	4.574	0,31	11.159	0,75
6	Tentara Nasional Indonesia	864	0,06	4	0.00	868	0,06
7	Kepolisian RI	772	0,05	30	0,00	802	0,05
8	Perdagangan	613	0,04	152	0,01	765	0,05
9	Petani/Pekebun	84.858	5,74	12.138	0,82	96.996	6,56
10	Peternak	40	0,00	7	0,00	47	0,00
11	Nelayan/Perikanan	1.370	0,09	2	0,00	1.372	0,09
12	Industri	32	0,00	8	0,00	40	0,00
13	Konstruksi	42	0,00	0	0,00	42	0,00
14	Transportasi	128	0,01	0	0,00	128	0,01
15	Karyawan Swasta	28.435	1,92	5.461	0,37	33.896	2,29
16	Karyawan BUMN	977	0,07	155	0,01	1.132	0,08
17	Karyawan BUMD	134	0,01	59	0,00	193	0,01
18	Karyawan Honorer	2.661	0,18	2.266	0,15	4.885	0,33
19	Buruh Harian Lepas	145.934	9,87	5.352	0,36	151.286	10,23
20	Buruh Tani/Perkebunan	13.538	0,92	1.640	0,11	15.178	1,03
21	Buruh Nelayan/Perikanan	930	0,06	11	0,00	941	0,06
22	Buruh Peternakan	51	0,00	5	0,00	56	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	10	0,00	386	0,02	396	0,03
24	Tukang Cukur	13	0,00	0	0,00	13	0,00
25	Tukang Listrik	18	0,00	1	0,00	19	0,00
26	Tukang Batu	26	0,00	0	0,00	26	0,00
27	Tukang Kayu	98	0,01	0	0,00	98	0,01
28	Tukang Sol Sepatu	3	0,00	0	0,00	3	0,00
29	Tukang Las/Pandai Besi	77	0,01	1	0,00	78	0,01
30	Tukang Jahit	83	0,01	14	0,00	97	0,01
31	Tukang Gigi	2	0,00	0	0,00	2	0,00
32	Penata Rias	4	0,00	7	0,00	11	0,00
33	Penata Busana	5	0,00	1	0,00	6	0,00
34	Penata Rambut	2	0,00	3	0,00	5	0,00
35	Mekanik	78	0,01	0	0,00	78	0,00
36	Seniman	24	0,00	2	0,00	26	0,00
37	Tabib	2	0,00	0	0,00	2	0,00
38	Paraji	0	0,00	28	0,00	28	0,00
40	Penterjemah	0	0,00	2	0,00	2	0,00
41	Imam Mesjid	30	0,00	0	0,00	30	0,00
42	Pendeta	2	0,00	2	0,00	4	0,00
44	Wartawan	50	0,00	1	0,00	51	0,00
45	Ustadz/Mubaligh	793	0,05	39	0,00	832	0,06
46	Juru Masak	2	0,00	3	0,00	5	0,00
48	Anggota DPR-RI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
49	Anggota BPK	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50	Bupati	0	0,00	1	0,00	1	0,00
58	Wakil Bupati	1	0,00	0	0,00	1	0,00

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
59	Anggota DPRD Provinsi	3	0,00	0	0,00	3	0,00
62	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	16	0,00	3	0,00	19	0,00
63	Dosen	87	0,01	62	0,00	149	0,01
64	Guru	1.883	0,13	2.458	0,17	4.341	0,29
65	Pengacara	13	0,00	4	0,15	17	0,15
67	Notaris	3	0,00	2	0,00	5	0,00
68	Arsitek	5	0,00	0	0,00	5	0,00
69	Akuntan	1	0,00	1	0,00	2	0,00
70	Konsultan	18	0,00	3	0,00	21	0,00
71	Dokter	66	0,00	87	0,01	153	0,01
72	Bidan	0	0,00	1.072	0,07	1.072	0,07
73	Perawat	494	0,03	526	0,04	1.020	0,07
74	Apoteker	9	0,00	34	0,00	43	0,00
75	Psikiater/Psikolog	1	0,00	1	0,00	2	0,00
76	Penyiar Televisi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78	Penyiar Radio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
79	Pelaut	40	0,00	1	0,00	41	0,00
80	Peneliti	22	0,00	2	0,00	24	0,00
81	Sopir	4.953	0,33	2	0,00	4.955	0,34
83	Paranormal	2	0,00	0	0,00	2	0,00
84	Pedagang	4.307	0,29	1.008	0,07	5.315	0,36
85	Perangkat Desa	389	0,03	83	0,01	472	0,03
86	Kepala Desa	105	0,01	6	0,00	111	0,01
87	Biarawati	0	0,00	0	0,00	0	0,00
88	Wiraswasta	103.421	6,99	4.825	0,33	108.246	7,32
89	Lainnya	62	0,00	27	0,00	89	0,01
JUMLAH		**759.262**	**51,35**	**719.404**	**48,65**	**1.478.666**	**100**

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Dilihat dari Jenis Pekerjaan yang di Lakukan oleh penduduk Kabupaten Lebak nampak proporsi laki-laki yang bekerja (51,35%) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yang bekerja (48,65%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjwab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi masyarakat terutama dalam menerima hal baru karena masyarakat

merupakan target sekaligus pelaku pembangunan. Hasil pembangunan muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2022

NO	Pendidikan Terakhir	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	(n)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	195.689	13,23	186.361	12,60	382.050	25,83
2	Belum Tamat SD/Sederajat	72.646	4,91	67.139	4,54	139.785	9,45
3	Tamat SD/Sederajat	283.760	19,19	301.219	20,37	584.979	39,56
4	SLTP/Sederajat	103.392	6,99	88.516	5,99	191.908	12,98
5	SLTA/Sederajat	85.818	5,80	59.417	4,02	145.235	9,82
6	Diploma I/II	1.383	0,11	1.355	0,10	2.738	0,21
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	2.289	0,15	3.381	0,23	5.670	0,38
8	Diploma IV/Strata I	13.209	0,90	11.584	0,78	24.793	1,68
9	Strata II	1.020	0,07	406	0,03	1.426	0,10
10	Strata III	58	0,00	26	0,00	82	0,00
	JUMLAH	**759.262**	**51,35**	**719.404**	**48,65**	**1.478.666**	**100**

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Dari Tabel di atas, bahwa Jenjang Pendidikan untuk Penduduk Kabupaten Lebak masih didominasi oleh Tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 584.979 jiwa atau 39,56% dari seluruh penduduk Kabupaten Lebak. Sedangkan penduduk yang memiliki pendidikan terakhir Strata III berjumlah 82 jiwa. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa di era globalisasi berlangsung persaingan untuk mendapatkan pekerjaan lebih ketat. Peningkatan pendidikan vocasional, akses pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa. Untuk Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan yang paling banyak desanya dengan 22 desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Lebakgedong dengan 6 Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.9
Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lebak

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
1.	**Kecamatan Banjarsari** 1. Kertaraharja 2. Kerta 3. Bojongjuruh 4. Lebakkeusik 5. Leulipuh 6. Tamansari 7. Cilegong Ilir 8. Cisapih 9. Jalupang Girang 10. Cidahu 11. Keusik 12. Ciruji 13. Cibaturkeusik 14. Bendungan 15. Kumpai 16. Gunungsari 17. Kaduhauk 18. Labanjaya 19. Umbuljaya 20. Kertarahayu	2.	**Kecamatan Bayah** 1. Bayah Barat 2. Darnasari 3. Sawarna 4. Cidikit 5. Bayah Timur 6. Cimancak 7. Suwakan 8. Pasir Gombong 9. Cisuren 10. Sawarna Timur 11. Pamubulan	3.	**Kecamatan Bojongmanik** 1. Keboncau 2. Cimayang 3. Parakanbeusi 4. Bojongmanik 5. Mekarmanik 6. Kadurahayu 7. Harjawana 8. Pasir Bitung 9. Mekar Rahayu
4.	**Kecamatan Cibadak** 1. Tambakjaya 2. Bojongleles 3. Kaduagung Timur 4. Kaduagung Barat 5. Malabar 6. Pasar Keong 7. Cibadak 8. Panancangan 9. Asem 10. Cisangu 11. Bojongcae 12. Cimenteng Jaya 13. Mekar Agung 14. Asem Margaluyu 15. Kaduagung Tengah	5.	**Kecamatan Cibeber** 1. Cikotok 2. Cibeber 3. Warungbanten 4. Neglasari 5. Mekarsari 6. Cikadu 7. Kujangjaya 8. Cisungsang 9. Hegarmanah 10. Cihambali 11. Sukamulya 12. Citorek Tengah 13. Citorek Timur 14. Citorek Kidul 15. Kujangsari 16. Situmulya 17. Sinargali 18. Wanasari 19. Gunung Wangun 20. Citorek Barat 21. Citorek Sabrang 22. Ciherang	6.	**Kecamatan Cigemblong** 1. Peucangpari 2. Cibungur 3. Cikaret 4. Cikadongdong 5. Cikaratuan 6. Mugijaya 7. Cigemblong 8. Cikate 9. Wangunjaya

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
7.	**Kecamatan Cihara** 1. Pondokpanjang 2. Ciparahu 3. Cihara 4. Karangkamulyan 5. Panyaungan 6. Mekarsari 7. Lebak Peundeuy 8. Citepusaeun 9. Barunai	8.	**Kecamatan Cijaku** 1. Kandangsapi 2. Cihujan 3. Ciapus 4. Cijaku 5. Mekarjaya 6. Cipalabuh 7. Cibeureum 8. Cimenga 9. Sukasenang 10. Kapunduhan	9.	**Kecamatan Cikulur** 1. Anggalan 2. Muaradua 3. Muncangkopong 4. Tamanjaya 5. Curugpanjang 6. Cukulur 7. Cigoong Selatan 8. Cigoong Utara 9. Sumurbandung 10. Sukaharja 11. Sukadaya 12. Parage 13. Pasir Gintung
10.	**Kecamatan Cileles** 1. Mekarjaya 2. Pasindangan 3. Kujangsari 4. Parungkujang 5. Cikareo 6. Cileles 7. Margamulya 8. Cipadang 9. Daroyon 10. Prabugantungan 11. Gumuruh 12. Banjarsari	11.	**Kecamatan Cilograng** 1. Cibareno 2. Cilograng 3. LebakTipar 4. Cikatomas 5. Cijengkol 6. PasirBungur 7. Cikamunding 8. Girimukti 9. Cireundeu 10. GunungBatu	12.	**Kecamatan Cimarga** 1. Sarageni 2. Jayasari 3. Magatirta 4. Gunung Anten 5. Sangkan Manik 6. Sudamanik 7. Girimukti 8. Jayamanik 9. Margaluyu 10. Sangiang Jaya 11. Tambak 12. Margajaya 13. Cimarga 14. Mekarjaya 15. Intenjaya 16. Karyajaya 17. Mekarmulya
13.	**Kecamatan Cipanas** 1. Pasirhaur 2. Girilaya 3. Jayapura 4. Giriharja 5. Bintangsari 6. Cipanas 7. Luhurjaya 8. Sipayung 9. Bintangresmi 10. Malangsari 11. Sukasari 12. Haurgajrug 13. Talagahiang 14. Harumsari	14.	**Kecamatan Cirinten** 1. Parakanlima 2. Kadudamas 3. Datarcae 4. Karoya 5. Nangerang 6. Cirinten 7. Karangnunggal 8. Cempaka 9. Badur 10. Cibarani	15.	**Kecamatan Curugbitung** 1. Guradog 2. Candi 3. Sekarwangi 4. Curugbitung 5. Ciburuy 6. Mayak 7. Cilayang 8. Cipining 9. Cidadap 10. Lebakkasih

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
16.	**Kecamatan Gunungkencana** 1. Gunungkendeng 2. Cimanyangray 3. Keramatjaya 4. Bulakan 5. Cicaringin 6. Ciakar 7. Cisamping 8. Bojong Koneng 9. Ciginggang 10. Gunung Kencana 11. Sukanegara 12. Tanjungsari Indah	17.	**Kecamatan Kalanganyar** 1. Cilangkap 2. Pasir Kupa 3. Aweh 4. Sukamekarsari 5. Kalanganyar 6. Sangiang Tanjung 7. Cikatapis	18.	**Kecamatan Lebakgedong** 1. Lebakgedong 2. Lebaksitu 3. Ciladaeun 4. Banjarsari 5. LebaksAngka 6. Banjar Irigasi
19.	**Kecamatan Leuwidamar** 1. Kanekes 2. Nayagati 3. Bojong Menteng 4. Cisimeut 5. Margawangi 6. Sangkanwangi 7. Jalupang Mulya 8. Leuwidamar 9. Cibungur 10. Lebak Parahiang 11. Wantisari 12. Cisimeut Raya	20.	**Kecamatan Maja** 1. Cilangkap 2. Pasir Kecapi 3. Mekarsari 4. Sangiang 5. Tanjung Sari 6. Maja 7. Curug Badak 8. Pasir Kembang 9. Padasuka 10. Gubugan 11. cibeureum 12. Binong 13. Sindangmulya 14. Buyut Mekar 15. Maja Baru	21.	**Kecamatan Manglingping** 1. Cilangkahan 2. Pagelaran 3. Sukaraja 4. Malingping Utara 5. Bolang 6. Cipeundeuy 7. Rahong 8. Kadujajar 9. Kersaratu 10. Malingping Selatan 11. Sumberwaras 12. Sukamanah 13. Senanghati 14. Sangiang
22.	**Kecamatan Muncang** 1. Pasireurih 2. Pasirnangka 3. Cikarang 4. Ciminyak 5. Leuwicoo 6. Muncang 7. Sukanagara 8. Sindangwangi 9. Jagakarsa 10. Tanjungwangi 11. Mekarwangi 12. Giri Jagabaya	23.	**Kecamatan Panggarangan** 1. Situregen 2. Sukajadi 3. Hegarmanah 4. Panggarangan 5. Mekarjaya 6. Sindangratu 7. Cimandiri 8. Gunung Gede 9. Songgong 10. Jatake 11. Cibarengkok	24.	**Kecamatan Rangkasbitung** 1. Pasir Tanjung 2. Rangkasbitung Timur 3. Rangkasbitung Barat 4. Rangkasbitung Timur 5. Jatimulya 6. Cimangeungteung 7. Citeras 8. Mekarsari 9. Nameng 10. Kolelet Wetan 11. Sukamanah 12. Pabuaran 13. Cijoro Pasir 14. Cijoro Lebak 15. Muara Ciujung Barat 16. Narimbang Mulia

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
25.	**Kecamatan Sobang** 1. Sinarjaya 2. Cirompang 3. Sukamaju 4. Majasari 5. Ciparasi 6. Sindanglaya 7. Sobang 8. Sukajaya 9. Hariang 10. Sukaresmi	26.	**Kecamatan Sajira** 1. Maraya 2. Margaluyu 3. Sukamarga 4. Sindangsari 5. Sajiramekar 6. Sajira 7. Sukarame 8. Calungbungur 9. Sukajaya 10. Paja 11. Mekarsari 12. Pajagan 13. Parungsari 14. Bungur Mekar 15. Ciuyah	27.	**Kecamatan Wanasalam** 1. Muara 2. Wanasalam 3. Sukatani 4. Cikeusik 5. Bejod 6. Cipedang 7. Cisarap 8. Parungsari 9. Cipeucang 10. ParungPanjang 11. Ketapang 12. Cilangkap 13. Karang Pamidangan
28.	**Kecamatan Warunggunung** 1. Pasirtangkil 2. Sukarendah 3. Selaraja 4. Warunggunung		5. Cibuah 6. Baros 7. Sindangsari 8. Banjarsari		9. Cempaka 10. Padasuka 11. Sukaraja 12. Jagabaya

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2022-2042.

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah di Kabupupaten Lebak diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah ini juga menetapkan tipe Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja Urusan Pemerintahan. Adapun Struktur Pemerintahan Kabupaten Lebak terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, lembaga teknis daerah yang meliputi 23 Dinas, 6 Badan, BPBD, RSUD Adjidarmo dan 28 Kecamatan. Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak didukung oleh Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Berikut kami sajikan data PNS dan P3K dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.10
Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022

NO	NAMA OPD	PNS			PPPK			TOTAL ASN		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Sekretariat Daerah	76	29	105	0	0	0	76	29	105
2	Sekretariat DPRD	18	10	28	0	0	0	18	10	28
3	Inspektorat Daerah	30	25	55	0	0	0	30	25	55
4	RSUD dr. Adjidarmo	111	193	304	3	22	25	114	215	329
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22	13	35	0	0	0	22	13	35

NO	NAMA OPD	PNS			PPPK			TOTAL ASN		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26	11	37	0	0	0	26	11	37
7	Badan Pendapatan Daerah	34	7	41	0	0	0	34	7	41
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	14	33	0	0	0	19	14	33
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	1	12	0	0	0	11	1	12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	18	32	0	0	0	14	18	32
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	8	19	0	0	0	11	8	19
12	Dinas Pendidikan	2528	2875	5403	653	939	1592	3181	3814	6995
13	Dinas Perikanan	17	10	27	0	0	0	17	10	27
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13	5	18	0	0	0	13	5	18
15	Dinas Kesehatan	277	768	1045	11	17	28	288	785	1073
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19	4	23	0	0	0	19	4	23
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	12	26	1	0	1	15	12	27
18	Dinas Lingkungan Hidup	75	13	88	0	0	0	75	13	88
19	Dinas Ketahanan Pangan	11	8	19	0	0	0	11	8	19
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18	16	34	0	0	0	18	16	34
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163	16	179	0	0	0	163	16	179
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	10	29	0	0	0	19	10	29
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	16	21	0	0	0	5	16	21
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	8	28	0	0	0	20	8	28
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26	8	34	0	0	0	26	8	34
26	Dinas Perhubungan	44	4	48	0	0	0	44	4	48
27	Dinas Pertanian	100	41	141	48	15	63	148	56	204
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	11	34	1	0	1	24	11	35
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	19	6	25	0	0	0	19	6	25
30	Dinas Sosial	17	7	24	0	0	0	17	7	24
31	Dinas Tenaga Kerja	10	6	16	0	0	0	10	6	16
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	50	4	54	0	0	0	50	4	54
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	6	16	0	0	0	10	6	16
34	Kecamatan Rangkasbitung	26	15	41	1	0	1	27	15	42
35	Kecamatan Kalanganyar	11	2	13	0	0	0	11	2	13
36	Kecamatan Cibadak	14	2	16	0	0	0	14	2	16
37	Kecamatan Warunggunung	11	3	14	0	0	0	11	3	14
38	Kecamatan Cikulur	16	3	19	0	0	0	16	3	19
39	Kecamatan Cimarga	13	3	16	0	0	0	13	3	16
40	Kecamatan Leuwidamar	15	2	17	1	0	1	16	2	18
41	Kecamatan Bojongmanik	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42	Kecamatan Cirinten	16	0	16	0	0	0	16	0	16
43	Kecamatan Maja	17	3	20	1	0	1	18	3	21
44	Kecamatan Curugbitung	18	2	20	0	0	0	18	2	20
45	Kecamatan Sajira	15	3	18	0	0	0	15	3	18

NO	NAMA OPD	PNS			PPPK			TOTAL ASN		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
46	Kecamatan Cipanas	16	3	19	0	0	0	16	3	19
47	Kecamatan Lebakgedong	10	0	10	0	0	0	10	0	10
48	Kecamatan Muncang	11	0	11	0	0	0	11	0	11
49	Kecamatan Cilograng	8	1	9	0	0	0	8	1	9
50	Kecamatan Cileles	17	2	19	0	0	0	17	2	19
51	Kecamatan Gunungkencana	12	2	14	0	0	0	12	2	14
52	Kecamatan Banjarsari	14	2	16	0	0	0	14	2	16
53	Kecamatan Cijaku	13	2	15	0	0	0	13	2	15
54	Kecamatan Cigemblong	9	2	11	0	0	0	9	2	11
55	Kecamatan Malingping	12	4	16	0	0	0	12	4	16
56	Kecamatan Wanasalam	13	0	13	0	0	0	13	0	13
57	Kecamatan Sobang	8	0	8	0	0	0	8	0	8
58	Kecamatan Panggarangan	11	2	13	0	0	0	11	2	13
59	Kecamatan Cihara	13	1	14	0	0	0	13	1	14
60	Kecamatan Bayah	10	5	15	0	0	0	10	5	15
61	Kecamatan Cibeber	17	3	20	0	0	0	17	3	20
JUMLAH		4.231	4250	8481	720	993	1713	4951	5243	10194

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak.

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta P3K yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebak tersebar di seluruh Perangkat Daerah dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan S3 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11
ASN Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SD	85	3	88
2	SMP	50	2	52
3	SMA	564	165	729
4	DI	3	8	11
5	DII	151	141	292
6	DIII	202	567	769
7	DIV/S1	3460	4125	7585
8	S2	432	232	664
9	S3	4	0	4
TOTAL		**4.951**	**5.243**	**10.194**

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi setiap program dan kegiatan pembangunan dalam mencapai target-target pembangunan. Adapun arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah, serta kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.2.711.193.867.043,00 dapat terealisasi Rp.2.647.900.936.208,00 atau 99,67% yang berarti kurang dari target anggaran sebesar Rp.63.292.930.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**2.711.193.867.043,00**	**2.647.900.936.208,00**	**(63.292.930.835,00)**	**97,67**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**378.978.056.833,00**	**420.436.453.710,00**	**41.458.396.877,00**	**110,94**
4.1.1.	PAJAK DAERAH	157.990.931.461,00	169.689.458.362,00	11.698.526.901,00	107,40
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	14.612.120.081,00	15.504.945.108,00	892.825.027,00	106,11
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	5.573.222.115,00	6.023.001.558,00	449.779.443,00	108,07
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	200.801.783.176,00	229.219.048.682,00	28.417.265.506,00	114,15
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.246.955.735.110,00**	**2.158.693.587.281,00**	**(88.262.147.829,00)**	**96,07**
4.2.1.	PENDAPATAN NTRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.037.806.388.637,00	1.950.928.497.808,00	(86.877.890.829,00)	95,74
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	209.149.346.473,00	207.765.089.473,00	(1.384.257.000,00)	99,34
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**85.260.075.100,00**	**68.770.895.217,00**	**(16.489.179.883,00)**	**80,66**
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	85.260.075.100,00	68.770.895.217,00	(16.489.179.883,00)	80,66
4.3.3.	LAIN LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2022 (unaudited)

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 mencapai sebesar 110,94% atau sebesar Rp.420.436.453.710,00 dari target sebesar Rp.378.978.056.833,00. Untuk Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 96,07% atau sebesar Rp.2.158.693.587.281,00 dari target sebesar Rp.2.246.955.735.110,00. Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.68.770.895.217,00 atau sebesar 80,66% dari target Rp.85.260.075.100,00.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan sebesar Rp.2.937.247.174.353,00 dapat direalisasi sebesar Rp.2.635.141.032.169,00 atau 89,71% dengan selisih kurang dari anggaran sebesar Rp.302.106.142.184,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.2.104.760.266.033,00 dapat direalisasi sebesar Rp.1.843.760.656.393,00 atau 87,60% dengan selisih kurang dari anggaran sebesar Rp.260.999.609.640,00;
b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.343.939.442.631,00 dapat direalisasi sebesar Rp.315.867.289.170,00 atau 91,84% kurang dari anggaran sebesar Rp.28.072.153.461,00;
c. Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp.33.517.477.516,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.22.726.824.433,00 atau 67,81% kurang dari anggaran sebesar Rp.10.790.653.083,00;
d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.455.029.988.173,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.452.786.262.173,00 atau 99,51% kurang dari anggaran sebesar Rp.2.243.726.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.	**BELANJA**	**2.937.247.174.353,00**	**2.635.141.032.169,00**	**(302.106.142.184,00)**	**89,71**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.104.760.266.033,00**	**1.843.760.656.393,00**	**(260.999.609.640,00)**	**87,60**
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.147.232.125.400,00	983.500.359.419,00	(163.731.765.981,00)	85,73
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	815.493.863.899,00	742.150.882.390,00	(73.342.981.509,00)	91,01
5.1.5.	BELANJA HIBAH	135.095.876.734,00	111.415.514.584,00	(23.680.362.150,00)	82,47
5.1.6.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.938.400.000,00	6.693.900.000,00	(244.500.000,00)	96,48
5.2.	**BELANJA MODAL**	**343.939.442.631,00**	**315.867.289.170,00**	**(28.072.153.461,00)**	**91,84**
5.2.1.	BELANJA MODAL TANAH	356.500.000,00	353.232.800,00	(3.267.200,00)	99,08
5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	90.583.468.843,00	75.937.521.561,00	(14.645.947.282,00)	83,83
5.2.3.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	56.674.615.195,00	51.445.537.672,00	(5.229.077.523,00)	90,77
5.2.4.	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	191.912.988.815,00	184.041.300.510,00	(7.871.688.305,00)	95,90
5.2.5.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	4.411.869.778,00	4.089.696.627,00	(322.173.151,00)	92,70
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**33.517.477.516,00**	**22.726.824.433,00**	**(10.790.653.083,00)**	**67,81**
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.517.477.516,00	22.726.824.433,00	(10.790.653.083,00)	67,81

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**455.029.988.173,00**	**452.786.262.173,00**	**(2.243.726.000,00)**	**99,51**
5.4.1.	BELANJA BAGI HASIL	20.740.040.231,00	20.740.040.231,00		100,00
5.4.2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	434.289.947.942,00	432.046.221.942,00	(2.243.726.000,00)	99,48
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(226.053.307.310,00)**	**12.759.904.039,00**	**238.813.211.349,00**	**(5,64)**

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2022 (unaudited)

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.226.053.307.310,00 dengan realisasi sebesar Rp.226.553.309.733,00 atau 100,22%. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.288.086.981.713,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.288.086.981.713,00 atau 100%, yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) audited.
b. Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.22.033.674.403,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.533.671.980,00 atau 97,73%, yaitu :
   1) PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp.13.000.000.000,00
   2) PT LKM Rangkasbitung sebesar Rp.5.000.000.000,00
   3) PT. Bank BJB Rangksbitung sebesar Rp. 3.533.671.980,00
c. Pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 40.000.000.000,00.

Uraian lebih lanjut mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
6.	**PEMBIAYAAN**	**288.086.981.713,00**	**288.086.981.713,00**	**0,00**	**100,00**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**288.086.981.713,00**	**288.086.981.713,00**	**0,00**	**100,00**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**62.033.674.403,00**	**61.533.671.980,00**	**(500.002.423,00)**	**99,19**
	PEMBIAYAAN NETTO	**226.053.307.310,00**	**226.553.309.733,00**	**500.002.423,00**	**100,22**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**239.313.213.772,00**	**239.313.213.772,00**	

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2022 (unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan keluaran (output) program/kegiatan/subkegiatan yang tepat

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Kabupaten Lebak, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Perencanaan Pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik berdasarkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Secara umum Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, serta beragam permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara abstraktif permasalahan pembangunan daerah dimaksud diformulasi dalam beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia

Secara Nasional, aspek pembangunan manusia merupakan aspek yang mendapat perhatian serius dimana dimensi pembangunan sumber daya manusia merupakan visi ke dua dari 5 visi Presiden Tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing dan fleksibelitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Hal tesebut diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan memasukan aspek pembangunan manusia ke dalam misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui penetapan indikator pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan nasional berdasarkan kewenangan daerah yang selaras antara pusat dan daerah.

Dalam perkembangannya sebagian besar indikator pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun secara faktual pembangunan manusia di Kabupaten Lebak masih terkendala oleh sejumlah permasalahan sebagaimana tercermin dari progresifitas peningkatannya yang kurang sesuai harapan. Abstraksi akar permasalahan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan antara lain disebabkan oleh : belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, serta belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar sebagaimana tercermin pada sejumlah indikator antara lain :

a. Rendahnya indeks pendidikan (0,55);
b. Angka putus SMP yang trendnya naik (0,18%), dan angka melanjutkan ke SMP yang belum optimum (98,37%);
c. APK dan APM SMP yang baru mencapai kisaran 87%;
d. APK PAUD yang masih rendah (38,54%);
e. Persentase SD dan SMP terakreditasi A yang kurang dari 10%;

f. Persentase guru bersertifikasi yang masih relatif rendah;
g. Rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,40 tahun;
h. APS SD dan SMP yang masih berada pada kisaran 90%; dan lain-lain.

Pada dimensi kesehatan, akar masalah pembangunan manusia diidentifikasi disebabkan oleh belum optimalnya cakupan layanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang masih relatif terbatas, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada sebagian kalangan masyarakat yang masih memprihatinkan, belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis terhadap satuan jumlah penduduk tertentu, belum optimalnya implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; serta belum optimalnya cakupan layanan Keluarga Berencana.

Secara makro permasalahan di bidang kesehatan ini tercermin pada Usia Harapan Hidup (UHH) yang baru mencapai sekitar 67,21 tahun, angka kematian bayi yang masih berkisar 14,4 per 1000 kelahiran hidup; angka kematian ibu yang masih berkisar 164 per 100 ribu kelahiran hidup; penurunan prevalensi balita gizi buruk yang pada tahun 2020 masih mencapai 0,88%, serta prevalensi stunting sebesar 9,26%; pertolongan persalinan tenaga medis yang diperkirakan baru berkisar 72,60%; desa *Open Defecation Free* (ODF) yang baru 22,90%; persentase keluarga sehat yang baru mencapai 18,70%; tantangan meningkatkan cakupan imunisasi dasar, cakupan pemberantasan penyakit menular, cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan kesehatan balita, dan lain-lain.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan di atas. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, penyediaan dan pembinaan SDM kesehatan dan peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat guna menekan angka kesakitan sebagai akibat dari faktor perilaku dan lingkungan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pendidikan usia dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, TBC serta pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif untuk pencapaian target SPM pelayanan dasar kepada masyarakat.

Di samping dimensi pendidikan dan kesehatan, terdapat pula dimensi lain yang terkait dengan pembangunan manusia, yang diidentifikasi dari sejumlah urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan isu pembangunan manusia antara lain: belum optimalnya cakupan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tercermin dari masih terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang trend-nya meningkat di era pandemi; belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga, fasilitasi yang masih terbatas,

kemandirian dan kemampuan hidup pemuda yang masih relatif rendah, serta prestasi pemuda di bidang seni budaya, olahraga, kewirausahaan, dan lain-lain yang masih belum dapat bersaing dengan daerah lain; belum optimalnya penanganan masalah-masalah sosial, yang tercermin dari sejumlah indikator antara lain: terbatasnya sarana rehabilitasi dan perlindungan sosial; cakupan pelayanan PMKS yang masih terbatas; cakupan pelayanan disabilitas dan Lanjut Usia yang masih terbatas; terbatasnya potensi sumber kesejahteraan sosial; dan lain-lain.

Isu pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan masalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, yang secara makro perlu diarahkan pada agenda menurunkan persentase penduduk miskin melalui upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sehingga memiliki ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial sehingga terhindar dari kerentanan sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian nasional maupun daerah.

Kemiskinan masih menjadi tema utama yang harus mendapatkan prioritas untuk dientaskan mengingat masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berdasarkan data BPS (2020) mencapai 107.930 jiwa atau sekitar 9,24% dari total populasi Kabupaten Lebak pada tahun 2020, dan tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 8,30%. Sebaran penduduk miskin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak yang cenderung bersifat mengelompok (*cluster*) secara spasial perlu dijawab dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan kelompok maupun kewilayahan. Di samping itu, perlu juga secara sistematis memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Lebak, yaitu: faktor jarak, pasangan usia subur, kedekatan dengan konsentrasi penduduk, jumlah petani, jarak terhadap sarana pendidikan, kedekatan dengan konsentrasi jarak pasar, kedekatan dengan konsentrasi jumlah industri, kedekatan dengan konsentrasi wilayah luas, serta faktor topografi. Kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan berbasis pertanian perlu diatasi dengan melakukan optimalisasi potensi sektor pertanian serta pemberdayaan masyarakat setempat sehingga berdampak luas dan berjangka panjang. Kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan dan potensi alam/lingkungannya perlu terus dipertahankan dan dibudayakan agar masyarakat tidak “jatuh” dalam kemiskinan sebagai dampak dari transformasi ekonomi maupun kebijakan ekonomi yang berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan dimensi pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan desa yang diakui eksistensinya dengan asas rekognisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk didalamnya adalah pengakuan atas eksistensi masyarakat adat yang diakui hak-haknya sebagai entitas politik yang memiliki sistem sosial, hukum, pemerintahan, dan juga wilayah adat. Pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan pendekatan yang efektif dalam mengatasi beragam permasalahan sosial, khususnya

yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta beragam permasalahan sosial yang muncul sebagai ekses pembangunan.

2. Pemulihan Ekonomi

Tema sentral RPJMN Tahun 2020-2024 adalah agenda pemulihan perekonomian nasional, demikian pula dengan agenda yang diusung oleh seluruh daerah di Indonesia pasca mengalami penetrasi dahsyat pandemi Covid-19 yang hampir-hampir menyebabkan resesi ekonomi global. Secara nasional pertumbuhan ekonomi terpenetrasi sangat dalam hingga minus 1,29 persen pada tahun 2020. Karenanya fokus pemulihan ekonomi masih akan menjadi agenda utama hingga berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lebak pada tahun 2024.

Permasalahan utama perekonomian daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat dari permasalahan 3 aspek utama yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi secara inklusif belum optimal dan tidak berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata – rata mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif, namun pertumbuhan ini tidak diikuti oleh Tingkat Pengangguran dan Angka Kemiskinan yang angkanya masih relative tinggi.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas di atas sejatinya dapat disebabkan oleh beberapa akar masalah yang muncul, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Belum berkembangnya sektor industri, terutama industri yang mampu menyerap secara optimal tenaga kerja lokal serta mendayagunakan sumber daya dan komoditi lokal lainnya sehingga memiliki faktor pengaruh yang tinggi dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah;
2) Rendahnya mutu dan daya saing tenaga kerja setempat dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal maupun regional;
3) Rendahnya tingkat efisiensi produksi UMKM, terbatasnya akses permodalan ke perbankan, serta terbatasnya pemasaran karena lambatnya transformasi digital di kalangan UMKM;
4) Lembaga keuangan dan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan UMKM belum berperan optimal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha UMKM maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat;
5) Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan, pengendalian stabilitas harga dan distribusi pasokan barang, yang disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur sarana perhubungan, pengelolaan dan penataan pasar, serta pembinaan pedagang maupun PKL;
6) Belum tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, sehingga ketergantungan pada ketersediaan lowongan kerja di sektor formal menjadi sangat tinggi;

7) Masih rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nelayan, disebabkan oleh belum optimalnya jumlah dan daya saing produksi, pembinaan terhadap petani dan nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
8) Kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9) Rendahnya daya saing produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi produk unggulan daerah, sehingga kapasitas produksi maupun omzetnya kurang berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat.

b. Belum optimalnya pemanfaatan pangan sebagai sumberdaya lokal untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Lebak

Apabila kita melihat indeks ketahanan pangan yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan bahwa Kabupaten Lebak termasuk dalam status tahan pangan namun berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan pangan yang dilakukan tahun 2019 masih terdapat 66 Desa yang masuk kategori rentan pangan, sehingga masih ditemukan beberapa kasus gizi buruk dan Stunting di beberapa wilayah Kabupaten Lebak.

c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Lebak.

Dalam konteks ekonomi pengembangan pariwisata secara makro berkaitan erat dengan agenda pemulihan ekonomi. Sejalan dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, serta pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi berupa Pembangunan akses jalan tol Serang-Panimbang yang melalui wilayah Kabupaten Lebak dan Pembangunan rel kereta api jalur ganda, serta operasionalisasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Rangkasbitung membuka peluang bagi Kabupaten Lebak untuk mengembangkan potensi pariwisata yang sangat besar seperti *Geopark Bayah Dome.* Selain itu juga secara faktual Kabupaten Lebak telah memiliki *event* wisata berskala nasional yaitu ritual “Seba Baduy” yang sejak tahun 2015 telah masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional, dan pada tahun 2020 memperoleh Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai Festival Pariwisata terpopuler Ke-2 se-Indonesia.

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lebak diyakini dapat menjadi sebuah terobosan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat pengembangan sektor pariwisata akan mampu mengintegrasikan beragam sektor secara optimal baik primer, sekunder, hingga tersier dalam melayani kebutuhan wisatawan.

Tantangan kedepan adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Lebak dalam merespon dan memanfaatkan kebijakan Pemerintah Pusat

untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada upaya pemulihan ekonomi daerah. Namun beberapa permasalahan masih ditemukan dalam pengembangan sektor pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan pariwisata belum secara optimal memperhatikan aspek lingkungan hidup;
2) Daya dukung regulasi sektor pariwisata belum memadai;
3) Kualitas Sumberdaya Manusia sektor Pariwisata belum optimal sehingga sulit beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi;
4) Pemanfaatan Tekhnologi digital dan media konvensional masih belum optimal dalam melakukan publikasi pariwisata;
5) Kondisi Infrastruktur penunjang dan pendukung atraksi wisata (jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi) belum optimal;
6) Investasi sektor pariwisata masih relative rendah.

3. Pembangunan Kewilayahan: Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan

Permasalahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Lebak masih akan menghadapi tantangan yang besar mengingat kondisi objektif terbatasnya kapasitas fiskal daerah, dengan rasio PAD yang terkategori kurang (<20% pendapatan daerah), menggambarkan kapasitas keuangan daerah yang sebagian besar masih sangat bergantung pada dana transfer. Meski demikian, kreativitas dan inovasi pemerintah daerah yang disertai dengan identifikasi prioritas masalah yang cermat serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah dengan citra infrastruktur yang semakin baik pada dua dekade terakhir, terutama pada kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan persentase keadaan mantap mencapai 68,06%. Selain itu pengendalian terhadap arus dana desa yang efektif juga berhasil mendorong perbaikan infrastruktur wilayah di perdesaan.

Di samping itu, terdapat pula jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun Nasional dengan panjang masing-masing mencapai 176,39 km dan 146,59 km, di mana kondisi ruas-ruas jalan tersebut sangat tergantung pada perhatian dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan mutlak perlu ditingkatkan guna menjamin terpeliharanya jaringan jalan provinsi dan Nasional di wilayah Kabupaten Lebak.

Percepatan penyediaan prasarana telekomunikasi juga sangat penting guna mendukung percepatan transformasi digital yang mutlak diperlukan ditengah situasi pandemi. Masih adanya sekitar 52 *blankspot area* di wilayah Kabupaten Lebak, menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai moda pengantarnya.

Termasuk dalam mendukung pelayanan publik yang berbasis aplikasi TIK. Demikian pula dengan kondisi obyektif masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi di dunia maya, dimana baru sekitar 49,01 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telpon seluler; hanya 5,27 persen penduduk usia dimaksud yang menggunakan komputer, yang berasal dari sekitar 5,29 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas komputer dan/ laptop di rumahnya; dan baru sekitar 28,72 persen penduduk yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2019). Dengan keterbatasan ini, dapat dipahami implikasinya terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk mendukung kegiatan diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dan bidang lainnya masih mengalami kendala.

Dalam konteks penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, harus menjadi prioritas mengingat nilai indeks kinerja jaringan irigasi pada tahun 2020 baru mencapai 71,73% di mana jumlah Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik hanya sebanyak 71 DI dari 463 DI atau sebesar 15,33%. Dengan demikian, perhatian terhadap jaringan irigasi ini masih perlu diprioritaskan, apalagi mengingat peran Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan padi di Provinsi Banten. Demikian pula dengan pentingnya pemeliharaan sekitar 66 situ dan embung yang berfungsi sebagai tandon air maupun irigasi. Urgensi infrastruktur pertanian ini bahkan ke depan menjadi sangat strategis nilainya mengingat peran Kabupaten Lebak yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan regional. Penyediaan sarana dan prasarana air minum di Kabupaten Lebak juga masih harus mendapatkan perhatian mengingat cakupan layanannya yang baru mencapai 68,02%. Demikian pula dengan akses air limbah yang baru mencapai sekitar 71,37%.

Mulai bertransformasinya perekonomian daerah pada sektor tersier dan sekunder, dengan bertumpu pada sektor perdagangan besar dan eceran serta perbengkelan di sejumlah kawasan perkotaan dan titik-titik pertumbuhan disekitar 12 pasar utama di Kabupaten Lebak, telah menjadi sebab terhadap meningkatnya volume sampah yang jauh melebihi kapasitas pemerintah untuk mengelolanya. Demikian pula dengan tumbuhnya sejumlah kompleks pertokoan dan perdagangan, serta sejumlah kawasan permukiman yang banyak diminati investor lokal dan dalam negeri lainnya, yang menjadi sebab terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertokoan dan perumahan yang banyak tumbuh disejumlah kecamatan terutama di Kecamatan Maja dan sekitarnya; meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman, meningkatnya volume sampah domestik, dan lainlain. Tidak hanya itu, dengan hadirnya tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak area tengah akan memicu tumbuhnya Kawasan industri hingga area komersil lainnya

bahkan juga permukiman baru sebagai penunjang aktivitas ekonomi, tentunya berpotensi menciptakan timbulan sampah industri dan ancaman pencemaran limbah B3 bila tidak dikelola secara maksimal.

Keseluruhan permasalahan di atas berimplikasi pada sejumlah hal yang menggambarkan belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah, pengendalian lingkungan hidup, serta penataan ruang sebagaimana dimaksud, antara lain :

a. Meningkatnya kebutuhan akan jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna menunjang mobilitas orang dan barang, serta perekonomian daerah sebagai upaya peningkatan aksesibilitas;
b. Meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan yang memadai, seperti : Penerangan Jalan Umum (PJU), halte di kawasan perkotaan, rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, pengelolaan perparkiran, serta pengelolaan terminal angkutan orang maupun barang;
c. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengendalian munculnya kawasan kumuh perkotaan dan non-perkotaan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga, penyediaan rumah layak huni, dan lain-lain;
d. Meningkatnya kebutuhan untuk melakukan transformasi digital melalui pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan jenis pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan implementasi SPBE di Kabupaten Lebak;
e. Meningkatnya kebutuhan akan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengendalian laju alih fungsi lahan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penangkapan ikan berlebihan, deforestasi dan penebangan ilegal, dan lain-lain.

Terkait dengan permasalahan pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup, di masa depan Kabupaten Lebak akan dihadapkan pada dilema pengendalian pemanfaatan ruang yang kian kompleks, dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kebutuhan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini telah banyak dialami oleh berbagai daerah di Indonesia, sehingga belajar dari pengalaman tersebut tampaknya menjadi keniscayaan guna mengantisipasi masalah laten yang sama di masa depan.

Pengendalian pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup tidak hanya berdimensi konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang, namun juga berdimensi moral spiritual dalam rangka menjaga dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat setempat. Konservasi lingkungan hidup dan SDA di sekitar dan atau di wilayah yang menjadi kawasan adat seperti masyarakat adat Kanekes dan masyarakat hukum adat kasepuhan adalah sebuah keniscayaan mengingat kekhasan adat masyarakatnya yang inheren dengan bumi yang menjadi wilayah

tempat tinggalnya. Karenanya proteksi terhadap kawasan adat dimaksud penting untuk menjadi kebijakan yang tidak hanya berdimensi jangka menengah, namun juga jangka panjang.

Pembangunan kewilayahan juga harus memperhatikan aspek kebencanaan mengingat bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, Kabupaten Lebak memiliki sejumlah wilayah yang terkategori rawan bencana alam seperti kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan likeufaksi, dan kawasan rawan tsunami. Dengan potensi kerawanan yang terbilang tinggi, berikut ini 5 (lima) jenis potensi bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Lebak, antara lain:

1) Gempa bumi, yang secara potensial terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, di mana seluas 107.135,70 ha sebagai kategori rendah, 120.682,70 ha sebagai kategori sedang, dan sebesar 103.332,02 ha masuk dalam kategori tinggi.
2) Tanah longsor, yang potensial terjadi di bagian tengah khususnya bermorfologi perbukitan/pegunungan dengan luas wilayah terdampak mencapai 62.261,60 ha atau 18,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lebak. Adapun kawasan rawan bencana longsor ini tersebar pada beberapa kecamatan meliputi Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Lebakgedong, Leuwidamar, Muncang, Panggarangan, Sajira, dan Sobang, dengan rincian luasan yang masuk dalam kategori sedang seluas 46.087,97 ha dan kategori tinggi seluas 16.173,63 ha.
3) Likeufaksi, yang potensial terjadi pada sejumlah wilayah di bagian selatan dan utara dengan luas wilayah terdampak mencapai 16.575,54 ha atau 5,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lebak. Adapun kecamatan yang memiliki wilayah rawan bencana likeufaksi yaitu Banjarsari, Cibadak, Cihara, Kalanganyar, Curugbitung, Maja, Malingping, Panggarangan, Rangkasbitung, Sajira, dan Wanasalam, dengan rincian luasan yang masuk dalam kategori sedang sebesar 16.040,73 ha dan kategori tinggi seluas 534,81 ha.
4) Tsunami, yang potensial terjadi di sepanjang pesisir Selatan Samudera Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai 12.180,28 ha atau 3,68 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lebak. Adapun kecamatan yang memiliki wilayah potensi bencana tsunami antara lain Bayah, Cihara, Cilograng, Malingping, Panggarangan, dan Wanasalam.
5) Banjir, yang potensial terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, terutama wilayah di bagian barat daya dan utara Kabupaten Lebak dengan luas wilayah terdampak mencapai 130.059,87 ha atau 39,28 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lebak, dengan rincian luasan yang masuk dalam kategori sedang sebesar 69.124,32 ha dan kategori tinggi seluas 60.935,55 ha.

Karenanya tantangan terbesar mengenai potensi rawan bencana di Kabupaten Lebak ialah pentingnya desain kebijakan dan program yang

efektif guna mengantisipasi ragam bencana tersebut, antara lain melalui: penguatan kelembagaan penanganan bencana daerah, peningkatan kesiapsiagaan elemen-elemen penanganan bencana daerah, peningkatan pengetahuan kebencanaan dikalangan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur penunjang mitigasi bencana, dan lain-lain.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih akan menjadi isu sentral, meski fokus utamanya akan berpindah pada tema berbeda seiring dengan kemajuan yang telah dicapai. RPJMN Tahun 2020-2024 misalnya memusatkan fokusnya pada tema deregulasi yang berkaitan dengan upaya simplifikasi dan sinkronisasi antar aturan perundang-undangan sehingga mencegah dan mengatasi kompleksitas peraturan perundang-undangan yang menjadi kausa atas sejumlah tumpang tindih antar aturan, serta menjadi sebab atas rendahnya kepastian hukum; serta tema debirokratisasi yang berkaitan dengan kebijakan pemangkasan jabatanstruktural eselon III dan IV dan agenda fungsionalisasi aparatur sipil negara (ASN), serta efisiensi struktur birokrasi guna mewujudkan struktur birokrasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses penyelenggaraannya. Dengan demikian maka struktur birokrasi akan menjadi miskin struktur namun kaya fungsi, struktur organisasi yang lebih bertipe *holacracy* ketimbang *bureaucracy* ala Weber yang panjang karena spesialisasi dan hierarkis.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; menjadi penanda reformasi pada fungsi pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah agar di samping menjadi lebih akuntabel dan bebas korupsi, juga diharapkan lebih mampu meningkatkan hasil dan dampaknya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan menjadi isu sentral guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana trend era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Karenanya agenda transformasi digital perlu direncanakan dan dimplementasikan secara terukur agar implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Agenda ini menjadi sangat urgen di tengah situasi pandemi yang mengharuskan adanya kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan,

sehingga *platform* pelayanan publik berbasis aplikasi dan sejenisnya menjadi solusi efektif untuk memutus matarantai persebaran Covid-19. Implementasi SPBE juga diyakini akan mampu mencegah terjadinya deviasi sejak di hulu proses pengambilan keputusan, sehingga dapat berkontribusi bagi upaya meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Internal di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan deskripsi atas permasalahan umum di atas, secara khusus permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Struktur birokrasi pemerintah daerah yang belum mencerminkan birokrasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan yang urgen untuk dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi atas sumber daya daerah yang terbatas dan terus terkoreksi karena dampak pandemi, di samping menjadi bagian dari komitmen daerah untuk ikut mensukseskan agenda dan kebijakan nasional;
b. Belum optimalnya implementasi manajemen SDM aparatur, khususnya dalam implementasi fungsionalisasi aparatur sipil negara sebagaimana tercermin dari persentase tenaga struktural dan administasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga fungsional, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu (khusus);
c. Meski sudah terkategori baik, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai standar Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perlu dioptimalkan dengan membangun *blueprint* transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lebak secara terpadu dan menyeluruh;
d. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif melalui perkuatan sistem inovasi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
e. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah masih belum merata;
f. Perlunya optimalisasi integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian serta pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan aplikasi SIPD dan/ aplikasi sejenis lainnya;
g. Tantangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta upaya meningkatkan nilai guna dari pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
h. Tantangan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam paradigma baru sebagai sistem penjaminan mutu dan konsultasi guna mengefektifkan pencegahan maupun penindakan terhadap setiap

bentuk deviasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

i. Tantangan meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengatasi gangguan ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
j. Tantangan mewujudkan standar pelayanan publik yang optimal serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebak;
k. Tantangan mewujudkan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan maupun ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Kabupaten Lebak juga dihadapkan pada tantangan mewujudkan stabilitas politik dan keamanan daerah, sehingga upaya terstruktur dan sistematis dalam menjaga kohesifitas sosial guna menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat berdampak luas pada terusiknya kondusifitas dan stabilitas ekonomi, sosial dan politik daerah harus menjadi agenda prioritas di daerah. Demikian pula dengan kemitraan yang sehat antarpemangku kepentingan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu terus dibina sebagai upaya kanalisasi beragam dinamika, kepentingan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyrakat. Di samping itu, peran dan potensi pondok pesantren yang mencapai lebih dari 500 pesantren perlu terus dibina sebagai basis pencegahan radikalisme yang akhir-akhir ini masih menjadi ancaman secara nasional. Pesantren bahkan harus didayagunakan sebagai modal sosial dalam menciptakan kehidupan yang relijius di tengah masyarakat, serta agen penggerak pembangunan daerah.

Penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya penegakan hukum atas peraturan daerah, juga harus menjadi agenda prioritas guna menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, serta melakukan edukasi sosial dalam rangka menciptakan ketertiban umum, khususnya dalam konteks upaya memastikan terwujudnya adaptasi kebiasaan baru di kalangan masyarakat. Dengan demikian maka pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya secara berwibawa karena legitimasi masyarakat yang kuat. Dan dengan kewibawaan inilah maka pemerintah daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan paparan deskriptif permasalahan pembangunan daerah di atas, secara abstraktif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.15
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH
1	Belum optimalnya Pembangunan Manusia	1. Terbatasnya aksesibilitas dan mutu pendidikan usia dini, serta pendidikan dasar dan menengah pertama 2. Terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan 3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 5. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga 6. Belum optimalnya peningkatan literasi masyarakat 7. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja 8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan 9. Belum optimalnya pembinaan, pelestarian, dan komodifikasi seni-budaya, dan kearifan lokal
2	Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah yang masih terbatas	1. Penyediaan kesempatan kerja dan berusaha yang belum optimal 2. Produktifitas sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan yang masih terbatas 3. Pengembangan potensi pariwisata yang masih terkendala banyak faktor 4. Pengembangan investasi pada industri pengolahan komoditi pertanian yang masih terbatas 5. Pembinaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas 6. Peningkatan iklim investasi yang masih terkendala banyak faktor 7. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan
3	Pembangunan kewilayahan yang belum optimal	1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbatas 2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, DAS, situ, danau, dll yang masih terbatas 3. Pembangunan kawasan permukiman dan penyediaan rumah layak huni yang masih terbatas 4. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 6. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kapasitas dalam konservasi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran 7. Terbatasnya kapasitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan 8. Belum efektifnya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana
4	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, khususnya pelaksanaan debirokrasi dan fungsionalisasi ASN 2. Manajemen pendapatan daerah yang belum efektif dan efisien 3. Manajemen keuangan dan aset daerah yang belum optimal 4. Kualitas pengelolaan data, arsip, dan informasi publik yang belum memadai 5. Tantangan meningkatkan profesionalitas manajemen SDM Aparatur serta Pendidikan Pelatihan Aparatur dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah 6. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal 7. Pemenuhan standar pelayanan publik yang belum memadai, serta belum memuaskan publik secara optimal 8. Tata kelola pemerintahan desa yang belum optimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH
		9. Efektifitas sistem pengawasan internal yang masih harus ditingkatkan 10. Efektifitas penegakan peraturan daerah yang masih belum sesuai harapan 11. Pemeliharaan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial yang masih harus ditingkatkan efektifitasnya 12. Tantangan pemeliharaan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial yang makin kompleks 13. Kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor privat dan masyarakat sipil yang masih sangat terbatas dalam pembangunan daerah 14. Tantangan mengoptimalkan peran Kelitbangan dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

Selanjutnya masalah pokok dan masalah sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas dapat dijabarkan dalam sejumlah akar permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
1	Pendidikan	1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan kesetaraan 3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan 4. Terbatasnya kuantitas tenaga pendidik yang bersertifikasi 5. Belum optimalnya metode pembelajaran alternatif (pembelajaran jarak jauh, dsb) dalam mengantisipasi pandemi Covid-19
2	Kesehatan	1. Belum optimalnya cakupan layanan kesehatan 2. Sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang masih relatif terbatas 3. Masih rendahnya kelangsungan hidup bayi 4. Masih rendahnya Usia Harapan Hidup 5. Belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis terhadap satuan jumlah penduduk tertentu 6. Belum optimalnya implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 7. Belum optimalnya cakupan layanan KIA dan Keluarga Berencana. 8. Belum optimalnya perilaku masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan 9. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemi
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Program-program pemberdayaan perempuan yang belum terkelola secara sistematis dan terpadu 2. Belum optimalnya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan 3. Belum optimalnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan 4. Masih terbatasnya fasilitas pendukung Kota Layak Anak 5. Belum optimalnya peran serta masyarakat terutama perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		6. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
4	Sosial	1. Rendahnya cakupan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Belum tersedianya secara memadai sarana, prasarana, dan sumber daya lain dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial 3. Rendahnya validitas dan reliabilitas data PMKS, dan penerima program Bantuan Sosial, dan program lainnya 4. Terbatasnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 5. Belum optimalnya dukungan dan kerjasama antar pihak dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial 6. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB 2. Terbatasnya jumlah dan fungsi petugas lapangan KB (PLKB) 3. Belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pasangan usia subur 4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
6	Kepemudaan dan Olahraga	1. Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan pembinaan kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan 2. Terbatasnya sarana, prasarana, dan SDM pelatih berkualitas dalam pembinaan presstasi olahraga 3. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan pemudan dan kepramukaan 4. Terbatasnya kapasitas pembinaan dan penghargaan terhadap atlit berprestasi 5. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
7	Kebudayaan	1. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB) 2. Terbatasnya kapasitas pembinaan terhadap masyarakat adat 3. Terbatasnya kapasitas pelestarian kekayaan seni-budaya daerah 4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemi
8	Perpustakaan	1. Terbatasnya jumlah perpustakaan dan/ taman baca di desa 2. Rendahnya literasi masyarakat 3. Terbatasnya kapasitas layanan perpustakaan 4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif selama pandemi
9	Kearsipan	1. Terbatasnya kapasitas layanan kearsipan 2. Kurangnya sarana prasarana, dan sumberdaya pendukung sistem kearsipan yang sesuai standar 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kearsipan
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah yang belum memadai 2. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan jaringan irigasi, DAS, situ, danau, dan embung 3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
11	Perumahan Rakyat dan Permukiman	1. Ketersediaan dan kondisi PSU Perumahan dan Permukiman yang belum memadai

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		2. Terbatasnya kapasitas dalam penyediaan dan/ fasilitasi pembangunan rumah layak huni 3. Terbatasnya partisipasi sektor swasta dalam penyediaan PSU, dan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat
12	Pertanahan	1. Belum terkelolanya data pertanahan secara sistematis dan terpadu 2. Belum optimalnya sertifikasi lahan-lahan milik Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur dan pengelolaan lahan kritis
13	Perhubungan	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi 2. Belum optimalnya pengawasan serta pengendalian lalu lintas 3. Terbatasnya interkoneksi antarmoda transportasi 4. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu keselamatan jalan 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
14	Lingkungan Hidup	1. Terbatasnya kapasitas layanan dan pengelolaan persampahan 2. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai 3. Terbatasnya kapasitas dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pelaksanaan AMDAL 5. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Komunikasi dan Informasi	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola SPBE 3. Terbatasnya cakupan layanan fasilitasi pelayanan publik berbasis elektronik bagi OPD
16	Industri	1. Terbatasnya cakupan layanan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) 2. Rendahnya produktifitas, mutu, dan daya saing produk IKM
17	Perdagangan	1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan perdagangan 2. Belum optimalnya pengelolaan pasar dan 3. Belum optimalnya pengawasan dan penanganan pelanggaran perdagangan
18	Koperasi dan UMKM	1. Terbatasnya cakupan layanan pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi 2. Belum optimalnya pembinaan UMK dan Koperasi 3. Belum memadainya dukungan dan kerjasama usaha menengah dan besar terhadap UMK
19	Pertanian	1. Terbatasnya cakupan layanan urusan pertanian 2. Terbatasnya sarana prasarana, dan SDM penyuluh pertanian 3. Terbatasnya kapasitas pengawasan, pengendalian, kekarantinaan pada urusan pertanian
20	Kelautan dan Perikanan	1. Terbatasnya cakupan layanan urusan kelautan dan perikanan 2. Terbatasnya sarana prasarana, dan SDM kelautan dan perikanan 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan nelayan 4. Terbatasnya kapasitas pengawasan, pengendalian, dan kekarantinaan pada urusan kelautan dan perikanan
21	Penanaman Modal	1. Kapasitas pelayanan penanaman modal yang belum memadai 2. Belum optimalnya pelayanan perijinan 3. Belum efektifnya promosi penanaman modal 4. Rendahnya daya saing dan daya tarik investasi
22	Tenaga Kerja	1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan ketenagakerjaan

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		2. Sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung urusan ketenagakerjaan yang belum memadai 3. Belum optimalnya penangananan perselisihan hubungan industrial
23	Pariwisata	1. Belum memadainya infrastruktur pendukung industri pariwisata 2. Rendahnya daya tarik dan daya saing obyek / destinasi wisata 3. Belum berkembangnya usaha jasa dan industri pariwisata 4. Rendahnya investasi dan efektifitas promosi 5. Belum suportifnya perilaku dan kesadaran masyarakat 6. Belum optimalnya "DNA" pariwisata dalam program/kegiatan perangkat daerah pendukung
24	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat Desa 3. Terbatasnya kapasitas manajerial aparatur pemerintahan desa 4. Belum optimalnya pengelolaan dana desa
25	Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan Tramtib dan Linmas 2. Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat 3. Belum optimalnya kemitraan masyarakat 4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penegakan Perda
26	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Terbatasnya cakupan dan kapasitas layanan admindukcapil 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan 3. Belum optimalnya pelayanan PATEN di bidang Admindukcapil
27	Ketahanan Pangan	1. Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang belum memadai 2. Belum optimalnya kampanye diversifikasi bahan pangan utama 3. Rendahnya kemandirian pangan keluarga melalui produksi bahan pangan secara mandiri dengan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif; 4. Belum efektifnya edukasi bahan pangan dan pengolahan pangan yang sehat dan aman; 5. Belum optimalnya pengentasan seluruh desa yang terkategori rawan pangan
28	Statistik dan Persandian	1. Belum memadainya ketersediaan data statistik sektoral dalam mendukung proses perencanaan pembangunan yang berkualitas 2. Kecepatan penyediaan data serta sinkronisasi data antarperangkat darah masih menjadi kendala 3. Belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan persandian; 4. Belum optimalnya perlindungan informasi yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi, serta memiliki kepastian hukum yang tinggi.
29	Transmigrasi	1. Minat bertransmigrasi yang relatif rendah 2. Rendahnya keterpaduan pengelolaan ketransmigrasian antarpemerintah pusat dan daerah 3. Rendahnya efektivitas kerjasama antardaerah pengirim dan penempatan 4. Rendahnya jaminan biaya hidup dan dukungan penghidupan bagi transmigran pada masa transisi
30	Keuangan	1. Belum terindentifikasinya / terpetakannya potensi obyek pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh 2. Rendahnya kapasitas intensifikasi pajak dan retribusi daerah 3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan / pemungutan pajak dan retirbusi

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		4. Terbatasnya kerjasama antarstakeholders dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi
31	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Terbatasnya ASN yang mengikuti diklat struktural 2. Belum optimalnya manajemen SDM aparatur, baik dalam penentuan formasi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, promosi, mutasi, hingga terminasi 3. Belum optimalnya kompetensi ASN dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 4. Belum terindentifikasi / terpetakannya kebutuhan Diklat fungsional yang dibutuhkan masing-masing perangkat daerah 5. Belum memadainya kapasitas penyelenggara Diklat aparatur dalam memenuhi kebutuhan
32	Pengawasan	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi auditor 2. Terbatasnya kapasitas sistem pengawasan internal 3. Rendahnya partisipasi publik dalam pencegahan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
33	Perencanaan	1. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan antarperangkat daerah 2. Belum memadainya kapasitas perencana dalam mengoperasionalisasi secara terukur visi dan misi kepala daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektifitas perencanaan
34	Penelitian dan Pengembangan	1. Belum terpadunya pelaksanaan kelitbangan antarperangkat daerah; 2. Terbatasnya kapasitas kelitbangan dan sistem inovasi daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 4. Terbatasnya kolaborasi antarkelembagaan kelitbangan

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan sebuah rangkaian filosofi atau tujuan yang ditetapkan suatu organisasi sebagai arah tujuan kemana organisasi akan dibawa. Setiap kepala daerah terpilih pastilah mempunyai sebuah Visi dan Misi yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah untuk mencapai kesuksesannya. Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan lebih terperinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Dalam RPJMD Kabupaten Lebak telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

Sebagaimana telah dipahami secara luas, visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 adalah "***Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal***" yang juga merupakan visi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menjadi kontrak politik dengan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2019. Visi ini masih dan tetap relevan dengan RPJPD yang pada tahapan akhir periode efektifnya berfokus pada tema "*Pertumbuhan berkesinambungan dan*

kemandirian ekonomi". Visi kepariwisataan justru sangat relevan dengan tema pertumbuhan yang berkesinambungan dan kemandirian ekonomi karena diyakini memiliki daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah di masa depan. Karenanya visi ini dapat dipandang sebagai terobosan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Dengan demikian maka upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; yang ditopang oleh kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah yang semakin besar melalui tumbuhnya wirausaha baru sebagaimana menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai RPJPD pada tahapan keempatnya akan menjadi semakin realistis untuk diwujudkan.

Terdapat dua frasa kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi mewujudkan "*Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal*", yaitu: "*destinasi wisata unggulan nasional*", dan "*berbasis potensi lokal*". Destinasi wisata unggulan nasional, menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak yang memiliki daerah tujuan wisata dan/ atau obyek wisata berskala nasional, atau memiliki *event* wisata yang tercantum dalam kalender pariwisata nasional. Sedangkan frasa "*berbasis potensi lokal*" merupakan penegasan komitmen keberpihakan terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal inilah yang akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor pemimpin-nya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pembangunan manusia;
b. Mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah;
c. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
d. Memelihara kualitas lingkungan hidup; dan
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi pertama, mengoptimalkan pembangunan manusia, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Formulasi misi pertama ini memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dari rumusan sebelumnya, yang diformulasi dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan

daerah sebagaimana dirumuskan pada poin (1) permasalahan pembangunan daerah tentang pembangunan manusia, serta isu strategis ke-10 tentang pencapaian target SDGs. Misi ini bertujuan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lebak, sehingga ruang lingkup misi ini mencakup beberapa urusan, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan misi ini diharapkan dapat diwujudkan kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif dan berkarakter yang didukung dengan moralitas yang berbasis nilai-nilai agama yang kokoh.

Misi kedua, mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. Misi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan daerah sebagaimana dituangkan pada poin (2) tentang pembangunan ekonomi, serta rumusan isu strategis ke-2 tentang Potensi Pariwisata Daerah; isu ke-3 tentang Dampak Ekonomi Proyek Strategis Nasional; isu ke-4 tentang Potensi Lebak sebagai daerah konservasi dan penyangga ketahanan pangan regional; isu ke-8 tentang Program Ekonomi Nasional; dan isu ke-12 tentang Potensi resesi ekonomi dunia sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang potensial berdampak pada kapasitas ekspor, nilai tukar Rupiah. Misi ini bertujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh melalui pencapaian sasaran strategis pada 10 (sepuluh) urusan, yaitu: urusan pariwisata, penanaman modal, ketahanan pangan; pertanian, perkebunan dan peternakan; perikanan dan kelautan; ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian; serta koperasi dan UMKM. Dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor pemimpin pembangunan ekonomi, diyakini akan mengubah wajah perekonomian daerah dalam jangka panjang sehingga Kabupaten Lebak tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku yang dihasilkan dari sector pertanian, perikanan, perkebunan; namun juga semakin berkembang beragam jenis aktifitas ekonomi dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakan usaha/industri kecil dan menengah serta meningkatnya keberdayaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Misi ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah, diformulasi dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah, khususnya pada poin (3) tentang pembangunan kewilayahan (Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan), serta isu strategis ke-1 tentang Karakteristik Geografis Kabupaten Lebak; isu ke-9 tentang Pelaksanaan proyek/agenda strategis nasional di daerah; dan isu ke-13 tentang Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0. Karenanya ruang lingkup misi ini mencakup 8 (delapan) urusan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu: urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; penanaman modal termasuk didalamnya adalah pelayanan terpadu satu pintu; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu kebencanaan; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan perhubungan; urusan komunikasi dan informatika; serta urusan energi dan sumber daya mineral, khususnya yang terkait dengan masalah elektrifikasi.

Misi keempat, memelihara kualitas lingkungan hidup, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dipromosikan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan, khususnya pada poin (3) tentang Pembangunan Kewilayahan yang mencakup: Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan; serta isu strategis ke-1 tentang Karakteristik Geografis Kabupaten Lebak; isu ke-2 tentang pengembangan potensi pariwisata; isu ke-4 tentang Potensi Lebak sebagai daerah konservasi dan penyangga ketahanan pangan regional; isu ke-5 tentang potensi bencana alam; isu ke-10 tentang Tantangan mewujudkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karenanya cakupan dari misi ini adalah mencapai sejumlah sasaran yang terdapat pada paling tidak 7 (tujuh) urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penataan ruang, kehutanan, pertanahan, kepariwisataan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kelautan dan perikanan dalam konteks konservsi sumber daya kelautan.

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan misi yang bertujuan menjawab sejumlah permasalahan, khususnya yang terkait dengan poin (4) yaitu tentang upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta isu strategis poin ke-6 tentang agenda debirokrasi dan debirokratisasi; isu ke-7 tentang Perubahan orientasi kebijakan nasional yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah; isu ke-10 tentang Tantangan mewujudkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs); serta isu ke-13 tentang Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0 yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penerapan SPBE. Karenanya ruang lingkup dari misi ini beririsan dengan sejumlah bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu: urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik; persandian; kearsipan; serta beragam urusan penunjang yang terkait dengan pelaksanaan beragam urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, seperti: keuangan, aset, perencanaan, dan kepegawaian.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan identifikasi atas 4 (empat) permasalahan dan 13 (tiga belas) isu strategis pembangunan daerah yang dikontekstualisasi dengan visi dan misi kepala daerah, operasionalisasi dalam 5 (lima) tujuan dengan 6 (enam) indikator tujuan, serta 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah dengan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dijabarkan dalam program perangkat daerah yang berjumlah 147 program pada Tahun 2019 dan 2020, dan mengalami perubahan menjadi 125 program untuk Tahun 2021-2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang terbagi kedalam 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, dan 5 unsur pelengkap pemerintahan (Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur, Pengawas, Unsur Kewilayahan, dan Unsusr Pemerintahan Umum). Secara lebih lengkap program pembangunan daerah dimaksud diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				560.601.921.554	
PENDIDIKAN				276.227.234.400	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah	6,4 Tahun	6,52 Tahun	276.227.234.400	Dinas Pendidikan
KESEHATAN				105.394.411.740	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat		0.22 poin	521.977.800	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tingkat capaian SPM		95	95.756.612.150	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	8.887.279.790	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar		100	228.542.000	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				163.242.310.289	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase layanan informasi jasa kontruksi		100 Persen	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		80,72 persen	10.894.852.650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik		66,53%	7.996.593.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan air untuk irigasi		71,43 persen	23.668.773.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungan		3,30 persen	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase jalan dalam kondisi mantap		69,27 persen	100.157.028.864	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase Kesesuaian tata ruang		100 persen	730.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase akses sanitasi (air Limbah)		73,07 persen	8.050.341.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	presentase cakupan air minum		65,60 persen	9.544.720.075	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata		100 persen	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9.913.435.875	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan kumuh di perkotaan		1,47 persen	4.584.324.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten		100 persen	119.058.175	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat		85,37 persen	271.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni		87,13%	4.939.053.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.023.053.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran		100 persen	68.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penegakan Perda		92 Persen	549.639.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan penanganan bencana		100 persen	2.405.414.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SOSIAL				2.801.476.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah		100 persen	264.498.000	DINAS SOSIAL

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyintas korban bencana		100 persen	54.312.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase pelayanan dan penanganan Warga Negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan		100 persen	9.000.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten		100%	10.000.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS		100 persen	325.194.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS		100 persen	2.138.472.250	DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				62.117.815.500	
TENAGA KERJA				214.299.500	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Penyelesaian hubungan industrial		100 persen	37.620.000	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja		40.698.846.37 Rupiah	141.679.500	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		6 persen	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				815.539.200	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100%	100 persen	78.284.800	DP3AP2KB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	100%	46 Persen	102.827.200	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase penanganan kasus kekerasan anak	100%	100%	634.427.200	DP3AP2KB
KETAHANAN PANGAN				3.908.049.900	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani	0	15,15%	288.999.900	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Aman	93,40%	94%	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Gizi Berdasarkan Ketersediaan Pangan		90%	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	83,80 skor	84 Skor	519.050.000	Dinas Ketahanan Pangan
PERTANAHAN				150.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase koordinasi dan sinkronisasi		100 persen	38.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
	perencanaan penggunaan tanah				Permukiman Serta Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian tanah garapan		100 persen	35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente		100 persen	76.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP				10.701.974.650	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui		20	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang terkelola		40,85	7.819.162.250	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan		30	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup ditangani		100	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terkelolanya Keanekaragaman hayati dalam RTH		6,1	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup		7	2.057.898.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100	54.914.400	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat		100	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah		0	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3		0	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.376.509.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk kabupaten lebak yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KIA, KTP-el)		97 Persen	**3.376.509.000**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.122.497.900	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa		21%	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkinerja baik		21%	4.755.302.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase meningkatnya Permberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		7%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melakukan penataan dan pengelolaan desa yang baik		21%	227.195.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.791.818.600	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	mCPR (Modern *Contraceptive Prevalancy Rate*)		72 Persen	14.753.738.600	DP3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga		100 persen	24.770.000	DP3AP2KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (*Total Fertility Rate*)		2,7	13.310.000	DP3AP2KB
PERHUBUNGAN				5.412.581.250	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		1,82%	5.412.581.250	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.084.691.750	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah		100 Persen	1.192.314.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		100 Persen	1.892.377.750	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.218.203.350	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkinerja baik	8,82%	12%	172.299.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Rasio Kewirausahaan		0,01%	200.000.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten	3,88%	5,80%	500.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	2,29%	2,98 persen	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	0,00%	0,00%	245.103.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PENANAMAN MODAL				1.089.992.550	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	86,36 Poin	87 poin	268.570.450	Dinas Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	100 Persen	100%	64.520.000	Dinas Penanaman Modal
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentasi Pertumbuhan Investasi	22,85%	7%	111.863.500	Dinas Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN (satuan:Rp)	3,241 Trilyun	1,225 Trilyun	539.512.200	Dinas Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN (satuan:Rp)		750 Trilyun	105.526.400	Dinas Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				9.750.434.950	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah perolehan medali	10	190 Medali	8.332.416.950	Dinas Kepemudaan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif	60%	60 persen	1.318.018.000	Dinas Kepemudaan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat		100 persen	100.000.000	Dinas Kepemudaan Olahraga
STATISTIK				71.457.200	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah		100 Persen	71.457.200	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
PERSANDIAN				39.615.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		100 Persen	39.615.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KEBUDAYAAN				2.007.245.850	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (satuan: %)		6,35%	932.249.950	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional (satuan unit)		1 Unit	50.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Museum		89,5 poin	899.995.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase kesenian tradisional yang		15%	75.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
KESENIAN TRADISIONAL	mendapat pengakuan nasional (satuan %)				
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dipublikasikan		10%	50.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PERPUSTAKAAN				142.690.100	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)	35 Persen	52 Persen	142.690.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KEARSIPAN				220.214.750	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Ketertiban Pengelolaan Kearsipan (PKPK)	90 Persen	97 Persen	145.214.750	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I		100 Persen	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN				83.437.328.400	
KELAUTAN DAN PERIKANAN				559.806.711	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	persentase ketaatan usaha perikanan		100 persen	30.000.000	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya	-0,01%	1 persen	410.982.511	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase peningkatan produksi ikan tangkap	-7,88%	0,2 Persen	118.824.200	DINAS PERIKANAN
PARIWISATA				12.638.582.480	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase pertumbuhan jasa usaha pariwisata		10%	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi		12%	1.481.247.840	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan		1,6 hari	10.657.334.640	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PERTANIAN				63.673.239.619	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak		6 Persen	100.000.000	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik	75 Persen	76 persen	56.132.713.956	Dinas Pertanian
	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan dalam kondisi baik	75%	100%	799.996.802	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pertanian	1000679 Ton	898113,48	3.950.534.158	Dinas Pertanian
	Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai SNI	5 Persen	2 persen	1.057.487.198	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah peningkatan kelas kelompok	39 Kelompok	35 kelompok	1.146.799.980	Dinas Pertanian
	Persentase Kelompok Ternak yang dibina	100 Persen	100 persen	51.316.800	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin		15 Persen	100.000.000	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
	Persentase Usaha Peternakan yang dibina	100 Persen	100 persen	30.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1%	1 persen	304.390.725	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PERDAGANGAN				4.095.198.600	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik		90 persen	68.344.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-3,69%	4,5	2.609.222.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa (%)	70	95	75.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (%)	90	91 persen	1.162.000.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Tertib Ukur (poin)	55 Poin	64 poin	180.631.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERINDUSTRIAN				2.470.500.990	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Perusahaan Berijin		95 persen	188.131.150	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Evaluasi Rencana Pengembangan Industri		90 persen	2.282.369.840	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				50.998.101.390	
SEKRETARIAT DAERAH				16.906.115.450	SETDA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik	100 Persen	100 persen	15.350.587.200	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	100 persen	1.555.528.250	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD				34.091.985.940	SETWAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan Pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lebak	56,7	85	34.091.985.940	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				491.717.094.241	
PERENCANAAN				3.036.079.450	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD		100	1.745.586.250	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja RKPD		100	1.290.493.200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KEUANGAN				484.619.883.741	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Nilai Neraca aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		100 persen	3.479.990.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	479.969.391.241	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah	15,52 Persen	7%	1.170.502.000	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN				1.116.611.050	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang undangan		100 persen	1.116.611.050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.940.062.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial		100 persen	1.940.062.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.004.458.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100	100	1.004.458.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENGAWASAN				2.570.118.800	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan	85 Persen	90 persen	2.183.313.300	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan		100 persen	386.805.500	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN				7.901.837.225	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan			1.923.844.450	28 Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik		100 persen	1.400.013.000	28 Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati		100 Persen	527.562.150	28 Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		100 persen	4.050.417.625	28 Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.256.670.210	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.256.670.210	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya berkinerja baik		100 Persen	115.428.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB		100 Persen	261.836.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila (satuan: Orang)		1500	280.650.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda		100 Persen	242.531.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan k mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan		100 Persen	1.356.224.010	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NON URUSAN				1.474.057.064.849	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			1.474.057.064.849	
		80,26 Poin	83 Poin	790.050.956.841	Dinas Pendidikan
		81,87 Poin	81.91 poin	352.329.852.302	Dinas Kesehatan
		80,17 Poin	81 Poin	23.473.808.053	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		80,31 Poin	80,50 poin	4.634.009.840	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
		70,77 Poin	75 Poin	8.682.234.071	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		65,78 Poin	58,86 poin	4.023.006.753	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		80,26 Poin	80,3 Poin	4.196.920.720	Dinas Sosial
		80,39 Poin	83 poin	3.530.918.598	Dinas Tenaga Kerja
		91,91 Poin	81 Poin	5.494.371.160	DP3AP2KB
		81,50 Poin	82 Poin	3.405.372.062	Dinas Ketahanan Pangan
		80,11 Poin	75 Poin	11.818.242.186	Dinas Lingkungan Hidup
		80,20 Poin	65 Poin	5.838.855.238	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		77,24 Poin	80 Poin	4.673.124.058	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		80,10 Poin	80 Poin	15.802.471.295	Dinas Perhubungan
		83,45 Poin	80 Poin	4.513.016.614	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		80,07 Poin	81 poin	4.075.883.199	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		81,66 Poin	82 poin	6.254.800.498	Dinas Penanaman Modal
		80,99 Poin	81 poin	3.451.366.873	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		80,78 Poin	83 poin	6.276.707.652	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	
		80,15 Poin	62 Poin	3.287.481.305	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		81,99 Poin	80 poin	4.587.188.177	Dinas Perikanan
		81,54 Poin	83 poin	18.865.862.185	Dinas Pertanian
		80,01 Poin	83 poin	5.312.728.738	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		86,21 Poin	87 poin	5.036.974.257	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		82,83 Poin	80 poin	26.571.556.874	Sekretariat Daerah
		80,82 Poin	82 poin	36.806.815.466	Sekretariat DPRD
		88,26 Poin	90 poin	6.671.104.976	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		82,46 Poin	80 poin	10.492.252.866	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		80,69 Poin	76 poin	14.087.264.489	Badan Pendapatan Daerah
		80,51 Poin	82 poin	4.829.921.349	BKPSDM
		84,31 Poin	90 Poin	9.559.248.945	Inspektorat Daerah
		70,78 Poin	83 poin	5.414.285.090	Kecamatan Rangkasbitung
		60,54 Poin	64 Point	1.871.405.707	Kecamatan Kalanganyar
		70,97 Poin	77 Poin	2.285.959.970	Kecamatan Cibadak
		67,35 Poin	83 poin	2.045.671.173	Kecamatan Warunggunung
		75,94 Poin	77 Poin	2.166.030.308	Kecamatan Cimarga
		76,65 Poin	79 poin	2.452.405.549	Kecamatan Cikulur
		61,39 Poin	83 poin	2.237.072.932	Kecamatan Leuwidamar
		68,33 Poin	69,70 poin	2.336.870.114	Kecamatan Sajira
		76,39 Poin	80 poin	2.390.456.613	Kecamatan Maja
		60,18 Poin	81,5 poin	2.452.261.450	Kecamatan Curugbitung
		71,39 Poin	81 Point	1.706.762.818	Kecamatan Muncang
		56,45 Poin	71 poin	1.493.790.347	Kecamatan Sobang
		73,38 Poin	83 poin	2.391.095.071	Kecamatan Bojongmanik
		67,67 Poin	83 poin	2.027.667.170	Kecamatan Cirinten
		72,03 Poin	73,45 poin	2.245.438.842	Kecamatan Cipanas
		61,02 Poin	83 poin	1.663.436.384	Kecamatan Lebakgedong
		60,48 Poin	81 poin	1.933.775.242	Kecamatan Gunungkencana
		73,64 Poin	75 poin	2.445.415.872	Kecamatan Cileles
		71,39 Poin	83 poin	2.081.238.823	Kecamatan Banjarsari
		72,81 Poin	74.5 poin	2.172.205.635	Kecamatan Cijaku
		71,39 Poin	76 poin	1.516.573.800	Kecamatan Cigemblong
		68,88 Poin	71 poin	2.366.282.585	Kecamatan Malingping
		71,39 Poin	80,5 Poin	2.145.792.594	Kecamatan Wanasalam
		71,83 Poin	72,50 poin	2.032.257.418	Kecamatan Panggarangan
		76,84 Poin	83 poin	2.484.882.895	Kecamatan Cihara
		57,05 Poin	60,05 Poin	2.270.414.910	Kecamatan Bayah
		67,55 Poin	83 poin	2.519.164.462	Kecamatan Cibeber
		71,39 Poin	83 poin	1.892.345.155	Kecamatan Cilograng
		65,89 Poin	73 Poin	2.381.788.280	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjaring

aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak dalam pembangunan tahunan maupun lima tahunan. perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Kabupaten Lebak mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara *bottom-up* bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten. Secara lebih lengkap program pembangunan akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.18
Kegiatan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.067.509.931.160
1.01.0.00.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN	1.067.509.931.160
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.968.174.617
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	397.488.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	777.981.501.284
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.071.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.168.525
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.348.720
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.596.338
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286.541.756.543
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	142.190.752.157
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.276.903.727
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.647.697.660
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.426.402.999
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	455.432.555.684
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	455.432.555.684
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	346.687.929.526
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.908.570
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.455.864.398
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.996.721
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.423.516.320
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.631.079
	Peningkatan Pelayanan BLUD	257.392.012.438
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	93.517.303.818
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.724.837.800
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.098.561.018
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.905.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.476.802.540
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14.073.802.540
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	403.000.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	225.618.500
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	118.840.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	106.778.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	524.901.300
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	181.257.500
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.643.800
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	273.552.958.236
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	273.552.958.236
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.105.136.525
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.956.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.388.045.260
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	913.684.985
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.402.338.280
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.111.100
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.817.571.550
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.447.072.800
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.370.498.750
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.732.292.050
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.732.292.050
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.410.269.200
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.410.269.200
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.850.526.150
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.850.526.150
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.742.201.750
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10.742.201.750
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	574.765.800
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	574.765.800
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	183.337.337.186
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	183.337.337.186
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	225.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	110.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	757.858.025
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	757.858.025
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.253.507.096
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	15.253.507.096
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.241.647.290
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.756.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.970.352.690
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.465.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	596.360.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.918.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.794.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	291.770.306
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	170.200.000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	121.570.306
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.549.124.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.549.124.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.899.965.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.899.965.500
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	271.000.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	271.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.900.644.464
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.725.409.211
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.835.790.211
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.068.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.694.051.141
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327.650.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.362.950
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.699.792.320
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.865.800
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	725.050.000
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	563.950.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	161.100.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	164.569.000
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.569.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.175.235.253
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.750.753
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.073.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.701.903
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.329.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.774.990
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.871.510
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.944.484.500
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	786.975.500
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.777.135.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.380.374.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.021.878.465
1.06.0.00.0.00.04.0000	DINAS SOSIAL	13.021.878.465
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.900.247.215
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.518.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.093.122.970
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.449.675
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.830.570
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.326.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	421.253.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	421.253.000
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.000.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	9.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	321.874.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	78.060.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	243.814.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.227.412.250
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.227.412.250
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	142.092.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	142.092.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.968.154.269
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	3.968.154.269
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.714.224.569
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.985.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.455.132.542
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.766.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.833.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.507.827
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	135.069.500
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	135.069.500
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	67.728.000
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.210.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	37.518.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	51.132.200
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	51.132.200
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	995.307.000
2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	995.307.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	227.300.000
	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	65.000.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.000.000
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	122.300.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	200.044.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.044.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	125.000.000
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	125.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	442.963.000
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.077.000
	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.580.000
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.306.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.490.522.845
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.490.522.845
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.544.621.545
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.102.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.333.072.063
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.471.925
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.503.770
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.471.037
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.000.000.000
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	482.527.200
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	85.093.200
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	40.109.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	357.325.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	311.057.300
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	291.057.300
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	152.316.800
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	152.316.800
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	299.220.000
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	299.220.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	125.000.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	136.020.000
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.020.000
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	38.200.000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	38.200.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.058.102.837
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.058.102.837
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.380.583.337
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.045.500
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.383.486.222
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.284.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.059.638.615
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.129.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.371.798.000
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.048.298.000
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	323.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	275.096.500
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	275.096.500
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	170.635.700
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.635.700
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100.000.000
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.970.400
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.970.400
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.473.313.900
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.473.313.900
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	925.572.700
	Kegiatan Pengelolaan Sampah (UPTD TPA)	925.572.700
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	358.132.300
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	358.132.300
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.074.868.688
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.074.868.688
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.586.775.188
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.117.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.312.423.938
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.160.695.150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.689.149.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.389.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	488.093.500
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	488.093.500
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.714.035.408
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.714.035.408
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.188.877.808
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	288.021.450
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.640.438.903
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399.989.850
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	291.310.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	394.279.765

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174.837.840
	PROGRAM PENATAAN DESA	368.695.200
	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	368.695.200
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25.000.000
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	25.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.039.382.500
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.039.382.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	92.079.900
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.079.900
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.090.911.384
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	20.090.911.384
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.307.392.784
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56.364.533
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.025.171.742
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	285.018.440
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.842.507.944
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.330.125
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	14.783.518.600
	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.783.518.600
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.060.181.155
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	27.060.181.155
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.541.339.780
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.718.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.809.774.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.047.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.385.769.880
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.028.950
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.518.841.375
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.983.238.425
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	536.581.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	160.635.800
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.485.577.900
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	352.808.250
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.944.084.400
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.944.084.400
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	963.940.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.212.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.695.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.651.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.797.000
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.094.027.750
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.094.027.750
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.713.857.300
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.322.115.050
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	391.742.250
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.900.400.249
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.900.400.249
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.313.697.449
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.667.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.325.147.079

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.949.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.193.920
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.739.750
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	500.799.700
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.400.200
	Kegiatan pendidikan dan latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	200.399.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	172.299.750
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	172.299.750
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	373.550.050
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	373.550.050
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	540.053.300
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	540.053.300
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.923.542.809
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL	9.923.542.809
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.467.283.659
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.852.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.543.517.759
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.411.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	561.610.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.045.951.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.813.941.500
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	185.691.500
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	124.204.500
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.487.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	459.210.650
	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	459.210.650
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	642.523.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	642.523.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.834.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.834.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.193.780.244
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA	17.193.780.244
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3.512.828.294
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.339.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.123.763.410
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.292.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.282.250
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.150.784
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.373.358.000
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.223.358.000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.157.593.950
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	319.009.700
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.047.424.250
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	896.250.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.894.910.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	135.303.950
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	135.303.950
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	135.303.950

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	135.303.950
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.955.000
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.955.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.955.000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.955.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.852.137.520
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.852.137.520
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	401.311.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.311.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	550.830.620
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	550.830.620
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	899.995.900
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	899.995.900
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.698.387.748
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.698.387.748
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	453.885.100
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	453.885.100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.953.398
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.152.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.570.943
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.833.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.452.805
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.943.700
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	523.549.250
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	523.549.250
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	523.549.250
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	523.549.250
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.098.451.039
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.098.451.039
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	6.098.451.039
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.551.228.978
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.572.000
	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.727.533.012
	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.005.590
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.848.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.316.060
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.953.816
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	113.156.500
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	113.156.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	434.065.561
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	108.990.050
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	325.075.511
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.064.457.062
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21.064.457.062
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.435.987.932
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.156.360
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.115.929.112
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.525.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.038.020
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.338.840
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.495.542.140
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.495.542.140
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.048.103.000
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.048.103.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.084.823.990
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.084.823.990
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	93.447.419.597
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	85.831.902.294
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.994.377.603
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.844.135.350
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.150.242.253

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	61.781.826.650
	Pembangunan Prasarana Pertanian	61.781.826.650
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.146.799.830
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.146.799.830
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	18.908.898.211
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.556.420
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.004.277.731
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.335.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.434.960
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.293.250
3.27.0.00.0.00.08.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.615.517.303
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.364.911.523
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.947.680
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.261.148.358
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.149.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.684.055
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.981.980
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	814.982.800
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	758.196.550
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.786.250
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.099.955.455
	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.099.955.455
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	284.350.725
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.350.725
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	51.316.800
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	51.316.800
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.555.087.716
3.30.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.555.087.716
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.629.322.166
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.053.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.674.028.388
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.118.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.914.287.960
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.833.568
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	292.885.100
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	292.885.100
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.387.762.050
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.844.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2.271.918.050
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	245.118.400
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	245.118.400
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.505.910.565
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.505.910.565
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.432.611.415
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.432.611.415
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	73.299.150
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	73.299.150
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	56.491.310.889
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	56.491.310.889
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.561.380.789
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.950.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.431.013.992
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.607.667.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.321.910.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.733.764.265
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.346.607.650
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	774.600.632
	Penataan Organisasi	1.329.707.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.813.658.750
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.732.922.150
	Administrasi Tata Pemerintahan	708.006.800
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.359.021.400
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.415.762.950
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	250.131.000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.197.007.950
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	137.533.300
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	538.847.400
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.520.627.250
4.02	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	82.065.913.357
	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	37.887.273.400
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	175.748.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.113.735.788
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.639.490
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daereah	1.525.132.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.779.900
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.643.489.452
	Layanan Admninistrasi DPRD	563.748.370
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.178.639.957
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.841.721.217
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	235.620.250
	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.820.733.840
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.324.491.400
	Fasilitasi Tugas DPRD	35.956.073.250
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	PERENCANAAN	11.148.615.026
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.148.615.026
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.218.744.476
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.853.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.887.845.976
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.006.349.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.485.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.210.500
	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.463.014.200
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	910.320.200
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	102.694.000
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.466.856.350
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	383.573.450
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.435.337.100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	647.945.800
5.02	KEUANGAN	527.398.131.478
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	508.167.581.740
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.676.070.701
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.862.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.532.627.991
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.515.501.575
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.610.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.445.635
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.023.500
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	493.257.225.339
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.123.800.700
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.068.580.750
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.234.938.200
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	488.829.905.689
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.234.285.700
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.234.285.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19.230.549.738
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.008.194.988
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.450.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.235.712.748

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.721.843.570
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.334.269.170
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.163.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.222.354.750
	Pengelolaan pendapatan Daerah	2.222.354.750
5.03	KEPEGAWAIAN	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.667.782.701
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.088.668.951
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.393.091
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.977.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.639.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.731.360
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.928.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.622.091.750
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.307.709.000
	Mutasi dan Promosi ASN	1.314.382.750
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.957.022.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.957.022.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.957.022.000
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.957.022.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	967.718.000
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	967.718.000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	967.718.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	198.500.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	333.518.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	435.700.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.240.995.485
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	13.240.995.485
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.342.996.185
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.273.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.483.031.285
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	503.608.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.153.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.519.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.410.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.613.893.300
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.307.626.550
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.306.266.750
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	284.106.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4.380.000
	Pendampingan dan Asistensi	279.726.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
7.01	KECAMATAN	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN RANGKASBITUNG	9.339.811.887
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.857.401.572
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.270.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.259.147.027
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.427.150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.675.895
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.881.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.405.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.289.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	37.116.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.342.787.315
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.600.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.285.847.315
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.340.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.440.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.440.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.778.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.778.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KALANGANYAR	483.076.288
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	243.140.648

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.490.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.930.430
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.720.218
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.390.840
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.948.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	71.442.840
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.150.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.150.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.300.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.300.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.094.800
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.094.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN CIBADAK	2.481.723.220
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.333.791.380
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.981.680
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.956.306.730
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.328.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.284.520
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.890.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.074.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.094.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.980.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.965.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.205.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.760.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.512.840
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.512.840
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	2.216.181.842
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.076.678.092
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.761.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.688.040.042
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.538.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.338.250
	pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.300
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.121.750
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.821.750
	pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	32.300.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.574.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.088.000
	pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.486.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.650.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.650.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.158.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.158.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN CIMARGA	2.526.670.482
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.345.550.732
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.975.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.101.402
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.476.050
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.707.380
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.290.650
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.335.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.242.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.093.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.331.750
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.611.750
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.720.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.580.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.873.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.873.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN CIKULUR	2.706.969.078
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.483.188.078
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.669.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.150.108.828
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.433.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.623.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.353.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.810.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.997.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.813.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.220.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.080.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.140.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.132.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.132.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.619.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.619.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN LEUWIDAMAR	2.523.992.194
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.322.539.744
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.439.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.021.881.414
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.298.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.201.480
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.718.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.373.050
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.053.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.320.050
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.759.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.057.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.702.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.692.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.692.500
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.627.400
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.627.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SAJIRA	2.480.859.040
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.325.605.790
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.957.060.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.935.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.443.990
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.416.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.612.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.875.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	37.737.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.523.250
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.483.250
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.040.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.738.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.738.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MAJA	2.673.229.769
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.485.411.269
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.174.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.150.624.789
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.664.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.477.380
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.470.700
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.098.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.098.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.232.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.332.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.900.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.108.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.108.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN CURUGBITUNG	2.618.708.450
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.463.694.950
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.742.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.191.049.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.284.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.547.850
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.071.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.497.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.989.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.507.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.967.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.967.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.921.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.977.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.977.500
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.571.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.571.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN MUNCANG	2.024.364.092
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.829.737.342
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.320.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.495.758.972
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.334.550
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.923.820
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.400.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.271.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.030.250
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.241.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.302.750
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.250.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.052.750
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.977.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.977.500
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.075.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.075.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOBANG	1.988.420.151
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.751.266.651
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.076.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.376.547.091
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.467.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.220.210
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.955.900
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.425.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.627.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.798.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.510.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.440.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.070.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.650.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.650.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.568.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.568.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BOJONGMANIK	2,560,363,071

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,392,051,071
	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,065,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,868,326,071
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224,407,950
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,326,550
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,925,500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,820,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,880,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	35,940,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53,772,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23,112,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.	30,660,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52,380,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52,380,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11,340,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,340,000
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN CIRINTEN	2.527.784.242
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.372.962.742
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.687.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.890.945.652
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.253.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.617.190
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.458.550
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.677.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.442.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.235.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.940.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.490.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.450.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.824.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.824.500
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN CIPANAS	2.486.283.442
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.296.533.442
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.497.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.593.632
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.365.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.862.410
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.215.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.511.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.367.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.144.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.164.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	904.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	45.260.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.694.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.694.000
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN LEBAKGEDONG	1.936.771.284
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.775.606.784
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.496.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.411.199.834
	Administrasi Umum Perangakat Daerah	143.788.150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah	131.947.850
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.174.200
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	59.708.000
	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.754.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.954.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.220.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.610.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	44.610.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.015.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	40.015.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.221.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.221.500
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	2.246.891.528
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.047.358.528
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.894.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.540.742.348
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.706.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.935.030
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.080.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.291.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.645.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.646.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.062.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.402.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.660.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.800.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.800.000
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN CILELES	2.747.673.622
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.558.482.872
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.926.000
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.230.500
	Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah	2.211.245.067
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	132.670.550
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.108.060
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	62.302.695
	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82.262.000
	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.213.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	63.049.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.146.250
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	15.056.250
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.090.000
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahaan Umum	52.380.000
	penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahaan Desa	15.402.500
	Fasilitasi Rekomondasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	15.402.500
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN BANJARSARI	2.404.847.657
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.242.624.657
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.302.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.811.307.007
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.078.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.962.950
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.974.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.444.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.942.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.502.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.723.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.041.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.682.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.720.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.720.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.335.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.335.000
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN CIJAKU	2.479.976.635
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.276.045.635
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.084.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.537.205

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.286.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.538.930
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.594.750
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.181.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.601.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	66.580.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.200.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.110.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.090.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.256.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.256.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.294.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.294.000
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN CIGEMBLONG	2.009.759.006
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.807.356.756
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.436.090
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.334.338.556
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.439.960
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.952.150
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.190.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.889.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.559.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	90.330.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.710.750
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.910.750
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingjkat Kecamatan	43.800.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.180.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.180.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.622.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.622.000
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN MALINGPING	2.577.986.525
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.410.117.625
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.466.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.014.628.135
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.524.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.248.062
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.250.128
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.354.900
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.426.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.928.900
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.620.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.610.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.010.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.514.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.514.000
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN WANASALAM	2.260.124.494
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.050.992.594
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.804.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.681.197.809
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.217.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.133.150
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.639.735
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.315.250
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.614.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.701.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.895.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.719.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.176.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.541.150
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.541.150
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN PANGGARANGAN	2.321.118.918
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.139.009.418
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	69.503.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.685.609.012
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.356.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.730.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.718.950
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.091.256
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.250.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.187.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.063.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.006.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.556.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.450.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.473.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.473.000
7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN CIHARA	2.632.457.108
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.327.358
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.105.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.981.218.062
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.696.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.386.346
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.920.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.604.750
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.613.250
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.991.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.877.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.877.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.180.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.180.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.468.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.468.000
7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN BAYAH	2.418.985.620
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.246.391.620
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.876.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.681.600.690
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.007.650
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.368.780
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.538.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.798.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.538.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.260.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.708.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.358.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28.350.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.296.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.296.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.792.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.792.000
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN CIBEBER	2.682.363.231
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.535.152.931
	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.484.340
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.069.191.831
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.782.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.670.750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.023.560
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.524.800
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.024.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2022 (Rp)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	27.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.	30.164.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	539.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.	29.625.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.521.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.521.000
7.01.0.00.0.00.28.0000	KECAMATAN CILOGRANG	2.111.935.405
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.996.062.405
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.283.090
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.475.083.421
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.354.814
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.822.880
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.518.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.733.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.623.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.110.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.097.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.097.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.380.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.380.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.663.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.663.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.851.995.460
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.851.995.460
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.851.995.460
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.104.475.830
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.725.450
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	543.188.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.576.980
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.984.500
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	869.720.650
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	869.720.650
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.713.324.010
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.713.324.010
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	161.848.200
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	161.848.200
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	665.268.250
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	665.268.250
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	337.358.520
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	337.358.520

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

setiap warga secara minimal. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Tabel 1.19
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
URUSAN BIDANG KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
	manusia *(Human Immunodefici ency Virus)*		
URUSAN BIDANG PUPR			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
URUSAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%
URUSAN BIDANG SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja dari Perangkat Daerah. Adapun capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	PERUBAHAN
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	64,03	64,71	0,68
2	ANGKA KEMISKINAN	10,29	8,91	-1,38
3	ANGKA PENGANGGURAN (TPT)	7,86	8,55	0,69
4	PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)	3,18	3,86*	0,68
5	PDRB/Kapita (dalam jutaan rupiah)	21,88	23,34*	1,46
6	KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)	0,332	0,312*	-0,02

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak, 2022.

Dari tabel di atas menunjukan bahwa Pembangunan Manusia di Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Lebak mencapai 64,71% meningkat 0,68% dibandingkan tahun 2021 sebesar 64,03%. Untuk Angka Kemiskinan Kabupaten Lebak pada tahun 2022 juga mengalami penurunan yang sangat

signifikan yaitu 8,91% atau turun -1,38% dibanding dengan tahun 2021 sebesar 10,29%. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,55% atau 0,69% dibanding tahun 2021 sebesar 7,86% meskipun menunjukan kinerja kurang baik tetapi pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak untuk tahun 2022 menunjukan kinerja positif. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3,18% pada tahun 2021 naik menjadi 3,86% atau 0,68% pada tahun 2022. Sedangkan Pendapatan per kapita Kabupaten Lebak untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 23.34 Juta mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 1,46 dari tahun sebelumnya. Pada Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah berhasil menurunkan angka Ketimpangan Pendapatan yang terjadi di masyarakat yaitu 3,12% turun (-0,02) dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebak di tahun 2022 sangat baik. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah berhasil sedikit demi sedikit memulihkan perekonomian masyarakat dari dampak pandemi *covid-19.*

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci yang memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data atau informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

Informasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) Kab. Lebak

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
A. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		295,00	295,00
	2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yg menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		30.749,00	30749,00
	3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yg menerima pembebasan biaya Pendidikan		30.749,00	30749,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		2.633,00	2633,00
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		2.633,00	2633,00
	6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat projesi guru pendidikan anak usia dini		507,00	507,00
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah		374,00	374,00
	8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		928,00	928,00
	9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		137.207,00	137207,00
	10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yg menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		46.436,00	46436,00
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		137.207,00	137207,00
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yg menerima pembebasan biaya pendidikan		46.436,00	46436,00
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		5.614,00	5614,00
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.675,00	2675,00
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		5.614,00	5614,00
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.675,00	2675,00
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1.206,00	1206,00
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		661,00	661,00
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1.206,00	1206,00
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		661,00	661,00
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan		5.342,00	5342,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dansertifikat pendidik			
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.637,00	2637,00
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		775,00	775,00
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		222,00	222,00
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		1,00	1,00
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		1,00	1,00
	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		928,00	928,00
	28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		137.207,00	137207,00
	29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		46.436,00	46436,00
	30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yg menerima pembebasan biaya Pendidikan		137.207,00	137207,00
	31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yg menerima pembebasan biaya pendidikan		46.436,00	46436,00
	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		5.614,00	5614,00
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		2.675,00	2675,00
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		5.614,00	5614,00
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		2.675,00	2675,00
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		1.206,00	1206,00
	37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		661,00	661,00
	38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		1.206,00	1206,00
	39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		661,00	661,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		5.342,00	5342,00
	41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.637,00	2637,00
	42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		775,00	775,00
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		222,00	222,00
	44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat		1,00	1,00
	45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yg memiliki ijazah SMA/sederajat		1,00	1,00
	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		18,00	18,00
	47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		7.448,00	7448,00
	48	Jumlah peserta didik		7.448,00	7448,00
	49	Pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		7.448,00	7448,00
	50	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		240,00	240,00
	51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		240,00	240,00
	52	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		132,00	132,00
	53	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		775,00	775,00
	54	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		23,00	23,00
Kesehatan	55	Jumlah RS Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		4,00	4,00
	56	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		83,35	83,35
	57	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		3.369,00	3369,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		73,31	73,31
	59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		3.369,00	3369,00
	60	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		128,91	128,91
	61	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		3.369,00	3369,00
	62	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		141,89	141,89
	63	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		13.687,00	13687,00
	64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		88,00	88,00
	65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		3.806,00	3806,00
	66	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		80,24	80,24
	67	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	68	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	69	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		65,94	65,94
	70	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	71	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		83,10	83,10
	72	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		61,68	61,68
	74	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		73,10	73,10
	76	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	77	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		95,00	95,00
	78	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
	79	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		92,22	92,22
	80	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		3.806,00	3806,00
Pekerjaan Umum	81	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)		1,00	1,00
	82	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (m)		1,00	1,00
	83	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/Kota (ha)		1,00	1,00
	84	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/Kota (m)		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	85	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kab/Kota		1,00	1,00
	86	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/Kota		1,00	1,00
	87	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten /kota		1,00	1,00
	88	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)		1,00	1,00
	89	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (m)		1,00	1,00
	90	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/Kota (ha)		1,00	1,00
	91	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/Kota (m)		1,00	1,00
	92	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kab/Kota		1,00	1,00
	93	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/Kota		1,00	1,00
	94	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/Kota		1,00	1,00
	95	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		44,79	44,79
	96	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		26,33	26,33
	97	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		1,00	1,00
	98	Pemenuhan dokumen RISPAM Kab/Kota		1,00	1,00
	99	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		1,00	1,00
	100	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/ Kota penyelenggaran SPAM		1,00	1,00
	101	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		1,00	1,00
	102	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		1,00	1,00
	103	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		1.642,00	1642,00
	104	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		1,00	1,00
	105	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		1.642,00	1642,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	106	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		101,00	101,00
	107	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		1,00	1,00
	108	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		1,00	1,00
	109	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	1,00	100,00
			Rumah di wilayah pengembang an SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	1,00	
	110	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	1,00	100,00
			Rumah di wilayah pengembang an SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	1,00	
	111	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1,00	100,00
			Rumah di wilayah Pengembangan SPALD T	1,00	
	112	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	1,00	100,00
			Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S	1,00	
	113	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana penganguktan yang tersedia	1,00	100,00
			Jumlah sarana penganguktan yang dibutuhkan kabupaten	1,00	
	114	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	1,00	100,00
			Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten	1,00	
	115	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	1,00	100,00
			Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten	1,00	
	116	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	1,00	100,00
			Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S	1,00	
	117	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	106,00	79,10
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	134,00	
	118	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		237,00	237,00
	119	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		1,00	1,00
	120	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung		1,00	1,00
	121	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		62,00	62,00
	122	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		untuk kepentingan strategis daerah provinsi			
	123	Jumlah bangunan gedung negara mili Pemerintah Kab/Kota		1,00	1,00
	124	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kab/Kota yg dipelihara/dirawat		1,00	1,00
	125	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		773,93	773,93
	126	Panjang jalan yang dibangun		10,65	10,65
	127	Panjang jembatan yg dibangun		6,00	6,00
	128	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		92,20	92,20
	129	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		1,00	1,00
	130	Panjang jalan yg direkonstruksi atau direhabilitasi		13,86	13,86
	131	Panjang jembatan yang direhabilitasi		1,00	1,00
	132	Panjang jalan yang Dipelihara		246,12	246,12
	133	Panjang jembatan yg dipelihara		1,00	1,00
	134	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	135	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kab/Kota		64,00	64,00
	136	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah Kab/Kota		64,00	64,00
	137	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data termutakhir		100,00	100,00
	138	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		14,00	14,00
	139	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		1,00	1,00
	140	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		1,00	1,00
	141	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		1,00	1,00
	142	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kab/Kota		1,00	1,00
	143	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah Kab/Kota yang di laksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi,		64,00	64,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
	144	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis		64,00	64,00
	145	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analis di wilayah Kab/Kota		666,00	666,00
	146	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	147	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		1,00	1,00
	148	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	1,00
	149	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	1,00
	150	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	1,00
	151	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	152	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	153	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	154	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	155	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		1,00	1,00
	156	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	1,00
	157	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0,27	0,27
	158	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
Perumahan Rakyat	159	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		1,00	1,00
	160	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		1,00	1,00
	161	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		1,00	1,00
	162	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		1,00	1,00
	163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		1,00	1,00
	164	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi		1,00	1,00
	165	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		1,00	1,00
	166	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		1,00	1,00
	167	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		1,00	1,00
	168	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1,00	1,00
	169	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1,00	1,00
	170	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1,00	1,00
	171	Jumlah rumah tangga penerima layanan yg telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1,00	1,00
	172	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1,00	1,00
	173	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		1,00	1,00
	174	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		1,00	1,00
	175	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		1,00	1,00
	176	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		1,00	1,00
	177	Jumlah rumah di kab/ kota		1,00	1,00
	178	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		1,00	1,00
	179	Jumlah rumah tidak layak huni		1,00	1,00
	180	Jumlah rumah yg tidak dihuni		1,00	1,00
	181	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	1,00	100,00
			Jumlah Total Unit Rumah	1,00	
	182	Jumlah rumah pembangunan baru		1,00	1,00
	183	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	184	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		1,00	1,00
	185	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		1,00	1,00
	186	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		1,00	1,00
	187	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		1,00	1,00
	188	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		1,00	1,00
	189	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		1,00	1,00
	190	Jumlah pengembang yang teregistrasi		1,00	1,00
	191	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		1,00	1,00
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	192	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		99,00	99,00
	193	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		5.607,00	5607,00
	194	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		8,00	8,00
	195	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		1,00	1,00
	196	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		8,00	8,00
	197	Tersedianya sarana prasarana minimal		YA	YA
	198	Persentas penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0,90	90,00
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1,00	
	199	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	1.478.666,00	100,00
			Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	1.478.666,00	
	200	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0,90	90,00
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1,00	
	201	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1,00	100,00
			Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	1,00	
	202	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	357,00	0,02
			Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	1.478.666,00	
	203	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	357,00	0,02
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.478.666,00	
	204	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	1.478.666,00	100,00
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.478.666,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	205	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	1,00	0,00
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.478.666,00	
	206	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	1,00	100,00
			Jumlah seluruh penetapan status KLB	1,00	
	207	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	2,00	100,00
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	2,00	
	208	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	48,00	100,00
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	48,00	
	209	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	170,00	80,57
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	211,00	
	210	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota		7,00	7,00
	211	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		1,00	1,00
	212	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		1,00	1,00
	213	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		1,00	1,00
	214	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		58,00	58,00
	215	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		2,00	2,00
	216	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		1,00	1,00
	217	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		2,00	2,00
Pelayanan Sosial	218	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		85,00	85,00
	219	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		30.005,00	30005,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	220	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		110,00	110,00
	221	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		132,00	132,00
	222	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		4,00	4,00
	223	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		132,00	132,00
	224	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		2,00	2,00
	225	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		1,00	1,00
	226	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		24,00	24,00
	227	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		2,00	2,00
	228	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		1,00	1,00
	229	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		1,00	1,00
	230	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		1,00	1,00
	231	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/ atau relawan sosial yangg disediakan		259,00	259,00
	232	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		22,00	22,00
	233	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		22,00	22,00
	234	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		4,00	4,00
	235	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		22,00	22,00
	236	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		14,00	14,00
	237	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		14,00	14,00
	238	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut		21,00	21,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
	239	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		550,00	550,00
	240	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		150,00	150,00
	241	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		15,00	15,00
	242	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		20,00	20,00
	243	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		20,00	20,00
	244	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		259,00	259,00
B. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	245	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota		1,00	1,00
	246	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator	1,00	100,00
			Target Indikator	1,00	
	247	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota		1,00	1,00
	248	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	1,00	100,00
			Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	1,00	
	249	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	1,00	
	250	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	1,00	
	251	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah seluruh LPK pada tahun n	1,00	
	252	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	1,00	
	253	Jumlah penganggur yang dilatih		1,00	1,00
	254	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	1,00	
	255	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah lulusan pada tahun n	1,00	
	256	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	1,00	
	257	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	CPMI dilatih	1,00	100,00
			CPMI terdaftar	1,00	
	258	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		1,00	1,00
	259		Jumlah perusahaan yang menerapkan program	1,00	100,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	peningkatan produktivitas pada tahun n		
			Jumlah perusahaan pada tahun n	1,00	
	260	Data tingkat produktivitas total		1,00	1,00
	261	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	1,00	
	262	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	1,00	
	263	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		1,00	1,00
	264	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	1,00	
	265	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	1,00	
	266	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan pada tahun n	1,00	
	267	Jumlah mogok kerja		1,00	1,00
	268	Jumlah penutupan perusahaan		1,00	1,00
	269	Jumlah perselisihan kepentingan		1,00	1,00
	270	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		1,00	1,00
	271	Jumlah perselisihan PHK		1,00	1,00
	272	Jumlahpekerja/buruh yang ter-PHK		1,00	1,00
	273	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		1,00	1,00
	274	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yang diberdayakan		1,00	1,00
	275	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	1,00	100,00
			Jumlah kasus perselisihan	1,00	
	276	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	277	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota		1,00	1,00
	278	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota		1,00	1,00
	279	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota		1,00	1,00
	280	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		1,00	1,00
	281	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	282	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		1,00	1,00
	283	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		1,00	1,00
	284	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPM/CTKI yang mendapatkan sosuialisasi	1,00	100,00
			Jumlah CPM/CTKI	1,00	
	285	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yg terdata		1,00	1,00
	286	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	fasilitasi PMI yang dipulangkan	1,00	100,00
			PMI yang dipulangkan	1,00	
	287	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	1,00	100,00
			Jumlah PMI/TKI	1,00	
	288	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yg diberdayakan	1,00	100,00
			Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya	1,00	
	289	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Jumlah LTSA yang dibentukan	1,00	100,00
			Jumlah daerah kantong PMI/TKI	1,00	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	290	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG		1,00	1,00
	291	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab/Kota		1,00	1,00
	292	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/ kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		10,00	10,00
	293	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1,00	1,00
	294	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	98,00	100,00
			Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten	98,00	
	295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		19,00	19,00
	296	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		1,00	1,00
	297	Jumlah organisasi kemasyarakat an yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan		3,00	3,00
	298	Jumlah kader perempuan tingkat Kab/Kota yang sudah dilatih		100,00	100,00
	299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		3,00	3,00
	300	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kab/Kota		1,00	1,00
	301	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
	302	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi		1,00	1,00
	303	Persentase korban Kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	131,00	100,00
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	131,00	
Pangan	304	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		25,00	25,00
	305	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		5.750,00	5750,00
	306	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		1,00	1,00
	307	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		2,00	2,00
	308	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1,00	1,00
	309	Tertanganinya kerawanan pangan		0,08	0,08
	310	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		45.000,00	45000,00
	311	Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan segar		0,99	0,99
Pertanahan	312	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	1,00	100,00
			Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	1,00	
	313	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	1,00	100,00
			Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	1,00	
	314	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	1,00	100,00
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	1,00	
	315	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Jumlah izin membuka tanah yang ditolak	1,00	100,00
			Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	1,00	
	316	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	1,00	100,00
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	1,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
Lingkungan Hidup	317	Hasil perhitungan kabupaten terhadap :			58,92
		Indeks kualitas air (IKA)		57,00	57,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		79,92	79,92
		Indeks tutupan hutan (ITH)		39,83	39,83
	318	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota		16,70	16,70
	319	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	7,00	28,00
			Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	25,00	
	320	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	Jumlah PPLHD yang ada	1,00	0,50
			Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	199,00	
	321	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota	Jumlah MHA yang diakui	522,00	17400,00
			Jumlah usulan MHA	3,00	
	322	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	522,00	100,00
			Jumlah MHA yang ada	522,00	
	323	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	1,00	100,00
			Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	1,00	
	324	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/Kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	9,00	100,00
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	9,00	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	325	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	278.297,00	74,81
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	372.000,00	
	326	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	2.060,00	31,71
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	6.496,00	
	327	Penerbitan akta Kematian	Jumlah akta Kematian yang diterbitkan	2.950,00	109,02
			Peristiwa Kematian yang dilaporkan	2.706,00	
	328	Penyajian data Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	1.478.666,00	100,00
			2 tahun	1.478.666,00	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	329	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		52,00	52,00
	330	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		1,00	1,00
	331	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		3.458,00	3458,00
	332	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		137,00	137,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	333	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		52,00	52,00
	334	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yanng melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		1,00	1,00
	335	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		3.458,00	3458,00
	336	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		137,00	137,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	337	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perdakan		1,00	1,00
	338	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		37,00	37,00
	339	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)		1,00	1,00
	340	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1.132.516,00	99,23
			Jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1.141.250,00	
	341	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan progra, KKBPK		17,00	17,00
	342	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP	70,00	100,00
			Jumlah Faskes	70,00	
	343	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif	148.191,00	66,29
			Jumlah PUS	223.555,00	
	344	Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	6,00	6,00
	345	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen	23.337,00	100,00
			Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	23.337,00	
	346	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	14,00	14,00
	347	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	91.670,00	65,71
			Jumlah keluarga PBI	139.501,00	
Perhubungan	348	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	6,00	100,00
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	6,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	349	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	4.884,00	37,47
			Jumlah kendaraan wajib uji	13.036,00	
	350	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	55,00	100,00
			Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten	55,00	
	351	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa IaIu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan Kabupaten	120,00	120,00
			Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	100,00	
	352	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kab/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan Kabupaten	187,00	100,00
			Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	187,00	
Komunikasi dan Informatika	353	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1,00	1,64
			Jumlah OPD	61,00	
	354	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang mengunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	1,00	1,64
			Jumlah OPD	61,00	
	355	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Tidak	tidak
	356	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.05/2015	20,00	100,00
			Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	20,00	
	357	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	61,00	100,00
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	358	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13,00	21,31
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	359	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	26,00	100,00
			Jumlah layanan	26,00	
	360	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5,00	19,23
			Jumlah layanan	26,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	361	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5,00	19,23
			Jumlah sistem elektronik	26,00	
	362	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	5,00	19,23
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	26,00	
	363	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	4,00	6,56
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	364	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat	0,00	0,00
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	365	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	0,00	0,00
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	366	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	13,00	100,00
			Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah	13,00	
	367	Persentase perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	2,00	3,28
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	368	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	8,00	100,00
			Jumlah ASN pengelola TIK	8,00	
	369	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		YA	YA
	370	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	5,00	100,00
			Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten	5,00	
	371	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kabupatensesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	1,00	100,00
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten	1,00	
	372	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	1,00	100,00
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	1,00	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	373	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	1,00	0,11
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	884,00	
	374	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,	1,00	100,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah Kab/Kota	cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	1,00	
	375	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	51,00	5,77
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	376	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	34,00	3,85
			Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	884,00	
	377	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	52,00	5,88
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	378	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	52,00	0,05
			Jumlah anggota koperasi yang ada	110.901,00	
	379	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	80,00	9,05
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	380	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		1,00	1,00
	381	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	14,00	1,58
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	382	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,00	0,00
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	383	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	80,00	9,05
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	384	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	80,00	9,05
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	385	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	80,00	9,05
			Jumlah Koperasi yang ada	884,00	
	386	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	5.185,00	4,42
			Jumlah wirausaha yang ada	117.269,00	
	387	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0,00	0,00
			Jumlah usaha mikro yang ada	117.269,00	
	388	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	439,00	0,37
			Jumlah usaha mikro yang ada	117.269,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	389	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	80,00	0,07
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk	117.189,00	
	390	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	53,00	0,05
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapat dukungan pemasaran	117.216,00	
	391	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	52,00	0,04
			Jumlah usaha mikro yang ada	117.269,00	
	392	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	80,00	0,07
			Jumlah usaha mikro yang ada	117.269,00	
Penanaman Modal	393	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		1,00	1,00
	394	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		1,00	1,00
	395	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		1,00	1,00
	396	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		1,00	1,00
	397	Kegiatan pameran penanaman modal		1,00	1,00
	398	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		1,00	1,00
	399	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		122,00	122,00
	400	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		14.362,00	14362,00
	401	Laporan realisasi penanaman modal		1.526.104.170.000	1526104170000
	402	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab/Kota		4,00	4,00
	403	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		30,00	30,00
	404	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi Kab/Kota		27,00	27,00
Kepemudaan dan Olahraga	405	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		117,00	117,00
	406	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0,00	0,00
	407	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		135,00	135,00
	408	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		58,00	58,00
	409	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		689,00	689,00
	410	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		3,00	3,00
Statistik	411	Tersedianya buku profil daerah		1,00	1,00
	412	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		33,00	33,00
	413	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	414	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1,00	1,00
	415	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		1,00	1,00
	416	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	3,00	100,00
			Jumlah kegiatan statistik sektoral	3,00	
	417	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	3,00	100,00
			Jumlah indikator statistik sektoral	3,00	
Persandian	418	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	1,00	100,00
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	1,00	
	419	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian	4,00	100,00
			Jumlah SE yang ada	4,00	
	420	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1,00	100,00
			Jumlah SE yang ada	1,00	
	421	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	1,00	100,00
			Jumlah titik pada PHKS	1,00	
Kebudayaan	422	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		243,00	243,00
	423	Jumlah obyek Pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman		243,00	243,00
	424	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		1,00	1,00
	425	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		10,00	10,00
	426	Register cagar Budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		1,00	1,00
	427	Perlindungan cagar Budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		4,00	4,00
	428	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		0,00	0,00
	429	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama,		1,00	1,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
	430	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		3,00	3,00
	431	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	26.580,00	26580,00
	432	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	4.097,00	4097,00
	433	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		3,00	3,00
	434	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		0,00	0,00
	435	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		7,00	7,00
	436	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0,00	0,00
	437	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		38,00	38,00
	438	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		4,00	4,00
	439	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		1,00	1,00
	440	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		1,00	1,00
Perpustakaan	441	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	39.446,00	2,67
			Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1.478.666,00	
	442	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	35.680,00	2,41
			Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1.478.666,00	
	443	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	10,00	0,00
			Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1.478.666,00	
	444	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	9,00	0,99
			Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdaftar di wilayahnya	905,00	
	445	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		76,00	76,00
	446	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		0,00	0,00
	447	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0,00	0,00
	448	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0,00	0,00
Kearsipan	449	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	172,00	100,00
			Jumlah seluruh arsip aktif	172,00	
	450	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	9.027,00	100,00
			Jumlah seluruh arsip in-aktif	9.027,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	451	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	1.159,00	100,00
			Jumlah seluruh arsip statis	1.159,00	
	452	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	582,00	5,62
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten	10.358,00	
	453	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		0,00	0,00
	454	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0,00	0,00
	455	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kab/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		1,00	1,00
	456	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK		1.035,00	1035,00
	457	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		28,00	28,00
	458	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yg sesuaiNSPK		1,00	1,00
C. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	459	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		135,00	135,00
	460	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	11,00	100,00
			Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten	11,00	
	461	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang diterbitkan		93,00	93,00
	462	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		30,00	30,00
	463	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		1.299.760,00	1299760,00
Pariwisata	464	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		52,00	52,00
	465	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		17,00	17,00
	466	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota		235,00	235,00
	467	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		551,00	551,00
	468	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		19,00	19,00
	469	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/Kota		0,00	0,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	470	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		2,00	2,00
	471	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	36,00	36,00
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	100,00	
	472	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	421,00	42,10
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	1.000,00	
	473	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		10,00	10,00
Pertanian	474	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		106,00	106,00
	475	Prasaran pertanian yang digunakan		106,00	106,00
	476	Penerbitan izin usaha pertanian		612,00	612,00
	477	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	106,00	100,00
			Jumlah prasarana yg dibangun	106,00	
	478	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	612,00	100,00
			Jumlah usulan usaha pertanian	612,00	
	479	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	1.168,00	87,10
			Luas area terkena bencana	1.341,00	
Energi dan Sumber Daya Mineral	484	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		1,00	1,00
Perdagangan	485	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		1,00	
		1. Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat pembelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	1,00	100,00
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yg dokumennya sudah lengkap dan benar	1,00	
		2. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	1,00	100,00
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	1,00	
	486	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	1,00	100,00
			Jumlah permohonan penerbitan TDG	1,00	
	487	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	1,00	100,00
			Jumlah gudang yang ada di kabupaten	1,00	
	488	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		1,00	100,00
		Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	1,00	100,00
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	1,00	
		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	1,00	100,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	1,00	
		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	1,00	100,00
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	1,00	
	489	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten	1,00	100,00
			Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	1,00	
	490	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	1,00	100,00
			Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	1,00	
	491	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		1,00	1,00
	492	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		1,00	1,00
	493	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		1,00	1,00
	494	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	1,00	100,00
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	1,00	
	495	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sample BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	1,00	100,00
			Total sample BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	1,00	
Perindustrian	496	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	1,00	100,00
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1,00	
	497	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		1,00	1,00
	498	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	1,00	100,00
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1,00	
	499	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	1,00	100,00
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	1,00	
	500	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas	1,00	100,00
			Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	1,00	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

Informasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kab. Lebak

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
A. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	18.675,00	33,87
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	55.137,00	
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	160.520,00	98,39
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	163.139,00	
	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	64.715,00	81,24
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yg bersangkutan	79.658,00	
	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.877,00	0,63
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	297.108,00	
KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/ kota	1.041,00	0,71
			Jumlah penduduk di kabupaten/kota	1.459.108,00	
	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	4,00	100,00
			Jumlah RS di kabupaten/kota	4,00	
	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	22.250,00	91,01
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	24.448,00	
	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	20.330,00	87,11
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	23.337,00	
	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	21.583,00	97,11
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	22.226,00	
	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	111.280,00	102,49
			Jumlah balita di kabupaten/kota	108.580,00	
	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	223.509,00	99,42
			Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	224.816,00	
	1.b.8		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan	734.765,00	91,61

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	skrining kesehatan sesuai standar		
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	802.020,00	
	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	131.828,00	87,36
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/ kota	150.908,00	
	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	260.391,00	91,74
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	283.826,00	
	1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	16.660,00	91,74
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	18.160,00	
	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1.618,00	86,94
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	1.861,00	
	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	19.281,00	127,00
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	15.182,00	
	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV yang mendapat kan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	24.790,00	91,90
			Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV di kabupaten/ kota	26.974,00	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali an banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1,00	100,00
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenang an kabupaten/kota (ha)	1,00	
	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali an pengaman pantai di WS Ke wenangan kabupaten/kota (ha)	1,00	100,00
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	1,00	
	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)	49.264,00	50,77
			luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	97.041,00	
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/ kota	250.666,00	73,38
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota tersebut	341.603,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	249.748,00	73,11
			Jumlah rumah di kabupaten/ kota	341.603,00	
	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	237,00	55,63
			Jumlah IMB yang berlaku	426,00	
	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	530,29	68,52
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	773,93	
	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	666,00	14,52
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota	4.588,00	
	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	366,00	99,73
			jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	367,00	
PERUMAHAN	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	65,00	14,91
			jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	436,00	
	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	65,00	14,91
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	436,00	
	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	24,35	100,00
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	24,35	
	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	43.823,00	12,83
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	341.603,00	
	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	11,00	11,83
			Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	93,00	
TRANTIBUM LINMAS	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	99,00	100,00
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	99,00	
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yg ditegakkan	8,00	61,54
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi	13,00	
	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	357,00	100,00

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Jumlah sasaran yg seharusnya menerima informasi rawan bencana	357,00	
	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegah an dan kesiapsiagaan terhadap bencana	357,00	100,00
			Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	357,00	
	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13.000,00	100,00
			Jumlah sasaran yg seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13.000,00	
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	31,00	50,82
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	61,00	
	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	45,83	45,83
SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasanya di luar panti	4.275,00	14,25
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	30.005,00	
	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	550,00	57,35
			populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	959,00	
B. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
KETENAGA KERJAAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2,00	100,00
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	2,00	
	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	8.970,00	58,44
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	15.348,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	22.099.000.000,00	1439861,87
			Jumlah tenaga kerja	15.348,00	
	2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	107,00	69,48
			Jumlah perusahaan	154,00	
	2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2.888,00	28,97
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar	9.970,00	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	790.877.592.352,00	42,91
			Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	1.843.156.065.472,00	
	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/ kota yang didampingi	97,00	0,16
			Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	61.348,00	
	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	131,00	18,45
			Jumlah penduduk perempuan	710.128,00	
PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	199.762.106,00	111,13
			Jumlah kebutuhan pangan	179.762.106,00	
PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	645.252,10	0,02
			Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	3.305.072.000,00	
	2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1,00	100,00
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1,00	
	2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	645.252,10	100,00
			Luas izin lokasi yang diterbitkan	645.252,10	
	2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	1,00	100,00
			Jumlah pemerima tanah obyek landreform	1,00	
	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	1,00	100,00
			luas izin membuka tanah yang diterbitkan	1,00	
	2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	3,00	100,00
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	3,00	
LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	62,52	62,52
	2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	85.481,43	41,19
			Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	207.546,00	
	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang	1,00	0,68

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	diterbitkan pemerintah kabupaten/kota		
			usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	146,00	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	1.015.053,00	99,01
			Jumlah penduduk wajib KTP-el	1.025.163,00	
	2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	184.865,00	41,45
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	446.023,00	
	2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	443.011,00	97,31
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	455.238,00	
	2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10,00	16,39
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	107,00	93,04
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	115,00	
	2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1,00	100,00
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	1,00	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,60	2,60
	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	148.191,00	66,29
			Jumlah pasangan usia subur	223.555,00	
	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	63.388,00	28,35
			Jumlah Pasangan Usia Subur	223.555,00	
PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	bobot angkutan jalan (IK1)	0,61	0,61
	2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,67	0,67
KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	1,00	1,64
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	61,00	100,00
			Jumlah layanan publik	61,00	
	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	992.139,00	96,79
			Jumlah penduduk	1.025.083,00	
KOPERASI DAN UKM	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	57,00	6,24
			Jumlah seluruh koperasi	914,00	
	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	72.875,00	62,14
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	117.269,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	1.526.104.170.000	172,96
			Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2022	4.165.729.814.628	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	165,00	0,05
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	360.504,00	
	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	789,00	0,22
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	360.504,00	
	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	375,00	375,00
STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	61,00	100,00
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
	2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	61,00	100,00
			Jumlah Perangkat Daerah	61,00	
PERSANDIAN	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	61,00	0,02
			Jumlah area penilaian	3.300,00	
BUDAYA	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	62,00	100,00
			Jumlah cagar budaya yang terdata	62,00	
PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	65,70	65,70
	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	50,70	50,70
KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	100,00	100,00
	2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	100,00	100,00
C. INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	10.393,46	100,66
			Target Produksi Perikanan Mengacu Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.325,32	
PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	12,00	4491,67
			Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2022	551,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	405.941,00	123,76
			Jumlah wisatawan nusantara tahun 2022	908.341,00	
	3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	52.620,00	33,92
			Jumlah kamar yang tersedia	155.125,00	
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.538.250.000.000,00	4,60
			Total PBRB harga berlaku	33.469.200.000.000,00	
	3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	243.225.000,00	0,13
			Jumlah total PAD	183.137.041.202,00	
PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,18	0,00
			Luas Panen	103.937,00	
	3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	66,00	6,06
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2022	62,00	
ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaaatan panas bumi yang memiliki ijin	1,00	100,00
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1,00	
PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	1,00	100,00
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	1,00	
	3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	1,00	100,00
			Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	1,00	
	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	1,00	100,00
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	1,00	
PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	1,00	100,00
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022	1,00	
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1,00	1,00
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1,00	100,00
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00	
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1,00	100,00
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00	
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah **Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)** dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1,00	100,00
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00	
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1,00	1,00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.

2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)

Informasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan (IKK Penunjang) Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan (Penunjang)
Kab. Lebak

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)					
PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	782.020.657.244,00	26,62
			Total belanja APBD	2.937.247.174.353,00	
	4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	421.018.846.757,00	1257,94
			Jumlah PDRB NonMigas	33.469.000.000,00	
	4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3,00	3,00
	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3,00	3,00
	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	1.303.926.685.209,00	44,39
			Total belanja APBD	2.937.247.174.353,00	
	4.a.5	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	WTP	WTP
PENGADAAN	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	2,00	0,71
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022	281,00	
	4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	231,00	30,88
			Jumlah keseluruhan pengada an baik yg dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	748,00	
	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	442.883.309.288,85	24,03
			Total belanja langsung	1.843.156.066.472,00	
	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021	-60.781.782.331,15	-574,72
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022	288.544.832.288,85	
KEPEGAWAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1.922,00	68,86
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.791,00	
	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	493,00	17,66
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.791,00	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	312,00	63,29
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	493,00	
MANAJEMEN KEUANGAN	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	2.635.141.572.168,00	0,90
			Total belanja APBD	2.937.247.174.353,00	
	4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	421.018.846.757,00	1,00
			Total PAD dalam APBD	421.018.846.757,00	
	4.d.3	Assets Management	Total Assets Management	4,00	4,00
	4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	239.844.092.909,15	8,21
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.920.409.223.229,00	
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.540.441.434.543,00	86,49
			Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.937.247.174.353,00	
	4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda	1,00	100,00
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	1,00	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kab. Lebak.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak kepada masyarakat selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada stakeholder dan masyarakat tentang pelaksanaan misi Bupati dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencapai 10 sasaran strategis yang diukur dalam 24 Indikator Kinerja Utama (IKU sampai dengan akhir tahun 2022). Nilai Akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target sasaran strategis yang tercapai.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2019-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 10 sasaran strategis.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menjabarkan target yang akan menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja Tahun 2022 disusun setelah APBD Kabupaten Lebak Tahun 2022 disahkan dan setelah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dirinci pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan	Poin	0,559
		Indeks Kesehatan	Persen	0,763
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	79
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,88
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	LPE	Persen	5
		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	24.214.000
		Daya Beli	Rupiah	8.914.000
		Tingkat Pengangguran	Persen	9.25
		Tingkat Kemiskinan	Persen	9.1
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	71,97
5	Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	Persen	5,2
6	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	70,35
7	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	75,86
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan	Presentase penurunaan angka kecelakaan lalulintas	Persen	4,58
9	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Persen	57,74
		Indeks Kualitas Air	Persen	52,7
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	42,08
10	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	Poin	83
		Opini BPK	Poin	WTP
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,645
		IKM terhadap Pelayanan Publik	Poin	80,28
		Indeks SPBE	Poin	3,6
		Sistem Merit	Poin	253
		Maturitas SPIP	Level	3

Sumber : PK Bupati tahun 2022

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing persepektif. Adapun penjelasan capaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan	0,559	0,569	101,78
		Indeks Kesehatan	0,763	0,734	96,19
		Indeks Pembangunan Gender	79	79,87	101,10
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88	1,85	101,6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	LPE	5	3,86	77,2
		PDRB Perkapita	24.214.000	23.342.143	96,39
		Daya Beli	8.914.000	8.854.000	99,32
		Tingkat Pengangguran	9,25	8,55	108,18
		Tingkat Kemiskinan	9,1	8,91	102,13
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	71,97	71,96	99,98
5	Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	5,2	4,60	88,46
6	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik	70,35	69,98	99,47
7	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar	75,86	77,28	101,87
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan	Presentase penurunaan angka kecelakaan lalulintas	4,58	4,35	94,97
9	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	57,74	79,92	138,41
		Indeks Kualitas Air	52,7	57,00	108,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,08	39,83	94,65
10	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan public	Nilai SAKIP	83	78,04	94,02
		Opini BPK	WTP	WTP	100
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,645	1,34	81,45
		IKM terhadap Pelayanan Publik	80,28	79,11	98,54
		Indeks SPBE	3,60	2,63	73,05
		Sistem Merit	253	264	104,34
		Maturitas SPIP	3	3	100

Sumber : Perbup RKPD dan data Bapelitbangda

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan sebelumnya selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tahun 2022. Pencapaian Kinerja secara rinci ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Th. 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia								
1	indeks pendidikan	Poin	0,55	0,55	100	0,559	0,569	101,78
2	indeks kesehatan	Persen	0,709	0,728	102,68	0,763	0,734	96,19
3	indeks Pembangunan Gender	Poin	78,89	79	100,14	79	79,87	101,10
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100.94			99.69
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.88	1,88	100	1,88	1,85	101,6
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100			101,6
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas								
1	LPE	Persen	5	2	40,00	5	3,86	77,2
2	PDRB Perkapita	Rupiah	23,00	23,00	100,00	24.214.000	23.342.143	96,39
3	Daya Beli	Rupiah	8.000.000	8.724.000	109,05	8.914.000	8.854.000	99,32
4	Tingkat Pengangguran	Persen	9,3	7,86	118,32	9,25	8,55	108,18
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,5	10,29	92,32	9,1	8,91	102,13
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					91,93			96,64
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	71,37	72,60	101,72	71,97	71,96	99,98
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					101,72			99,98
5. Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	Persen	5	5	100	5,2	4,60	88,46
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100			88,46
6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik								
1	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	69,81	69,61	99,71	70,35	69,98	99,47
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,71			99,47
7. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar								
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	75,73	77,35	102,13	75,86	77,28	101,87
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					102,13			101,87
8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan								
1	Presentase penurunaan angka kecelakaan lalulintas	Persen	4,38	4,38	100	4,58	4,35	94,97
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100			94,97
9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan								
1	Indeks Kualitas Udara	Persen	57,64	79,94	138,69	57,74	79,92	138,41
2	Indeks Kualitas Air	Persen	52,60	57,89	110,06	52,7	57,00	108,15

3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	39,91	39,76	99,62	42,08	39,83	94,65
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					116,12			113,73
10. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanaan Publik								
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2021**		**Capaian Kinerja Th. 2021 (%)**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**		**Target**	**Realisasi**	
1	Nilai SAKIP*)	Poin	78	78,00	100	83	78,04	94,02
2	Opini BPK*)	Poin	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,516	1,494	98,54	1,645	1,34	81,45
4	IKM Terhadap Pelayanan Publik	Poin	80,61	78,65	97,57	80,28	79,11	98,54
5	Indeks SPBE	Poin	3,55	2,86	80,56	3,60	2,63	73,05
6	Sistem Merit	Poin	251,5	251,5	100	253	264,00	104,34
7	Maturitaas SPIP	Level	3	3	100	3	3	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					96,66			92,89

Sumber : Perbup RKPD dan data Bapelitbangda
Keterangan:
**) indikator belum terdapat penetapan nilai/ indeks*

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 selain dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dareh (RPJMD) pada masing-masing persepektif. Adapun penjelasan capaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2 .8
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	SASARAN	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD-P	Capaian Target Akhir 2022 (%)
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (Sasaran 1)	Indeks Pendidikan	0,559	0,569	101,78	√	0,569	100
		Indeks kesehatan	0,763	0,734	96,19	◢	0,798	91,97
		Indeks Pembangunan Gender	79	79,87	101,10	√	79,22	100,82
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk (sasaran 2)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88	1,85	101,6	√	1,88	98,40
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (sasaran 3)	LPE	5	3,86	77,20	◢	5	77,2
		PDRB Perkapita	24.214.000	23.342.143	96,39	√	26.686.000	87,46
		Daya Beli	8.914.000	8.854.000	99,32	◢	9.120.000	97,08
		Tingkat Pengangguran Terbuka	9,25	8,55	108,18	√	8,5	100,58
		Tingkat Kemiskinan	9,1	8,91	102,13	√	8,9	100,11
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (sasaran 4)	Indeks Ketahanan Pangan	71,97	71,96	99,98	X	73,19	98,31
5	Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah (sasaran 5)	Kontribusi sector pariwisata pada PDRB	5,2	4,60	88,46	X	5,7	80,70

No	SASARAN	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD-P	Capaian Target Akhir 2022 (%)
6	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik (sasaran 6)	Indeks Infrastruktur Publik	70,35	69,98	99,47	▲	71,12	98,39
7	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar (sasaran 7)	Indeks Infrastruktur Dasar	75,86	77,28	101,87	√	76,47	101,05
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan (sasaran 8)	Presentase penurunaan angka kecelakaan lalulintas	4,58	4,35	94,97	X	5,04	86,30
9	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan (sasaran 9)	Indeks Kualitas Udara	57,74	79,92	138,41	√	57,94	137,93
		Indeks Kualitas Air	52,7	57,00	108,15	√	52,90	107,75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,08	39,83	94,65	▲	46,44	85,76
10	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik (sasaran 10)	Nilai SAKIP	83	78,04	94,02	▲	90	
		Opini BPK	WTP	WTP	100	√	WTP	100
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,645	1,34	81,45	X	1,797	74,56
		IKM terhadap Pelayanan Publik	80,28	79,11	98,54	▲	81,97	96,51
		Indeks SPBE	3,60	2,63	73,05	X	3,70	71,08
		Sistem Merit	253	264,00	104,34	√	257,5	102,52
		Maturitas SPIP	3	3	100	√	3	100

Sumber : Perbup RKPD dan data Bapelitbangda

Keterangan Status Capaian :

1. *Realisasi Kinerja ≥Target Kinerja: Mencapai/Melampaui Target (√)*
2. *Realisasi Kinerja <Target Kinerja, tetapi > Realisasi Tahun Sebelumnya: Tidak Mencapai Target, tetapi Meningkat (▲)*
3. *Realisasi Kinerja <Target Kinerja : Tidak Mencapai Target (X)*

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2.9
Analisis Pencapaian Sasaran

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (Sasaran 1)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,559	0,569	101,78
2	Indeks Kesehatan	Persen	0,763	0,734	96,19
3	Indeks Pembangunan Gender	Poin	79	79,87	101,10
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,69
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk (sasaran 2)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,88	1,85	101,6
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					101,6
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (sasaran 3)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	LPE	Persen	5	3,86	77,2
2	PDRB Perkapita	Rupiah	24.214.000	23.342.143	96,39
3	Daya Beli	Rupiah	8.914.000	8.854.000	99,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,25	8,55	108,18
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,1	8,91	102,13
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					96,64
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (sasaran 4)					

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Th. 2022 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	71,97	71,96	99,98
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,98
5. Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah (sasaran 5)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	Persen	5,2	4,60	88,46
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					88,46
6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik (sasaran 6)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	70,35	69,98	99,47
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,47
7. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar (sasaran 7)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	75,86	77,28	101,87
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					101,87
8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan (sasaran 8)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Presentase penurunaan angka kecelakaan lalulintas	Persen	4,58	4,35	94,97
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					94,97
9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan (sasaran 9)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Indeks Kualitas Udara	Persen	57,74	79,92	138,41
2	Indeks Kualitas Air	Persen	52,7	57,00	108,15
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	42,08	39,83	94,65
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					113,73
10. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik (sasaran 10)					
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun 2022**		**Capaian Kinerja Th. 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	
1	Nilai SAKIP	Poin	83	78,04	94,02
2	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	100
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,645	1,34	81,45
4	IKM terhadap Pelayanan Publik	Poin	80,28	79,11	98,54
5	Indeks SPBE	Poin	3,60	2,63	73,05
6	Sistem Merit	Poin	253	264,00	104,34
7	Maturitas SPIP	Poin	3	3	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					92,89

Sumber : Perbup RKPD dan data Bapelitbangda

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja program/kegiatan serta indikator sasaran sebagaimana table 2.9 di atas, digunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. 91% ≤ 100% : Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% : Tinggi
3. 66% ≤ 75% : Sedang
4. 51% ≤ 65% : Rendah
5. ≤ 50 : Sangat Rendah

Dari table 2.9 di atas diperoleh data terdapat 24 indikator sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Terdapat 20 indikator sasaran atau 83,33% yang berperingkat kinerja **sangat tinggi**;
2. Terdapat 3 indikator sasaran atau 12,5% yang berperingkat kinerja **tinggi**;
3. Terdapat 1 indikator sasaran atau 4,16% yang berperingkat kinerja **sedang**;

4. Rata-rata realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 mencapai 98,93 atau berperingkat kinerja **sangat tinggi**.

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut, sesuai data RKPD tahun 2022, tidak terlepas dari dilaksanakan 111 program pembangunan dengan 4 prioritas pembangunan tahun 2022 yaitu : 1) Peningkatan kualitas Sumber daya manusia, 2) Peningkatan Daya Saing daerah dan pemerataan pembangunan, 3) Pertumbuhan ekonomi inklusif, 4) Pemantapan tatakelola pemerintahan.

Pada table 2.9 menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki 10 sasaran strategis dengan 24 indikator sasaran. Dari 10 sasaran strategis tersebut, terdapat 1 sasaran yakni tumbuhnya sektor pariwisata daerah yang rata-rata pencapaiannya paling rendah dibanding sasaran lainnya yaitu 88,46%. Hal ini dikarenakan meskipun kondisi ekonomi secara perlahan sudah mulai pulih pada tahun 2022, namun belum cukup kuat mengangkat kontribusi sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena pada tahun 2022 pemerintah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati pantai selatan karena rawan gempa dan sunami.

Table 2.9 juga menunjukan bahwa 1 indikator dari 24 indikator sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik yakni indeks SPBE memperoleh capaian paling rendah yaitu 73,05%. Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2022 ini disebabkan SPBE Kabupaten Lebak : 1) belum ada rencana induk dan master plan SPBE, 2) belum ada kebijakan dan dokumen; tata Kelola, arsitektur, peta rencana, proses bisnis SPBE, 3) belum ada regulasi dan manajemen SPBE, 4) belum ada perencanaan strategis dan anggaran SPBE, serta 5) belum ada tim koordinasi lintas Perangkat Daaerah.

Rendahnya Indeks SPBE ini menjadi perhatian Bupati Lebak untuk tahun 2023 yaitu melalui resolusi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 yang terdiri lima hal yaitu 1) Menerapkan Tanda Tangan Elektornik, 2) Absensi Online, 3) Aplikasi Srikandi, 4) e-Katalog Lokal dan 5) SIPD Online dan KKPD. Melalui resolusi 2023 dimaksud, diharapkan Indeks SPBE Kabupaten Lebak tahun 2023 mengalami peningkatan indeks.

Secara umum sebagian besar capaian sasaran telah tercapai dengan baik sehingga rata-rata pencapaian kinerja di Kabupaten Lebak berperingkat sangat tinggi atau 98,93% sebagaimana skala nilai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Oleh Karena itu, laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta menyusun pedoman pelaksanaannya berdasar masing–masing Kementerian/Lembaga/ Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 disamping menyelenggarakan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menerima 5 (lima) DIPA Tugas Pembantuan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi). Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 berasal dari :

A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 047.01.1.664958/2022 Digital Stamp: 5810-9900-6944-5931 Revisi ke-05 Tanggal 05 Juli 2022 yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Perlindungan

Perempuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

B. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 047.01.1.664962/2022 Digital Stamp: 2103-3082-0141-8606 Revisi ke-04 Tanggal 07 Juli 2022 yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Perlindungan Khusus Anak yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

C. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2022, dan Peraturan BKKBN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Keluarga Berencana (KB) yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

D. Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Satker Provinsi Banten Nomor : SP-DIPA/ 018.03.4.299380/2022 dengan total anggaran sebesar Rp.1.463.500.000,- merupakan Tugas Pembantuan Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten Lebak dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

E. Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Satker Provinsi Banten Nomor : SP-DIPA/ 018.04.3.299005/2022 dengan total anggaran sebesar Rp.405.000.000,- merupakan Tugas Pembantuan Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten Lebak dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia.

3.1.1. Target Kinerja

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

   Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 047.01.1.664958/2022 Digital Stamp: 5810-9900-6944-5931 Revisi ke-05 Tanggal 05 Juli 2022 dengan total anggaran Rp.200.044.000,- adalah sebagai berikut :

   a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

   Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 SP DIPA- 047.01.1.664962/2022 Digital Stamp: 2103-3082-0141-8606 Revisi ke-04 Tanggal 07 Juli 2022 dengan total anggaran Rp.401.756.000,- adalah sebagai berikut :

   a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
   b. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
   c. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah.

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia

   Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2022, dan Peraturan BKKBN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran Rp.14.753.738.600,- adalah sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
   b. Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten.

3.1.2. Realisasi

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

   Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.194.691.950,- atau 97,32% . Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat

capaiannya adalah 100%.

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

   Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.379.092.588,- atau 94,85%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia

   Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.13.602.056.575,- atau 92,19%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dapat kami sajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1.	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**SP DIPA-047.01.1.664958/2022 DS:5810-9900-6944-5931 Revisi ke-05 Tanggal 05 Juli 2022**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**200,044,000**	**194,691,950**	**97,32**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	**100**
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			**100,000,000**	**100,000,000**	**100**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	**100**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lebak	DP3AP2KB	100,000,000	100,000,000	100	1 Dokumen	100
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			**100,044,000**	**94,691,950**	**94,65**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	**100**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lebak	DP3AP2KB	100,044,000	94,691,950	94,65	1 Layanan	100
2.	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**SP DIPA-047.01.1.664962/2022 DS:2103-3082-0141-8606 Revisi ke-04 Tanggal 07 Juli 2022**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**401,756,000**	**379,092,588**	**94,85**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			**50,450,000**	**50,450,000**	**100**	**100% Presentase Penanganan Kasus**	

									Kekerasan Anak	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lebak	DP3AP2KB	50,450,000	50,450,000	100	1 Dokumen	
			Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**249,000,000**	**239,536,662**	**96,20**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	**100**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lebak	DP3AP2KB	249,000,000	239,536,662	96,20	1 Layanan	100
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**102,306,000**	**89,105,926**	**87,10**	**100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak**	**100**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lebak	DP3AP2KB	102,306,000	89,105,926	87,10	3 Dokumen	100
3.	**BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA REPUBLIK INDONESIA**	**Peraturan BKKBN RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2022, dan Peraturan BKKBN RI**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**			**14,753,738,600**	**13,602,056,575**	**92,19**	**100% TFR**	**100**
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb di Daerah Kabupaten/Kota			**14,753,738,600**	**13,602,056,575**	**92,19**	**100% TFR**	**100**
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)	DP3AP2KB	DP3AP2KB	2,005,278,000	1,840,930,375	91,80	28 Kecamatan	100%
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (DAK Non Fisik BOKB)	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12,748,460,600	11,761,126,200	92,25	4954 Akseptor	100%

		Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022								

Sumber : DP3AP2KB Kab. Lebak.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Dinas Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Dinas Provinsi yang memberikan penugasan. Dinas Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 adalah Dinas Pertanian Provinsi Banten.

3.2.1. Target Kinerja

1. Dinas Pertanian Provinsi Banten

   Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Satker Provinsi Banten Nomor : SP-DIPA/018.03.4.299380/2022 dengan total anggaran sebesar Rp.1.463.500.000,- adalah sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan (Kawasan Ubi Kayu) seluas 100 Ha;
   b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) seluas 200 Ha;
   c. Kegiatan Pengelolaan Sistem perbenihan Tanaman Pangan Area penyaluran Benih Padi seluas 2500 Ha;
   d. Kegiatan Pengelolaan Sistem perbenihan Tanaman Pangan Area penyaluran Benih Jagung (PEN) seluas 400 Ha.

2. Dinas Pertanian Provinsi Banten

   Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Satker Provinsi Banten Nomor : SP-DIPA/ 018.04.3.299005/2022 dengan total anggaran sebesar Rp.405.000.000,- adalah sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bantuan Sarana Pasar Lelang/Pasar Tani (Motor Roda 3 Box) sebanyak 1 unit;
   b. Kegiatan Penigkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat (Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah) seluas 10 Ha;
   c. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat (Bantuan Sarana Produksi Kawasan Cabai) seluas 20 Ha;
   d. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat (Bantuan Sarana Produksi Tanaman Obat (Lengkuas) seluas 10 Ha.

3.2.2. Realisasi

1. Dinas Pertanian Provinsi Banten

   Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.1.374.750.000,- atau 93,94%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

2. Dinas Pertanian Provinsi Banten

   Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.401.536.440,- atau 99,14%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1.	**DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN**	**SP- DIPA/ 018.03.4.299 380/2022 Satker Dinas Pertanian Provinsi Banten**	**PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS**			**1.463.500.000**	**1.374.750.000**	**93,94**	**100%**	**100**
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan (Kawasan Ubi Kayu)	1. Kec. Curugbitung 2. Kec. Sajira 3. Kec. Cileles 4. Kec. Gunungkencana 5. Kec. Kalanganyar 6. Kec. Maja	Dinas Pertanian	210.000.000	201.250.000	95,83	100 Ha	100
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	1. Kec. Cirinten 2. Kec. Curugbitung 3. Kec. Sajira 4. Kec. Cimarga 5. Kec. Cibadak	Dinas Pertanian	314.000.000	309.625.000	98,61	200 Ha	100
			Kegiatan Pengelolaan Sistem perbenihan Tanaman Pangan (1. Area penyaluran Benih Padi 2. Area penyaluran Benih Jagung (PEN))	**Area penyaluran Benih Padi** 1. Kec. Sajira 2. Kec. Curugbitung 3. Kec. Gunungkencana 4. Kec. Cileles 5. Kec. Panggarangan 6. Kec. Cirinten 7. Kec. Kalanganyar 8. Kec. Muncang 9. Kec. Cipanas 10. Kec. Cikulur 11. Kec. Maja	Dinas Pertanian	687.500.000	611.875.000	89,00	2.500 Ha	100
				Area penyaluran Benih Jagung (PEN) 1. Kec. Maja	Dinas Pertanian	252.000.000	252.000.000	100,00	400 Ha	100
2.	**DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN**	**SP DIPA - 018.04.3.299 005/2022 Satker Dinas Pertanian Provinsi Banten**	**PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING HORTIKULTURA**			**405.000.000**	**401.536.440**	**99,14**	**100%**	**100**
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bantuan Sarana Pasar Lelang/ Pasar Tani (Motor Roda 3 Box)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	65.000.000	62.600.000	96,31	1 Unit	100
			Kegiatan Penigkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat	Kec. Malingping	Dinas Pertanian	60.000.000	59.709.340	99,52	10 Ha	100

			(Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah)							
			Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat (Bantuan Sarana Produksi Kawasan Cabai)	Kec. Malingping dan Kec. Bayah	Dinas Pertanian	220.000.000	219.492.100	99,77	20 Ha	100
			Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran Tanaman Obat (Bantuan Sarana Produksi Tanaman Obat (Lengkuas)	Kec. Maja	Dinas Pertanian	60.000.000	59.735.000	99,56	10 Ha	100

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak

3.3. Permasalahan dan Kendala

1. DP3AP2KB

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian kinerja Tugas Pembantuan (TP) adalah terkait penyerapan total hanya mencapai Rp.14.175.841.113,- atau 92,31% dari yang ditargetkan sebesar Rp.15.355.538.600,- atau 100% mengalami kesenjangan 7,69%. Hal tersebut tidak tercapai berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi faktor penghambat pelayanan DP3AP2KB sebagai berikut :

a. Adanya pergantian anggota Tim Pendamping Keluarga yang disebabkan oleh pergantian Kepala Desa di masing-masing wilayah yang menyebabkan terhambatnya penyerapan kuota internet data surveillance selama 3 (tiga) bulan dikali 1068 Tim Pendamping Keluarga dengan masing-masing tim terdiri atas 3 (tiga) orang;
b. Terbatasnya SDM yang mempuni di DP3AP2KB dalam Pengolahan Data Makro-Mikro terkait pendataan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Kurangnya Tenaga PLKB di tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Masih rendahnya kesertaan KB Pria;
e. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pengelola Program KKBPK lini lapangan (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB);
f. Masih terbatasnya kemampuan pengurus kelompok BKB, BKR, BKL dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga;
g. Masih lemahnya koordinasi antara tim penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
h. Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak karena kurangnya Tenaga dan Akses jalur lintas ke lokasi kasus terjadi.

2. Dinas Pertanian

Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan petunjuk teknis kegiatan, tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Pelaksanaan pengadaan barang melalui E-purchasing berjalan dengan lancar dan sesuai spesifikasi serta berjalan dengan baik.

3.4. Saran dan Tindaklanjut

1. DP3AP2KB

Adapun rencana tindaklanjut terkait permasalahan diatas adalah perkiraan daripada program dan kegiatan yang direncakan dalam rencana kerja di Tahun berikutnya memperhatikan evaluasi hasil renja di Tahun sebelumnya dengan perencanaan yang matang dan lebih baik lagi. Lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun anggaran 2023, sehingga meminimalisir kesenjangan anggaran yang sudah ditargetkan dengan realisasi yang ada.

2. Dinas Pertanian

Untuk tindaklanjut luasan kegiatan dan jumlah anggaran TP untuk Kabupaten Lebak agar dapat ditambah dimasa mendatang.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerapkan 6 (enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Laporan pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial dilaporkan sebagai berikut :

4.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pendidikan Dasar	83,044	83,044	100
2	Pendidikan Kesetaraan	242,797	242,797	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	61,629	61,629	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang berhasil dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pendidikan Dasar	83,044	35,605	42,87	
2	Pendidikan Kesetaraan	242,797	237,297	97,73	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	61,629	8,185	13,28	

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.286.541.756.543,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.266.293.950.932,- atau 92.93%.

E. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan melibatkan seluruh Bidang, Sub Bagian, Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan, Penilik TK dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan Sahabat Dikmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2022

No	Uraian	Golongan				Jml	Kualifikasi					Jml
		I	II	III	IV		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas				1	1	1					1
2	Sekretaris Dinas				1	1	1					1
3	Kepala Bidang			1	2	3	2	1				3
4	Kepala Sub Bagian			3		3	1	2				3
5	Kepala Seksi			15		15	1	14				15
3	UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)			4		4		4				4
4	Pengawas SD			3	64	67		67				67
5	Pengawas SMP				14	14	7	7				14
6	Pelaksana		13	20		33	2	18	6	7		33
7	Tenaga Non ASN					23		17		7		23
	Jumlah					164						164

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah

satuanpendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kementerian Agama RI;

b. Dampak dari inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dalam memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara maksimal karena belum teranggarkan secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2022.

2. Solusi

a. Solusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama RI terkait data Kementerian Agama RI dan Bidang PAUD;

b. Mengoptimalkan kinerja Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing-masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).

4.2. Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodefici ency Virus*).

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.448	24.448	100
2	Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin	23.337	23.337	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.226	22.226	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	108.580	108.580	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	224.816	224.816	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	802.020	802.020	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.909	150.909	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	283.826	283.826	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.160	18.160	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.861	1.861	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.017	15.017	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodefici ency Virus*)	26.974	26.974	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang berhasil dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.448	22.250	91,01	
2	Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin	23.337	20.330	87,11	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.226	21.583	97,11	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	108.580	111.280	102,49	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	224.816	223.509	99,42	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	802.020	743.765	92,74	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.909	131.828	87,36	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	283.826	260.391	91,74	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.160	16.660	91,74	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.861	1.765	94,84	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.017	19.281	128,39	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodefici ency Virus*)	26.974	24.790	91,90	

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh OPD induk Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.366.921.667.927,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.321.251.929.018,- atau 87.55%.

E. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak didukung oleh sebanyak 2.037 personil pegawai yang terdiri dari :

1. 1.035 orang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. 1.002 orang Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permaslahan
   a. Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik;
   b. Perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kabupaten Lebak yang sangat cepat sehingga menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada ibu hamil ataupun bayi baru lahir;
   c. Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik;
   d. Perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Lebak yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor;
   e. Masih terdapat Ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya di luar wilayah Kabupaten Lebak sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong Kesehatan;
   f. Pelatihan dan pembinaan penanggung jawab program balita (MTBS/SDIDTK);
   g. Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas;
   h. Pelayanan kesehatan pada usia produktif belum optimal;
   i. Rotasi/mutasi pegawai menyebabkan pemahaman pelayanankesehatan lansia terbatas;
   j. Terbatasnya Posbindu Lansia;
   k. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining

kesehatansehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi;

l. Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin;
m. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin diabetes melitus;
n. Kunjungan kesehatan jiwa menurun karena pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas.

2. Solusi
   a. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e-kohort);
   b. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu hamil dan Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA;
   c. Melakukan pelayanan sesuai acuan kemenkes di masa pandemi (Pedoman Pelayanan Kepada Ibu hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahirdi Masa Pandemi);
   d. Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporanibu bersalin;
   e. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri/faskes lainnya dalam pelayanan KIA;
   f. Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya;
   g. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis;
   h. Penambahan BHP dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll;
   i. Pelatihan dan pembinaan petugas penanggungjawab program kesehatan lansia;
   j. Optimalisasi dan penambahan posbindu lansia;
   k. Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, pabrik untuk melakukan skrining di tempat usahanya.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Penyediaa Pelayanan Pengolaha Air Limbah Domestik.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target

Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	65,60	65,60	100
2	Penyediaa Pelayanan Pengolaha Air Limbah Domestik	73,07	73,07	100

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang berhasil dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	65,6	73,38	111,86	
2	Penyediaa Pelayanan Pengolaha Air Limbah Domestik	73,07	72,92	99,79	

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.19.142.561.250,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.18.492.636.807,- atau 96,60%.

E. Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 180 orang dan 116 orang status Non PNS, berikut data personil sesuai dengan jenis dan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PUPR 2022

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
A	**PNS**	**180**
1	Eselon :	
	a. II	1
	b. III	6
	c. IV	13
2	Jabatan Fungsional	11
3	Pangkat/golongan	
	a. IV	9
	b. III	57
	c. II	75
	d. I	39
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S3	-
	b. S2	10
	c. S1/DIV	49
	d. SM / D.I / D.III	1
	e. SMA Sederajat	7
	f. SMP Sederajat	1
	g. SD Sederajat	79
B	**Non PNS**	**116**
	a. S1/DIV	41
	b. SM / D.I / D.III	2
	c. SMA Sederajat	55
	d. SMP Sederajat	18

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
   a. Tangki Saptik :
      1) Masyarakat yang belum memiliki MCK biasanya berdomisili di daerah terpencil sehingga susah diakses kendaraan tangki tinja (roda 3);
      2) Kesadaran masyarakat untuk memelihara masih kurang;
      3) Akses air bersih di Kabupaten Lebak belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa tempat.
   b. IPAL :
      1) Kesulitas lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk;
      2) Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya;
      3) Lokasi lahan di bagian hilir pemukiman dan tidak ada akses jalan untuk droping material maupun penyedotan lumpur tinja;
      4) Kesadaran Masyarakat pengguna untuk merawat greas trap maupun bak control masih kurang.
2. Solusi
   a. Tangki Saptik :

1) Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa di lewati kendaraan roda 3;
2) Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola fikir;
3) Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi.

b. IPAL **:**

1) Lahan kalau bisa di fasilitasi pihak desa atau daerah mengingat dibeberapa tempat sangat membutuhkan;
2) Penggunaan jalan lingkungan sepanjang akses lalu lintas bisa di alihkan atau ada alternatif akses jalan masyarakat;
3) Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat teredukasi;
4) Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) IPAL dilakukan secara berkala dan terjadwal sehingga kinerja IPAL tetap bisa di kontrol;
5) Desa memperbanyak akses jalan ke pemukiman masyarakat.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	8	8	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	100

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang berhasil dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	8	8	100	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	100	

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.170.200.000,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.170.200.000,-,00 atau 100,00%. Adanya keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak hanya menyediakan anggaran sampai pada pengadaan dan pematangan lahan untuk relokasi rumah korban bencana.

E. Dukungan Personil

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh 22 Orang PNS dan 27 Orang Non PNS, dengan dukungan pejabatan esselon sebagai berikut :

Tabel 4.11
Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PRKPP 2022

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
A	**PNS**	**22**
1	Eselon :	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	2
	d. IV a	8
2	Non Esselon	10
B	**Non PNS**	**27**
Total		**49**

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak

F. Permasalahan dan Solusi
   1. Permasalahan
      a. Terbatasnya anggaran pada APBD Kabupaten Lebak;
      b. Terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak.
   2. Solusi
      a. Penambahan anggaran utuk kegiatan pemenuhan SPM Perumahan Kabupaten Lebak;
      b. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementrian PUPR;
      c. Penambahan personil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	99	99	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.308.000	1.308.000	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100

4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100

Sumber : Laporan SPM Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhasil dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	99	99	100,00	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.308.000	13	0,99	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	80	80,00	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100,00	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	75	75,00	

Sumber : Laporan SPM Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.4.834.103.500,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.4.541.110.792,- atau 93,94%.

E. Dukungan Personil

Personil yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak belum dapat mengakomodir seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Personil Sat Pol PP Dan Damkar Lebak saat ini baru mencapai 143 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 53 Orang, Tenaga Bantu Jasa Keamanan dan Ketertiban Umum atau biasa disebut Ban Pol PP sebanyak 82 Orang dan *Supporting Staff* sebanyak 9 orang (Tenaga Administrasi).

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 sebanyak 48 orang terdiri dari PNS : 11 orang, Sukwan/Honorer : 9 orang dan Tenaga Koordinator Tingkat Kecamatan : 28 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1) Belum terpenuhinya standar jumlah SDM, khususnya petugas Satpol PP Dan Damkar yang dilantik dalam jabatan fungsional dan juga ketersediaan sarpras pendukung minimal sesuai permendagri menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan mutu pelayanan SPM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2) Kegiatan dan anggaran belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD, renstra dan renja OPD, khususnya terkait dengan anggaran pendukung pelayanan ganti kerugian akibat dampak pelaksanaan penegakan perda sehingga belum dapat mendukung pelayanan secara optimal. Selain itu terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung dilaksanakan secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
3) Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indicator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan tersebut sehingga kesulitan dalam penuangan laporan.

b. Sub Urusan Kebakaran

1) Untuk mencapai respontime 15 menit masih diperlukan tambahan pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), sehingga ke depan perlu menambah kekurangan tersebut;
2) Sebagian besar usia kendaraan Pemadam Kebakaran dan *rescue*;
3) Kondisi kepadatan lalu lintas, lebar ruas jalan, akses jalan masuk kendaraan Pemadam Kebakaran yang menghambat mobilitas menuju lokasi kejadian kebakaran sehingga ke depan akses masuk kendaraan Pemadam Kebakaran perlu dibuka agar memudahkan kendaraan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kejadian kebakaran;
4) Personil yang ada belum memenuhi standar minimal kebutuhan pada setiap pos WMK dan kualifikasi minimal setiap personal sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan sesuai standar.

c. Sub Urusan Urusan Bencana

Ada beberapa indikator SPM Bidang Urusan Bencana yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan program/

kegiatan sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target salah satunya yaitu persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal dan persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal sehingga tidak bisa mentukan target dan realisasi. Selain tersebut di atas banyak permasalahan yang kurang mendukung pada tercapainya SPM Bidang Bencana sebagai berikut :

1) Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
2) Luasnya wilayah penanganan bencana;
3) Sosialisasi dan edukasi pemahaman tanggap bencana kepada penduduk di daerah rawan bencana belum optimal;
4) Kelembagaan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kelas masih tipe C;
5) Peralatan logistik sarana prasarana belum memadai dalam mendukung penanggulangan bencana;
6) Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB) mitigasi belum tersedia;
7) Personil sumber daya manusia penyelenggaraan penanggulangan bencana belum memadai;
8) Ketersediaan gudang logistik dan tempat penyimpanan sarana prasarana peralatan penangulangan bencana belum memadai baru tersedia 1 (satu) unit/ruangan;
9) Keterbatasan pengalokasian anggaran pendukung kegiatan SPM belum memadai;
10) Belum tersedianya SDM Operasional Pengeloalan Data dan Informasi (PUSDALOP);
11) Peralatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana masih terbatas.

2. Solusi
   a. Memaksimalkan potensi yang dimiliki baik itu sarana dan prasana maupun personil yang ada dalam menangani permasalahan di masyarakat;
   b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Instansi lainnya (Pemprop. Banten, TNI, POLRI, dll) yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara efektif dan komprehensif;
   c. Meningkatkan kekuatan yang dibutuhkan, baik dari segi anggaran, jumlah personil maupun sarana dan prasarana agar tercapai rasio yang sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kapasitas melalui diklat formil maupun informal;
   d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dengan Pol PP Kecamatan (Kasi

Trantibum sebagai Ka Satpol PP Kecamatan) dan Anggota Satlinmas Desa sebagai motor penggeraknya;

e. Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, adapun langkah-langkah yang haru ditempuh untuk tercapainya SPM Bidang Bencana sebagai berikut :
   1) Dibuatkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana gunanya untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaran penanganan bencana;
   2) Dokumen tematik seberan daerah rawan bencana;
   3) Dokumen kajian mitigasi bencana dibuatkan;
   4) Sering melakukan sosialisasi, pelatihan, simulasi penanggulangan bencana alam untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   5) Usulan penambahan personil penanggulangan bencana;
   6) Usulan penambahan pengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mendukung penerapan dan pencapian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   7) Usulan penambahan peralatan logistik sarana dan prasarana operasional penanganan bencana;
   8) Ketersediaan logistik kebutuhan dasar yang mencukupi;
   9) Mengoperasikan PUSDALOP.

4.6. Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	4.239	4.239	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	135	135	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	70	70	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan	15	15	100
5	Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	550	550	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial yang berhasil dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	4.239	4.239	100,00	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	135	135	100,00	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	70	70	100,00	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan	15	15	100,00	
5	Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	550	495	80,00	

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.8.112.631.250,- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.7.786.870.750,- atau 95,98%.

E. Dukungan Personil

Tenaga Sosial di Kabupaten lebak berjumlah 255 orang, dengan latarbelakang profesi dan tempat kerja yang berbeda, untuk lebih jelas dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.16
Jumlah Tenaga Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2022

No.	Jenis Tenaga	Tempat Kerja		
		Dinas Sosial	Kecamatan	Lapangan
1	PNS Eselon IV.a	10		
2	PNS Eselon III.a	2		
3	PNS Eselon III.b	1		
4	PNS Eselon II.b	1		
5	Non Struktural	8		
6	Honorer	24		
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		28	
8	Koordinator TKSK		1	
9	Tenaga Pekerja Sosial (Peksos)	3		2
10	Pendamping PKH		173	
Jumlah		37	216	2
		255		

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
   a. Internal
      1) Anggaran yang tersedia di dinas sosial belum sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
      2) Ketersediaan sarana dan pra sarana belum sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
   b. Eksternal
      1) Kurangnya koordinasi dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
      2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Solusi
   a. Internal
      1) Mengajukan anggaran sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
      2) Mengajukan sarana dan pra sarana sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
   b. Eksternal
      1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD lain melalui sosialisasi lintas OPD;
      2) Mempublikasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

melalui media cetak dan media sosial.

4.7. Program dan Kegiatan

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Lebak melalui 7 Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM dengan menerapkan 6 (Enam) bidang urusan SPM dengan rincian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM, sebagai berikut :

Tabel 4.17
Program dan Kegiatan Penunjang SPM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	**286.541.756.543**	**266.293.950.932**	**92,93**
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**286.541.756.543**	**266.293.950.932**	**92,93**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**142.190.752.157**	**136.340.791.999**	**95,89**
Penambahan Ruang Kelas Baru	980.746.200	953.524.000	97,22
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	185.963.000	182.037.000	97,89
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	304.200.000	293.122.000	96,36
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	696.000.000	671.996.000	96,55
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	715.000.000	699.432.000	97,82
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.286.034.400	10.870.321.400	96,32
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	769.440.000	739.041.000	96,05
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	40.000.000	39.118.000	97,80
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	382.790.000	371.767.000	97,12
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	131.520.000	125.896.000	95,72
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.715.000.000	2.714.337.900	99,98
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	66.210.000	66.210.000	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	117.010.000	90.166.000	77,06
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	123.800.838.557	118.523.823.699	95,74
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**119.276.903.727**	**105.195.400.404**	**88,19**
Penambahan Ruang Kelas Baru	548.915.900	537.346.750	97,89
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	912.449.000	882.673.000	96,74
Pembangunan Laboratorium	12.917.500.000	12.469.212.000	96,53
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.257.298.000	11.816.830.000	96,41
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.959.726.850	9.534.862.090	95,73
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	275.566.000	183.122.100	66,45
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	275.500.000	261.363.000	94,87
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.065.536.000	1.026.903.100	96,37

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	508.979.000	446.787.900	87,78
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.560.040.000	4.648.600.000	83,61
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	55.000.000	52.064.000	94,66
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	70.675.000	68.825.000	97,38
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	74.869.717.977	63.266.811.464	84,50
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**18.647.697.660**	**18.368.629.130**	**98,50**
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.660.631.200	2.452.664.730	92,18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	15.987.066.460	15.915.964.400	99,99
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**6.426.402.999**	**6.389.129.399**	**99,42**
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	582.265.000	565.729.399	97,16
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	30.000.000	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.814.137.999	5.793.400.000	99,64
SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN	**366.921.667.927**	**321.251.929.018**	**87,55**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**258.177.041.769**	**222.517.244.847**	**86,19**
Peningkatan Pelayanan BLUD	**258.177.041.769**	**222.517.244.847**	**86,19**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	258.177.041.769	222.517.244.847	86,19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**93.517.303.818**	**83.982.864.829**	**89,80**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	**23.724.837.800**	**22.118.606.721**	**93,23**
Pengembangan Puskesmas	647.933.000	626.150.000	96,64
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.561.880.200	9.636.204.763	91,24
Pengadaan Obat, Vaksin	6.629.692.162	6.421.684.558	96,86
Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.885.332.438	5.434.567.400	92,34
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	**69.098.561.018**	**61.373.763.895**	**88,82**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	570.215.440	559.201.520	98,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.614.405.800	268.772.236	16,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.540.000	30.200.000	98,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	631.606.850	451.735.576	71,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	181.559.400	156.570.500	86,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150.000.000	150.000.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.359.000	33.465.000	97,40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	123.000.000	102.983.000	83,73

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	95.053.200	91.301.000	96,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	175.442.888	131.715.000	75,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	56.613.200	53.994.000	95,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	192.110.800	186.142.725	96,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.227.645.000	3.202.632.600	99,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	348.719.760	274.758.484	78,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	41.000.000	40.000.000	97,56
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	520.270.130	454.224.340	87,31
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	50.000.000	35.200.000	70,40
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	57.000.000	29.889.200	52,44
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	247.491.050	194.136.048	78,44
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.440.305.250	29.417.929.360	96,64
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.373.016.250	799.485.500	58,23
Operasional Pelayanan Puskesmas	28.938.207.000	24.709.427.806	85,39
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	**693.905.000**	**490.494.213**	**70,69**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	693.905.000	490.494.213	70,69
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**14.476.802.540**	**14.186.726.942**	**98,00**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	**14.073.802.540**	**13.836.815.330**	**98,32**
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	14.073.802.540	13.836.815.330	98,32
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tk Daerah Kab/Kota	**403.000.000**	**349.911.612**	**86,83**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	403.000.000	349.911.612	86,83
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**225.618.500**	**98.824.000**	**43,80**
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**118.840.100**	**83.890.000**	**70,59**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	118.840.100	83.890.000	70,59

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Mamin Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**106.778.400**	**14.934.000**	**13,99**
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	106.778.400	14.934.000	13,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**524.901.300**	**466.268.400**	**88,83**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	**181.257.500**	**170.010.000**	**93,79**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	181.257.500	170.010.000	93,79
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**343.643.800**	**296.258.400**	**86,21**
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	343.643.800	296.258.400	86,21
SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**19.142.561.250**	**18.492.636.807**	**96,60**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**10.732.292.050**	**10.114.528.607**	**94,24**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**10.732.292.050**	**10.114.528.607**	**94,24**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	509.139.000	456.737.850	89,71
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	476.380.450	438.321.000	92,01
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.746.772.600	9.219.469.757	94,59
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**8.410.269.200**	**8.378.108.200**	**99,62**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**8.410.269.200**	**8.378.108.200**	**99,62**
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	8.410.269.200	8.378.108.200	99,62
SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	**170.200.000**	**170.200.000**	**100,00**
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**170.200.000**	**170.200.000**	**100,00**
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**170.200.000**	**170.200.000**	**100,00**
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	170.200.000	170.200.000	100,00
SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**4.834.103.500**	**4.541.110.792**	**93,94**
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**725.050.000**	**723.957.000**	**99,85**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**563.950.000**	**562.857.000**	**99,81**
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	94.300.000	94.289.000	**99,99**
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	449.400.000	448.318.000	**99,76**
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.250.000	20.250.000	**100,00**
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**161.100.000**	**161.100.000**	**100,00**
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000	150.000.000	**100,00**
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11.100.000	11.100.000	**100,00**
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**164.569.000**	**126.729.000**	**77,01**
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**164.569.000**	**126.729.000**	**77,01**
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.100.000	5.180.000	**51,29**
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.469.000	121.549.000	**78,69**
Program Penanggulangan Bencana	**3.944.484.500**	**3.690.424.792**	**93,56**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**786.975.500**	**738.941.897**	**93,90**
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Edokasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	786.975.500	738.941.897	93,90
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**1.777.135.000**	**1.703.837.946**	**95,88**
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsaigaan terhadap bencana	1.527.950.000	1.466.582.946	95,98
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	249.185.000	237.255.000	95,21
Pelayanan Penyelametan dan Evakuasi Korban Bencana	**1.380.374.000**	**1.247.644.949**	**90,38**
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota	204.294.000	194.661.000	95,28
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	1.176.080.000	1.052.983.949	89,53
SPM BIDANG URUSAN SOSIAL	**8.112.631.250**	**7.786.870.750**	**95,98**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**421.253.000**	**417.598.000**	**99,13**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**421.253.000**	**417.598.000**	**99,13**
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.375.000	97.320.000	98,93
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	322.878.000	320.278.000	99,19
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**321.874.000**	**297.474.000**	**92,42**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**78.060.000**	**53.660.000**	**68,74**
Penyediaan Permakanan	26.360.000	26.360.000	100,00
Penyediaan Alat Bantu	27.000.000	25.000.000	92,59
Pemberian Layanan Kedaruratan	24.700.000	2.300.000	9,31
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**243.814.000**	**243.814.000**	**100,00**
Penyediaan Permakanan	17.880.000	17.880.000	100,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	75.934.000	75.934.000	100,00
Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000	150.000.000	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**7.227.412.250**	**6.940.541.750**	**96,03**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.227.412.250**	**6.940.541.750**	**96,03**
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.645.000	1.375.000	51,98
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16.327.250	14.967.250	91,67
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.208.440.000	6.924.199.500	96,06
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**142.092.000**	**131.257.000**	**92,37**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**142.092.000**	**131.257.000**	**92,37**
Penyediaan Makanan	142.092.000	131.257.000	92,37

Sumber : Bagian TPKS Kab. Lebak

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil pencapaian target kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain, baik terkait dengan keterbatasan anggaran, SDM maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak mengurangi upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten sebagai bahan evaluasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Semoga hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD ini akan menjadi umpan balik yang akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan Otonomi Daerah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

GEOPARK
BAYAH DOME

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
Tahun 2023